



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

RENSTRA

Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026



**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Bhayangkara No. 54. Samarinda**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 disusun sebagai salah satu acuan dalam merumuskan lebih lanjut langkah-langkah operasional yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan peternakan.

Secara singkat dijelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program kegiatan pembangunan peternakan yang dilengkapi dengan matriks kegiatan Tahun 2024 – 2026 yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran subsektor peternakan terhadap diversifikasi perekonomian daerah.

Perencanaan strategis ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan tentunya dengan dukungan semua pihak baik Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) maupun swasta, praktisi, akademisi dan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun peternakan di wilayah Kalimantan Timur.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diperlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, tentunya melalui masukan semua pihak. Namun demikian diharapkan rancangan perubahan renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan stakeholder, pemerintah, pelaku usaha dan lembaga lainnya. Semoga Bermanfaat.

Kepala Dinas,



Fahmi Himawan, ST, M.T

Widyaiswara Pembina Tingkat I

NP 19741216 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	II-1
2.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.1 Peta Sebaran Inseminasi Buatan di Kalimantan Timur	II-1
2.1.2 Peta Sebaran Pelaksanaan Identifikasi Ternak (Penandaan) di Kalimantan Timur	II-2
2.1.3 Peta Sebaran Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku di Kalimantan Timur II- 3	
2.1.4 Peta Sebaran Penyakit Menular di Kalimantan Timur	II-4
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	II-5
2.2.1 Tugas	II-5
2.2.2 Fungsi	II-5
2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	II-6
2.3 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	II-10
2.3.1 Sumber Daya Manusia	II-10
2.3.2 Sumber Daya Aset atau Modal	II-12
2.4 Kondisi umum Subsektor Peternakan Dan Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	II-17
2.4.2 Evaluasi Capaian Program Tahun 2019-2020	II-31
2.4.3 Evaluasi Capaian Program Tahun 2021-2022	II-33
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	II-37
2.5.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	II-37
2.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur	II-39
2.6 Crosscutting Map	II-47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	III-1

3.1.1 Populasi Dasar Tidak Mencukupi Kebutuhan, Produksi Dan Produktifitas Ternak Rendah	III-2
3.1.2 Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal	III-4
3.1.3 Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak Belum Memadai.....	III-5
3.1.4 Potensi Komoditas Ternak Lokal Belum Dimanfaatkan Secara Optimal. III-6	6
3.1.5 Masih Adanya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	III-7
3.1.6 Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Pengawasan Mutu Obat Hewan Belum Optimal	III-8
3.1.7 Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak Optimal	III-8
3.1.8 Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Belum Sepenuhnya Memadai Untuk Kondisi Situasi Terkini. III-9	9
3.1.9 Pemenuhan Konsumsi Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (Asuh) Belum Sepenuhnya Dipahami Secara Merata Di Masyarakat	III-10
3.1.10 Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Asal Hewan Belum Optimal III-11	11
3.1.11 Pematangan Betina Produktif Dan Kesejahteraan Hewan Masih Terjadi Secara Sporadis Di Kalimantan Timur.....	III-12
3.1.12 Terbatasnya Kawasan Peternakan.....	III-12
3.1.13 Akses Pembiayaan Usaha Peternakan Oleh Masih Rendah.....	III-14
3.1.14 Keterlibatan Swasta Dalam Usaha Peternakan Masih Rendah.....	III-14
3.1.15 Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Peternakan masih rendah.....	III-16
3.1.16 Daya Saing Produk Peternakan Rendah dan Fluktuasi Harga Komoditas Picu Inflasi	III-17
3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah	III-20
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	III-21
3.3.1 Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian pertanian Republik Indonesia	III-21
3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia	III-25
3.3.3 Keterkaitan RENSTRA Kabupaten/Kota	III-28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Aspek Kinerja dari SDG's).....	III-30
3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-30
3.4.2 Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/ SDGs. III-33	33
3.5 Faktor/Isu Strategis Pembangunan Peternakan dan Analisa SWOT	III-35
3.5.1 Penentuan (Identifikasi) dan Klasifikasi (Pengelompokan) Faktor/Isu Strategis	III-35
3.5.2 Pembobotan Faktor/Isu Strategis.....	III-37
3.5.3 Analisa arah Strategi berdasarkan pembobotan faktor strategis.....	III-38
3.5.4 Kebijakan strategi	III-39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN IV-1	
4.1 Tujuan.....	IV-2

4.2 Sasaran	IV-7
4.3 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja (Tujuan, Output dan Outcome)	IV-12
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1 Strategi.....	V-1
5.2 Arah Kebijakan Teknis	V-2
5.2.1 Kebijakan Perbibitan, Pakan Dan Produksi Peternakan.....	V-3
5.2.2 Kebijakan Kesehatan Hewan	V-3
5.2.3 Kebijakan Kawasan Dan Agribisnis	V-3
5.2.4 Kebijakan Kesmavet	V-4
5.2.5 Kebijakan Teknis Uptd Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak	V-4
5.2.6 Kebijakan Teknis Uptd Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	V-4
5.3 Indikator Teknis	V-4
5.3.1 Bidang Perbibitan, Pakan Dan Produksi Peternakan	V-4
5.3.2 Bidang Kesehatan Hewan.....	V-5
5.3.3 Bidang Kawasan Dan Agribisnis.....	V-6
5.3.4 Bidang Kesmavet.....	V-7
5.3.5 UPTD Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak.....	V-7
5.3.6 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.....	V-8
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1 Program.....	VI-1
6.2 Kegiatan	VI-2
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
8.1 Kesimpulan	VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan	VIII-1
LAMPIRAN	a

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur	II-7
Gambar 2. Profil pegawai Dinas Peternakan dan kesehatan hewan	II-12
Gambar 3. Grafik Prevalensi Balita Stunting Kalimantan Timur Tahun 2022	II-46
Gambar 4. Crosscutting Map antar Perangkat Dinas	49
Gambar 5. Keterhubungan Kinerja Internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	51
Gambar 6. <i>Pohon Masalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur</i>	19
Gambar 7. Keterkaitan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026	III-20
Gambar 8. Arah strategi berdasarkan pembobotan faktor internal dan eksternal.	III-39
Gambar 9. Penyusunan Kebijakan strategi berdasarkan SWOT.....	III-42
Gambar 10. <i>Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur</i>	13

DAFTAR TABEL

Tabel 3. Profil Pegawai Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Kodisi Per 31 Desember 2022	II-11
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Induk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	II-12
Tabel 5. Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet	II-13
Tabel 6. Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	II-14
Tabel 7. Perkembangan Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022	II-17
Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Tahun 2013 dan Tahun 2018 pada masing-masing komoditas peternakan.....	II-18
Tabel 9. Kelompok Peternak berdasarkan Jenis Komoditas Tahun 2022	II-19
Tabel 10. Pemotongan Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022	II-19
Tabel 11. Data Pemotongan sapi lokal tercatat di Kalimantan Timur Tahun 2022	II-20
Tabel 12. Data Pemotongan sapi betina di Kalimantan Timur Tahun 2019-2022... ..	II-20
Tabel 13. Perkembangan Harga Komoditas Ternak dan Produk Ternak Tahun 2018-2022.....	II-21
Tabel 14. Pemasukan ternak dari Provinsi Kalimantan Selatan melalui jalur darat (Checkpoin) Tahun 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023 (ekor) ...	II-22
Tabel 15. Pemasukan ternak dari Tahun 2019-2022	II-22
Tabel 16. Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis Tahun 2019-2022 (Kasus)	II-23
Tabel 17. Ruang Lingkup Uji Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Tahun 2023.....	II-23
Tabel 18. Pemanfaatan Kawasan untuk aktifitas peternakan (Hektar) Tahun 2019-2022.....	II-25
Tabel 19. PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)	II-25
Tabel 20. Distribusi Presentase PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022	II-26
Tabel 21. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur (persen) 2019-2022.....	II-27
Tabel 22. Capaian Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.....	II-28
Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	II-36
Tabel 24. Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (dalam Ton).....	II-39
Tabel 25. Proyeksi Kebutuhan Daging berbagai Jenis Komoditas (ton)	II-42
Tabel 26. Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018– 2022 (dalam Ton)	II-42
Tabel 27. Proyeksi konsumsi Telur dalam rangka pembangunan IKN	II-43
Tabel 28. Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022.....	II-44
Tabel 29. Masalah Utama, Permasalahan dan Akar Masalah Pembangunan Peternakan di Provinsi Kalimantan Timur.....	III-1
Tabel 30. Telaahan RPD Provinsi Kalimantan Timur dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.	III-21
Tabel 31. Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	III-24
Tabel 32. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.....	III-25
Tabel 33. Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.....	III-28

Tabel 34. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.....	III-28
Tabel 35. Keterkaitan Subsektor Peternakan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).....	III-33
Tabel 36. Klasifikasi Faktor/Isu Strategis Terkait pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur	III-36
Tabel 37. Pembobotan Faktor Eksternal.....	III-37
Tabel 38. Pembobotan Faktor Internal.....	III-38
Tabel 39. Strategi dan Kebijakan Teknis yang disusun dan dirumuskan narasinya..	III-42
<i>Tabel 40. Target Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan Tahun 2024-2026.....</i>	<i>IV-4</i>
Tabel 41. Target Nilai SAKIP di Kalimantan Timur 2024-2026.....	IV-6
Tabel 42. Target Indeks Kepuasan Masyarakat di Kalimantan Timur 2024-2026	IV-7
Tabel 43. Nilai Tukar Pertanian Tahun 2021-2022	IV-8
Tabel 44. Target NTP Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2024-2026	IV-8
Tabel 45. Target Peningkatan Produksi Daging di Kalimantan Timur 2024-2026....	IV-9
Tabel 46. Tabel Target Peningkatan Produksi Telur di Kalimantan Timur 2024-2026	IV-9
Tabel 47. Target Peningkatan Aneka Ternak di Kalimantan Timur 2024-2026.....	IV-10
Tabel 48. Target Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) Tahun 2024-2026.....	IV-11
Tabel 49. Target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024-2026	IV-11
Tabel 50. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	VII-1
Tabel 51. Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	VII-1
Tabel 52. Indikator kinerja Program Prioritas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.....	VII-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 10 Kabupaten/Kota, dengan luas wilayah daratan menjadi 12.734.692 Ha atau 127.345,92 km². Jumlah penduduk Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 3.941.766 jiwa dengan kepadatan 30,95 jiwa/km², rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,98% selama lima Tahun sejak Tahun 2018-2022. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata, porsi terbesar berada di Samarinda (21,56%), selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (19,74%), Balikpapan (18,46%), Kabupaten Kutai Timur (10,80%), Kabupaten Paser (7,52%), Kabupaten Berau (6,92%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,87%), Bontang (4,72%), Kabupaten Kutai Barat (4,46) dan Kabupaten Mahakam Ulu (0,95%). Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan akan komoditas ternak seperti daging, telur dan susu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur bahwa sektor ekonomi yang memiliki peran dalam pencapaian PDRB Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian. Data PDRD Kalimantan Timur Tahun 2022 sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 55,79%, sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya sebesar 8,48% menjadi 6,51%. Dari angka tersebut perolehan PDRB bidang pertanian didominasi oleh sub sektor perkebunan kemudian perikanan, kehutanan, hortikulturan, peternakan, serta tanaman pangan. Kontribusi sub sektor peternakan berada pada kisaran 0,32% namun jika dilihat dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan dengan kontribusi paling besar berasal dari daging ayam, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sub sektor peternakan Tahun 2022 sebesar 1,94% dengan rata-rata per Tahun dari Tahun 2019 sampai 2022 sebesar 1,98%.

Indikator ekonomi lainnya seperti, laju inflasi mengalami kenaikan pada Tahun 2022 mencapai 5,35% disebabkan kenaikan biaya produksi seperti biaya produksi seperti biaya pakan dan biaya

perawatan dapat meningkatkan harga jual sapi dan daging ayam boiler karena biaya produksi yang tinggi dan permintaan pasar yang tinggi dapat mempengaruhi kenaikan harga jual sapi dan daging ayam boiler. Sedangkan angka indeks Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan peternak. Pada Tahun 2022 Nilai Tukar Petani Peternakan mengalami peningkatan sebesar 108,76 daripada Tahun 2021 sebesar 103,82

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima Tahun (2020-2024), yaitu :1) Pembangunan SDM; 2) Pembangunan Insfrastuktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; 5) Transformasi Ekonomi.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani/peternak dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :1) Terjaganya ketahanan pangan nasional; 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; 3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; 4) Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan 5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Fokus kegiatan yang dilakukan kementerian pertanian yaitu pada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional ; 2) Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian ; 3) Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian; 4) Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian; 5) Terwujudnya

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

Sebagai bagian dari pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan juga mengacu dan menelaah Renstra kementerian pertanian.

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya, penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik dan peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas maka sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batu bara. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.

Untuk itu maka ditetapkanlah Moto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

” Korporasi Peternak wujudkan Ketahanan Pangan Asal Hewan Yang Berdaulat, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan”

Korporasi peternakan berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan asal hewan yang berdaulat, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai produsen utama produk peternakan seperti daging, susu, dan telur, korporasi peternakan

berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan asal hewan di dalam negeri, serta menghasilkan produk-produk yang dapat diekspor ke luar negeri.

Pembangunan peternakan Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan populasi, produksi pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan strategi :

1. Mendorong Peningkatan dan Penerapan Teknologi Peternakan;
2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktifitas Ternak;
3. Peningkatan Produksi dan Produksi Pakan Ternak;
4. Pemberdayaan Potensi Komoditas Ternak Lokal
5. Peningkatan Status Kesehatan Hewan
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Mutu Obat Hewan
7. Peningkatan Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak
8. Peningkatan Pemenuhan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
9. Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan
10. Peningkatan Pengendalian Pematangan Betina Produktif dan Kesejahteraan Hewan
11. Pengembangan Kawasan Peternakan
12. Penguatan Kemudahan dan Akses Pembiayaan Usaha Peternakan
13. Peningkatan Peran Swasta dan Usaha Peternakan Rakyat
14. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dan Kelembagaan Peternakan
15. Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan
16. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktifitas
17. Penguatan Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang peternakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme

forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap Tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya secara sistematis segala usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukr hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pada dasarnya Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Tahun 2025, dan Tahun 2026 .

Selanjutnya RENSTRA ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- (1). Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- (2). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
- (3). Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025
- (4). Undang-undang No. 18 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (5). Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur;
- (6). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- (7). Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- (8). Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

- (9). Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- (10). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11). Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor 1447);
- (13). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- (14). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
- (15). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- (16). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

(17). Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

(18). Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur juga senantiasa memperhatikan peraturan perundangan lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 3 (Tiga) Tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Untuk menentukan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mencerminkan

penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- (1). Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tiga Tahun dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan peternakan di Kalimantan Timur
- (2). Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh stakeholder serta masyarakat peternakan di Kalimantan Timur
- (3). Tersusunnya berbagai Kebijakan dan Program Pembangunan Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan, yang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan dalam kurun waktu satu sampai lima Tahun.
- (4). Penyusunan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- (5). Renstra ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Bab ini menguraikan lingkungan intern yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, kinerja pelayanan publik serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementrian Pertanian dan Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten / Kota serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, terakhir tentang penentuan isu-isu strategis;

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran jangka menengah dan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (Tiga) mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam waktu lima Tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur lima Tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pertanian Urusan Peternakan

Bab ini menyajikan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 3 (Tiga) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

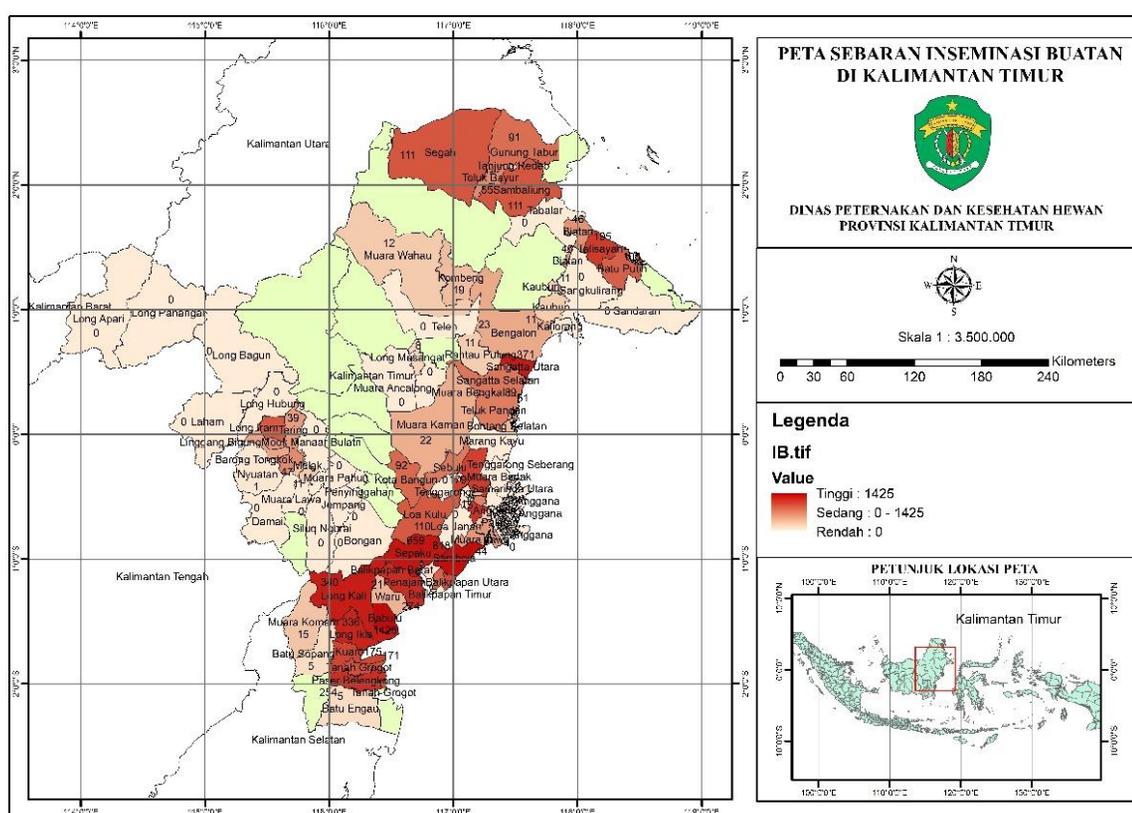
Bab ini memuat ringkasan singkat serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (Tiga) Tahun ke depan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Aspek Geografi

Secara geografis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terletak pada koordinat $00^{\circ}29'34,3''S$ $117^{\circ}08'41,5''E$. Pelayanan langsung kepada masyarakat peternak meliputi pelayanan teknis, fasilitasi, pembinaan dan dukungan regulasi. Beberapa pelayanan teknis tergambar dalam sebaran spasial sebagai berikut:

2.1.1 Peta Sebaran Inseminasi Buatan di Kalimantan Timur

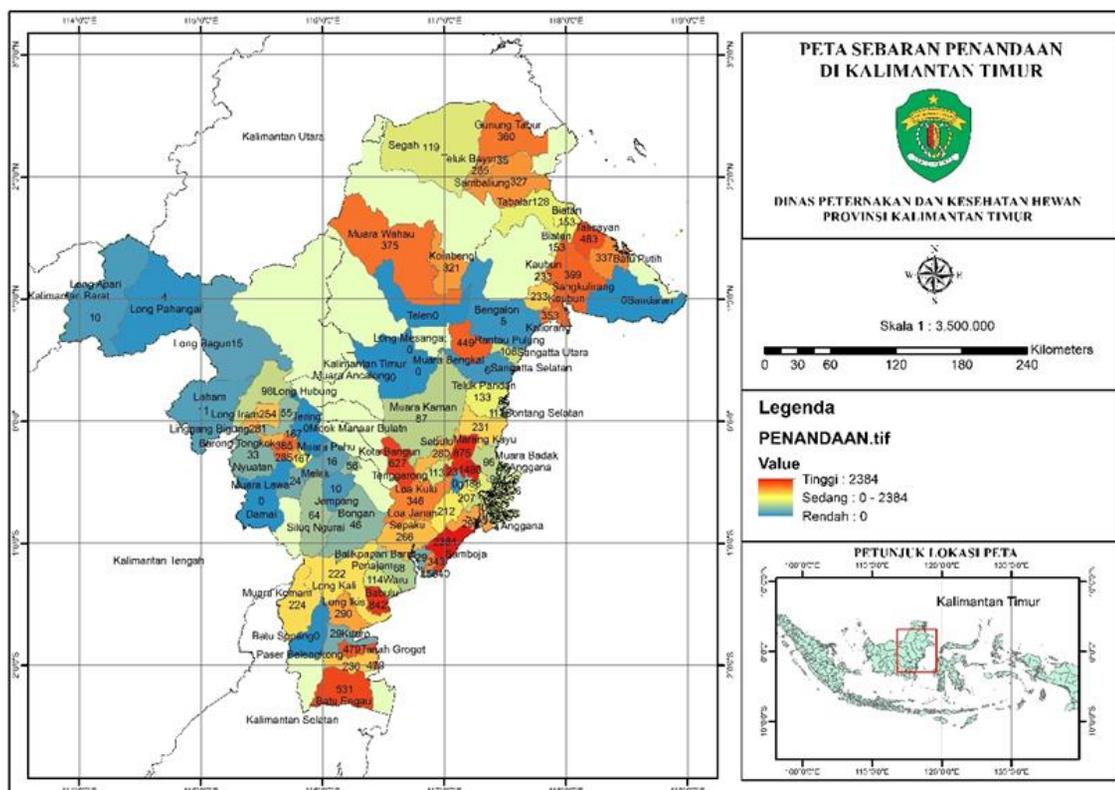


Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memiliki program inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peternakan di wilayah tersebut. Inseminasi buatan adalah proses pembuahan telur secara buatan dengan memasukkan sperma jantan ke dalam rahim betina dengan menggunakan teknik khusus. Terdapat 86 wilayah kecamatan yang melakukan program inseminasi buatan yang tersebar pada 10 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur.

Program inseminasi buatan ini dilaksanakan oleh petugas-petugas yang telah terlatih dan terampil dalam melakukan proses inseminasi buatan. Dalam program ini, Dinas bekerja sama dengan para peternak untuk memfasilitasi proses inseminasi buatan bagi hewan ternak mereka. Inseminasi buatan memiliki manfaat yang cukup signifikan bagi peternakan, antara lain dapat meningkatkan produktivitas ternak, meningkatkan kualitas genetik ternak, serta dapat membantu mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh proses perkawinan secara alami.

Dalam menjalankan program inseminasi buatan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para peternak mengenai pentingnya menjaga kesehatan ternak dan tata cara merawat ternak yang baik dan benar.

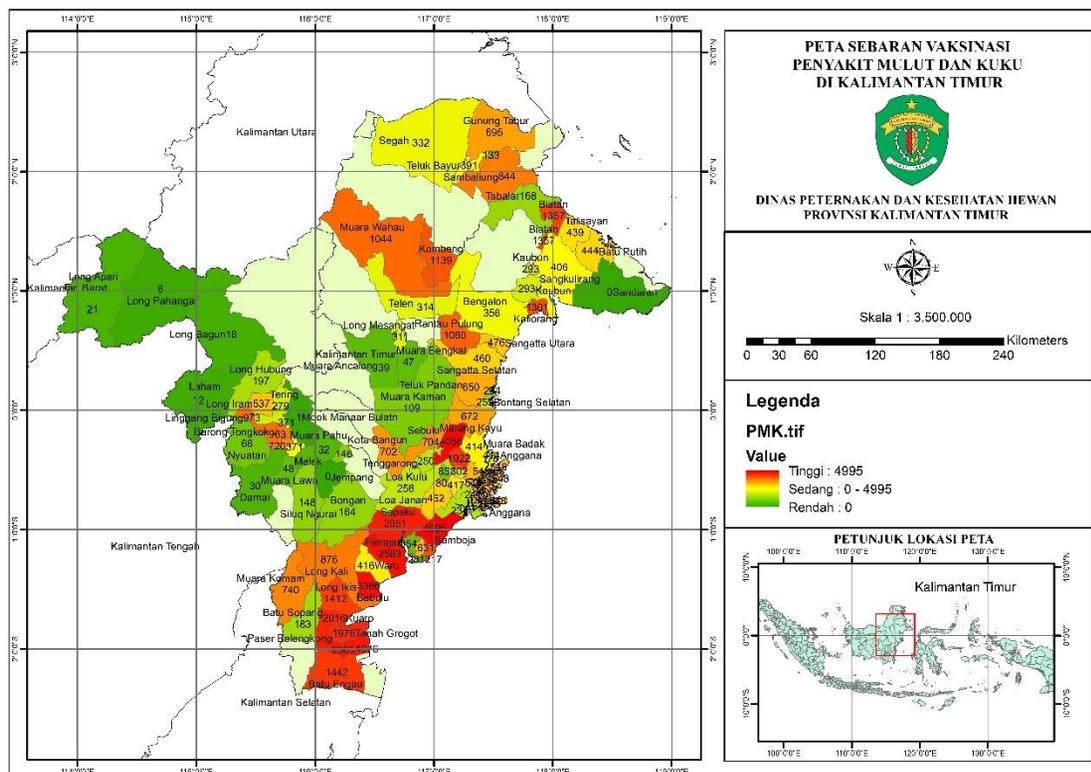
2.1.2 Peta Sebaran Pelaksanaan Identifikasi Ternak (Penandaan) di Kalimantan Timur



Penandaan hewan merupakan salah satu tugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 86 wilayah kecamatan yang telah melakukan penandaan yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Penandaan hewan dilakukan dengan memberikan tanda pada hewan yang menunjukkan

status kesehatan hewan tersebut, seperti tanda vaksinasi, tanda hasil pemeriksaan kesehatan, atau tanda identitas pemilik hewan. Penandaan hewan bertujuan untuk melindungi kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit hewan, dan memudahkan pelacakan hewan jika terjadi masalah kesehatan hewan atau permasalahan hukum terkait hewan tersebut. Penandaan hewan dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dan terampil dalam melakukan tindakan tersebut, dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.3 Peta Sebaran Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku di Kalimantan Timur

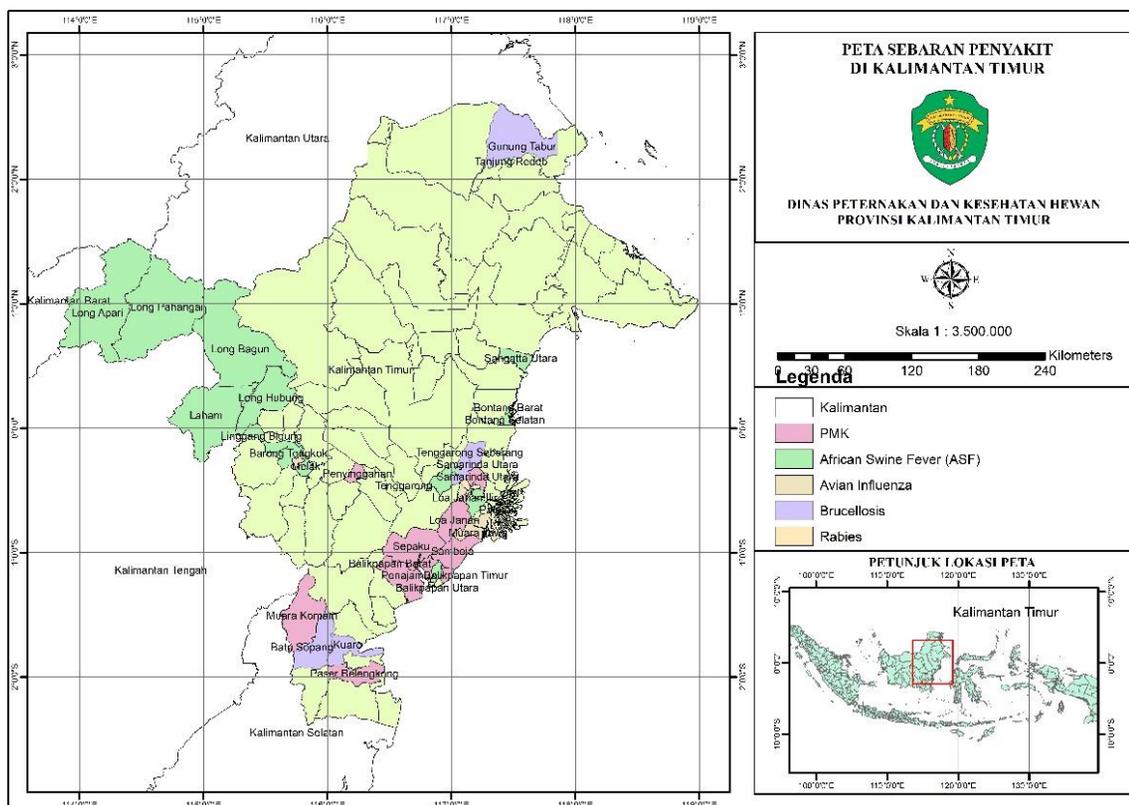


Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit menular yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi. Penyakit ini disebabkan oleh virus PMK yang dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung atau melalui benda-benda yang terkontaminasi virus. Terdapat 86 wilayah kecamatan yang dilakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur

Apabila terjadi kasus PMK di wilayah Kalimantan Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, seperti karantina hewan, pemusnahan hewan yang terinfeksi, dan pemberian

vaksinasi massal pada hewan yang belum terinfeksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke daerah lain dan melindungi kesehatan hewan serta masyarakat yang terkait dengan kegiatan peternakan.

2.1.4 Peta Sebaran Penyakit Menular di Kalimantan Timur



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Namun, secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di setiap wilayah bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan penyakit menular pada hewan, seperti penyakit rabies, penyakit avian influenza, dan sebagainya serta melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui vaksinasi, karantina, dan tindakan sanitasi yang ketat di fasilitas peternakan dan pasar hewan.

Terdapat 10 kecamatan yang terdeteksi Penyakit Mulut dan Kuku, 11 kecamatan yang terdeteksi penyakit African Swine Fever (ASF), 5 kecamatan yang terdeteksi penyakit Avian Influenza, 5 kecamatan yang terdeteksi penyakit Brucellosis dan 1 kecamatan yang terdeteksi penyakit Rabies.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas berisi tentang pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

2.2.2 Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- (1). Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- (2). Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (4). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
- (5). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan dan agribisnis peternakan;
- (6). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- (7). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- (8). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- (9). Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (10). Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (11). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

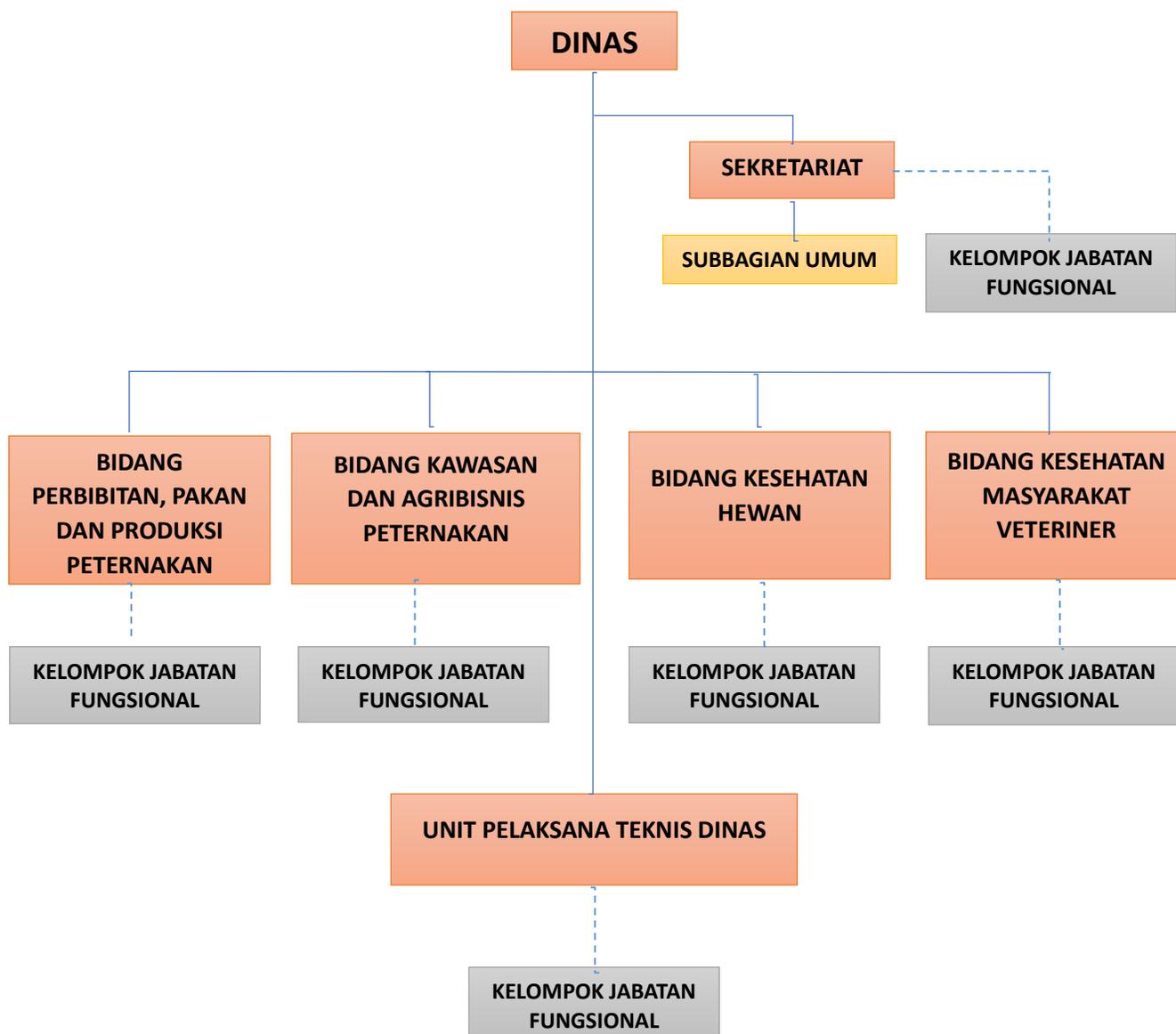
2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum
3. Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan
4. Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
 - c. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak
8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan
 - c. Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar bagan. 1 berikut



Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan serta pengolahan aset. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

1. Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perbibitan dan budidaya peternakan. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan membawahkan

2. Bidang Kawasan dan Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan kawasan dan agribisnis peternakan. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang Kesehatan Hewan. Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan
4. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik Dinas di bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Untuk melaksanakan tugas UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak terdiri dari ;

- a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
 - d. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak
 - e. Kelompok Jabatan fungsional
6. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik Dinas di bidang Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Untuk melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
 - e. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan Tugas dan Fungsinya

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari ;

- a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan'
 - d. Seksi penyidikan dan pengujian penyakit peternakan
 - e. Kelompok Jabatan fungsional
 - f. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bgaian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapala UPTD Seksi-seksi di masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior sebagai Ketua ketua kelompok dan bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD.
7. Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempuntai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh gubernur atas usul Kepala Dinas

2.3 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Bentuk dan tujuan organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

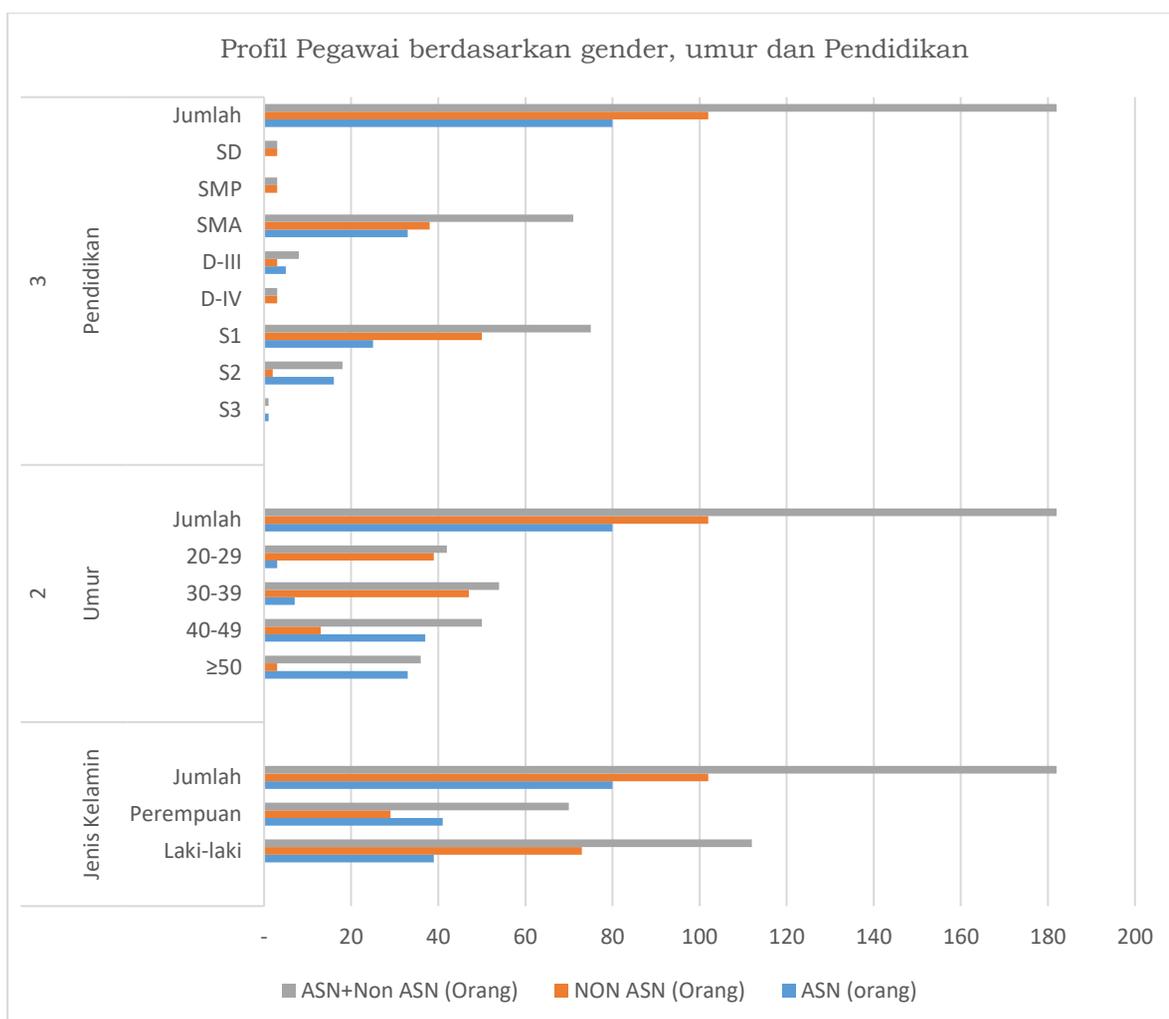
Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 182 orang terdiri dari 80 orang ASN (PNS) dan 102 orang Non ASN yang terdistribusi di lingkup Kantor Dinas dan UPTD.

Kondisi umum sumberdaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilihat dari aspek gender, aspek umur, aspek pendidikan dan jenis jabatan yang diampu adalah sebagai mana tabel berikut:

Tabel 1. Profil Pegawai Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Kodisi Per 31 Desember 2022

NO	KATEGORI	ASN (orang)	NON ASN (Orang)	JUMLAH (Orang)
1	Jenis Kelamin			
	Laki-laki	39	73	112
	Perempuan	41	29	70
	<i>Jumlah</i>	80	102	182
2	Umur			
	≥50	33	3	36
	40-49	37	13	50
	30-39	7	47	54
	20-29	3	39	42
	<i>Jumlah</i>	80	102	182
3	Pendidikan			
	S3	1	-	1
	S2	16	2	18
	S1	25	50	75
	D-IV	-	3	3
	D-III	5	3	8
	SMA	33	38	71
	SMP	-	3	3
	SD	-	3	3
	<i>Jumlah</i>	80	102	182
4	Jenis Jabatan			
	Struktural	14	-	14
	Fungsional	18	-	18
	Pelaksana	48	102	150
	<i>Jumlah</i>	80	102	182
5	Eselon			
	II.A	1	-	1
	III.A	5	-	5
	III.B	2	-	2
	IV.A	6	-	6
	<i>Jumlah</i>	14	-	13
6	Golongan/Pangkat Ruang			
	IV/b	5	-	5
	IV/a	8	-	8
	III/d	20	-	20
	III/c	3	-	3
	III/b	13	-	13
	III/a	12	-	12
	II/d	10	-	10
	II/c	5	-	5
	II/b	4	-	4
	<i>Jumlah</i>	80	-	80

Sumber: Laporan Tahun 2022 Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 2. Profil pegawai Dinas Peternakan dan kesehatan hewan

2.3.2 Sumber Daya Aset atau Modal

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Induk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tanah Kantor	3,272	m2
2	Gedung Kantor	3	Unit (@2 Lantai)
3	Gedung Klinik Hewan	1	unit
4	Taman	1,113	m2
5	Listrik	3	Jaringan
6	Air	2	Jaringan
7	Telepon	2	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	3	Area
9	Ruang Rapat	2	Ruang
10	Ruang Arsip	2	Ruang
11	Koperasi	1	Buah
12	Perpustakaan	1	Ruang
13	Ruang CS	0	Ruang
14	PC	55	Unit

No	Uraian	Volume	Satuan
15	Note book	25	unit
16	Laptop	24	Unit
17	AC	57	unit
18	Ruang Obat	1	Ruang
19	Ruang Persediaan/Laktasi	1	Ruang
20	Mobil Dinas Ess	6	Unit
21	Mobil operasional	11	Unit
22	Motor Dinas	45	Unit
23	Kantin	1	Buah
24	Website	1	Buah
25	Papan Pengumuman	2	Buah
26	Mushola	1	Unit
27	Aplikasi	4	buah
28	Brankas	11	buah
29	Genset	1	unit
30	Printer Multifungsi	2	Buah

Sumber: SIMDA BMD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Tabel 3. Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tanah	686.4	m2
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) 309 m2
3	Klinik Hewan	0	Ruang
4	Taman	10	m2
5	Listrik	41,500	KVA
6	Air	1	Jaringan
7	Telepon	1	Line
8	Internet	2	Line
9	Area Parkir	1	Area
10	Ruang Rapat	1	Ruang
11	Ruang Pengujian Lab	7	Ruang
12	Ruang Kepala UPTD	1	Ruang
13	Ruang Staff	4	Ruang
14	Ruang Arsip	1	Ruang
15	Koperasi	0	Buah
16	Perpustakaan	0	Ruang
17	Ruang CS	1	Ruang
18	Pos Pengamanan	1	Ruang
19	Komputer PC	6	Unit
20	Laptop	11	Unit
21	Ruang Cuci Alat	1	Ruang
22	Ruang Tunggu	1	Ruang

No	Uraian	Volume	Satuan
23	Ruang Media/ Reagen/Sampel	2	Ruang
24	Ruang Persediaan/Gudang	1	Ruang
25	Ruang Pengadaan	0	Ruang
26	Mobil Dinas	1	Unit
27	Mobil operasional	3	Unit
28	Motor Dinas	2	Unit
29	Dapur/Pantry	1	Buah
30	Website	1	Buah
31	Papan Pengumuman	1	Buah
32	LED Display/Running Text	1	Buah
33	Papan iklan/ Baliho	1	Buah
34	Mushola	1	Unit
35	File Arsip	2	Buah
36	Printer Multifungsi	7	Buah
37	Kandang Observasi	1	Kandang

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Tabel 4. Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tractor lainnya	1	Unit
2	Mesin Proses lainnya	1	Unit
3	Portable Generating Set	1	Unit
4	Pompa Air	12	Unit
5	PC Unit	21	Unit
6	Laptop	14	Unit
7	Notebook	2	Unit
8	CPU (Peralatan mainframe)	1	Unit
9	Hard disc	1	Unit
10	Monitor	1	Unit
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	Buah
12	Alat Bantu Produksi lainnya	1	Unit
13	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Unit
14	Truck + attachment	1	Unit
15	Pickup	1	Unit
16	Sepeda Motor	9	Unit
17	Mesin Kompresor	1	Buah
18	Neraca Halus + Lemari Kapasitas 500 gram	1	Buah
19	Neraca Dengan Digital Display	1	Buah
20	Alat Timbangan/Biara lainnya	2	Buah
21	Traktor Four Wheel (Dengan Kelengkapannya)	1	Unit

No	Uraian	Volume	Satuan
22	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya	1	Unit
23	Alat Panen Lainnya	1	Unit
24	Oven	2	Unit
25	Alat Laboratorium Lainnya	4	Unit
26	Alat Processing Lainnya	1	Unit
27	Alat Pencacah Hijauan	1	Unit
28	Stick Pengukur Sapi	1	Unit
29	Container	1	Unit
30	Alat Peternakan Lainnya	3	Unit
31	Mesin Ketik Manual Portable (11- 13 Inchi)	1	Buah
32	Lemari Besi/Metal	6	Buah
33	Lemari Kayu	22	Buah
34	Rak Kayu	5	Buah
35	Filling Cabinet Besi	3	Buah
36	Brandcash	2	Buah
37	Lemari Kaca	6	Buah
38	CCTV - Camera Control Television System	8	Unit
39	White Board	1	Buah
40	LCD Projector	1	Buah
41	Papan Tulis	1	Buah
42	Alat Kantor Lainnya	2	Buah
43	Meja Kerja Kayu	50	Buah
44	Kursi Besi/Metal	28	Buah
45	Kursi Kayu	17	Buah
46	Meja Rapat	20	Buah
47	Tempat Tidur Besi	2	Buah
48	Tempat Tidur Kayu	35	Buah
49	Meja Resepsionis	1	Buah
50	Meja Bundar	1	Buah
51	Meja Makan Besi	7	Buah
52	Kursi Rapat	40	Buah
53	Kursi Tamu	6	Buah
54	Kursi Putar	4	Buah
55	Kursi Biasa	26	Buah
56	Meja Komputer	2	Buah
57	Meubelair Lainnya	1	Buah
58	Jam Elektronik	2	Buah
59	Mesin Pemetong Rumput	11	Unit
60	Mesin Cuci	1	Unit
61	Alat Pembersih Lainnya	2	Unit
62	Lemari Es	7	Unit
63	A.C Window	19	Unit
64	A.C Split	17	Unit
65	Kipas Angin	17	Buah
66	Kompas Gas (Alat Dapur)	3	Buah
67	Televisi	8	Buah
68	Amplifier	1	Buah
69	Sound System	1	Buah

No	Uraian	Volume	Satuan
70	Wireless	1	Buah
71	Mic Conference	17	Buah
72	Camera Video	1	Buah
73	Camera Film	1	Buah
74	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Buah
76	Water Filter	1	Buah
77	Tangga Aluminium	1	Buah
78	Dispenser	4	Buah
79	Mimbar/Podium	1	Buah
80	Handy Cam	1	Buah
81	Alat Pemanas Ruangan	1	Buah
82	Home Theater	1	Buah
83	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Buah
84	Alat Pembantu Kebakaran	2	Buah
85	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	1	Buah
86	Meja Kerja	21	Buah
87	Kursi Kerja	5	Buah
88	Power Supply Microphone	2	Buah
89	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	Buah
90	Video Tape Recorder Stationer	1	Buah
91	Layar Film/Projector	2	Buah
92	Camera Digital	1	Buah
93	Camera Conference	1	Buah
94	Handy Talky (HT)	1	Buah
95	Facsimile	1	Buah
96	Unit Transceiver HF Transportable	1	Buah
97	Finger Printer Time and Attendance Access Control System	1	Buah
98	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	2	Unit
99	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit
100	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit
101	Microscope	1	Unit
102	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit
103	Timbangan/Neraca	2	Unit
104	Refrigerator	1	Unit
105	Alat laboratorium umum lainnya (dst)	1	Unit
106	Aquadestilator	1	Unit
107	Magnetic Stirer (Alat Laboratorium Patologi)	1	Unit
108	Alat laboratorium patologi lainnya (dst)	1	Unit
109	Mesin Printing	1	Unit
110	Cervix Dilatator	6	Unit

No	Uraian	Volume	Satuan
111	Container N2 Cair (Alat Laboratorium Pertanian)	2	Unit
112	Disk Mill	1	Unit
113	Neraca Analitis Kalibrator	1	Unit
114	Alat Laboratorium Lainnya	17	Unit
115	Generator Set	2	Unit
116	Mikroskop	1	Unit
117	Tanah	504.607,00	m2
118	Gedung Kantor Permanen	100	m2
119	Gedung Tertutup Permanen	36	m2
120	Bengkel/Hanggar Darurat	12	m2
121	Gedung Laboratorium Permanen	162,50	m2
122	Rumah Sakit Hewan	24,00	m2
123	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	80,00	m2
124	Gedung Pendidikan Permanen	120,00	m2
125	Gedung Pertemuan Lain-lain	30,00	m2
126	Gedung Pos Jaga Permanen	12,00	m2
127	Bangunan Untuk Kandang	1.317,00	m2
128	Rumah Negara Golongan (II dan III) Tipe A Permanen	127,00	m2
129	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	519,17	m2
130	Flat/Rumah Lain-lain	30	m2

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

2.4 Kondisi umum Subsektor Peternakan Dan Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap Tahunnya baik jumlah populasi ternak, produksi daging, susu dan telur.

Tabel 5. Perkembangan Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No.	Jenis Ternak	Existing Population					r (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	S a p i	117.504	119.485	119.974	121.290	108.613	-1,95
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68	-11,31
3	Kerbau	6.157	6.194	6.552	6.539	6.490	1,33
4	Kambing	66.378	67.892	69.929	68.997	58.552	-3,09
5	Domba	439	590	635	694	642	9,97
6	Babi	78.968	82.546	83.652	76.292	45.839	-12,71
7	Kuda	97	102	95	143	95	-0,52
8	Ayam Buras	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.815.976	5.183.873	3,21
9	Ayam Petelur	1.055.432	853.693	1.218.994	2.263.835	1.340.217	6,15
10	Ayam Pedaging	66.672.445	67.886.566	59.402.832	55.877.917	61.412.191	-2,03
11	Itik	248.978	254.683	254.749	261.263	269.564	2,01
12	Kelinci	14.189	8.859	10.830	9.462	7.931	-13,53
13	Puyuh	66.593	65.808	79.222	94.339	88.143	7,26
14	Merpati	4.027	4.776	5.015	5.375	5.678	8,97
15	Itik Manila	42.851	42.890	52.823	64.178	67.608	12,08

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2022

Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik dan itik manila) serta aneka ternak (kelinci, puyuh dan merpati).

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan populasi ternak besar sejak Tahun 2018 - 2022 untuk sapi sebesar -1,95%, dan Kerbau 1,33%. Rata-rata pertumbuhan populasi ternak kecil Tahun 2018-2022 untuk kambing sebesar -3,09%, domba 9,97%, dan babi -12,71%. Untuk ternak unggas rata-rata pertumbuhan populasi paling tinggi ada pada Itik Manila sebesar 12,08%.

Pertumbuhan dan perkembangan populasi juga diikuti pertumbuhan/perkembangan Rumah Tangga Usaha Peternak (RTUP) pada masing-masing komoditas ternak. Sumberdaya manusia peternakan (Peternak) yang mengusahakan peternakan juga mengalami pasang surut baik pada beberapa komoditas (Rumah Tangga usaha Peternak), tergambar pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Tahun 2013 dan Tahun 2018 pada masing-masing komoditas peternakan

No	Komoditas	Rumah Tangga Usaha Peternakan (RT)		2013 to 2018	
		2013	2018	Growth	%
1	Kerbau	753	364	↘	-51.66%
2	Sapi Perah	2	0	↘	-100.00%
3	Sapi Potong	19,777	17,772	↘	-10.14%
4	Babi	4,477	4,150	↘	-7.30%
5	Domba	13	62	↗	376.92%
6	Kambing	4,438	6,353	↗	43.15%
7	kuda	3	5	↗	66.67%
8	Itik	7,142	3,153	↘	-55.85%
9	Itik Manila	3,384	5,031	↗	48.67%
10	Ayam Lokal	35,391	48,865	↗	38.07%
11	Ayam Ras Pedaging	1,105	954	↘	-13.67%
12	Ayam Ras Petelur	79	183	↗	131.65%
13	Lainnya	568	388	↘	-31.69%
TOTAL		77,132	87,280	↗	13.16%

Sumber: (Ditjenak-Keswan, 2023)

Sumber daya manusia (SDM) kelompok peternak memiliki peran yang penting dalam pembangunan peternakan, SDM kelompok peternak merupakan salah satu aset kunci yang harus diperhatikan. Investasi dalam pengembangan SDM kelompok peternak dapat membawa dampak positif

yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keberhasilan peternakan secara keseluruhan.

Tabel 7. Kelompok Peternak berdasarkan Jenis Komoditas Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Komoditas						Jumlah Kelompok Per Kab/Kota
		Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Ayam	Itik	
1.	Balikpapan	17	-	-	-	-	1	18
2.	Berau	104	-	2	-	-	1	107
3.	Bontang	11	1	-	1	-	-	13
4.	Kutai Barat	85	-	2	3	10	4	104
5.	Kutai Kartanegara	646	5	23	4	15	12	705
6.	Kutai Timur	242	-	10	-	5	1	258
7.	Mahulu	13	-	1	4	2	-	20
8.	Paser	318	-	5	-	4	5	332
9.	PPU	204	-	5	-	12	1	222
10.	Samarinda	113	-	6	-	3	-	122
TOTAL		1,753	6	54	12	51	25	1,901

Sumber: Laporan Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2022

Tabel 8. Pemotongan Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No.	Jenis Ternak	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	50,288	51,426	52,857	46,316	49,607
2	Sapi Perah	-	10	2	14	2
3	Kerbau	243	387	301	327	433
4	Kuda	-	-	2	2	2
5	Kambing	49,264	45,906	45,155	59,881	63,876
6	Domba	9	160	388	373	170
7	Babi	22,952	29,562	30,003	37,741	32,700
8	Ayam Buras	6,853,754	6,558,623	6,652,808	6,742,366	6,877,214
9	Ayam Petelur	527,716	426,847	609,497	734,243	748,928
10	Ayam Pedaging	60,005,201	61,097,909	53,462,549	54,723,734	55,818,209
11	Itik	124,489	127,342	127,377	130,632	133,244
12	Kelinci	10,642	6,644	8,123	7,097	7,238
13	Puyuh	59,934	59,227	71,300	84,905	86,603
14	Merpati	5,034	5,970	6,269	6,719	6,853
15	Itik Manila	25,711	25,734	31,694	38,507	39,277

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2022

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa Pemotongan terbanyak Tahun 2022 terdapat pada komoditas ayam pedaging dengan jumlah Pemotongan 55.818.209 ekor. Bila dibandingkan Tahun 2018, Pemotongan ternak yang

mengalami peningkatan terdapat pada, ayam petelur, itik, puyuh, merpati, Kerbau, Babi dan itik manila. Sedangkan Pemotongan ternak yang mengalami penurunan adalah sapi, ayam pedaging, kuda, domba, dan Kelinci.

Pertumbuhan negatif pada komoditas ternak besar (ruminansia) dapat dipengaruhi akibat adanya pemotongan sapi betina, dimana sapi betina merupakan "Mesin produksi/pabrik" dalam menghasilkan anak/keturunan sehingga populasi dapat bertambah dan berkembang, berikut data pemotongan sapi betina di Kalimantan Timur.

Tabel 9. Data Pemotongan sapi lokal tercatat di Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kab./Kota	Pemotongan Ternak					Total
		Kerbau		Sapi			
		betina tidak produktif	jantan	sapi betina produktif	sapi betina tidak produktif	sapi jantan	
1	Balikpapan	-	-	-	199	3,509	3,708
2	Berau	-	1	-	944	1,276	2,221
3	Bontang	-	-	-	58	2,805	2,863
4	Kutai Barat	-	-	-	-	965	965
5	Kutai Kartanegara	1	-	-	40	987	1,028
6	Kutai Timur	-	4	-	11	2,366	2,381
7	Paser	-	-	-	-	1,131	1,131
8	Penajam Paser Utara	-	-	1	14	388	403
9	Samarinda	-	-	-	2	6,880	6,882
Jumlah		1	5	1	1,268	20,307	21,582

Sumber: Laporan Bidang Kesmavet, DPKH

Tabel 10. Data Pemotongan sapi betina di Kalimantan Timur Tahun 2019-2022

No.	Kab/Kota	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Balikpapan	199	80	33	29
2	Berau	944	831	839	568
3	Bontang	58	20	5	18
4	Kutai Barat	-	-	-	3
5	Kutai Kartanegara	40	60	33	5
6	Kutai Timur	11	-	1	-
7	Mahulu	-	-	-	-
8	Paser	-	-	-	-
9	Penajam Paser Utara	15	-	2	29
10	Samarinda	2	5	5	16
TOTAL		3,288	3,016	2,939	2,690

Sumber: Laporan Bidang Kesmavet, DPKH

Tabel 11. Perkembangan Harga Komoditas Ternak dan Produk Ternak Tahun 2018-2022

NO	KOMODITAS	SATUAN	TAHUN (Rp)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi	Kg/BH	41.926	44.203	41.520	58.000	58.000
2	Kambing	Kg/BH	50.579	49.200	44.268	115.000	115.000
3	Ayam Kampung	Ekor	80.000	85.463	85.463	150.000	150.000
4	Ayam Broiler	Ekor	20.954	45.375	44.222	40.498	50.000
5	Telur Ayam Ras	Butir	1.306	1.731	1.717	1.900	1.900
6	Telur Ayam Kampung	Butir	2.167	2.650	2.652	2.500	2.500
7	Telur Itik	Butir	2.500	3.111	3.111	3.000	3.000
8	Daging Sapi	Kg	119.769	131.435	131.528	133.733	150.000
9	Daging Kambing	Kg	131.111	152.500	152.500	250.000	250.000

Sumber: Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalimantan Timur, 2022

Dari tabel tersebut terlihat bahwa harga semua komoditas mengalami peningkatan sekaligus penurunan secara bersamaan hal ini karena bervariasinya permintaan akan komoditas ternak di Kalimantan Timur setiap Tahunnya. Harga komoditas peternakan seperti daging, susu, dan telur, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan pasar, suplai produksi, biaya produksi, persaingan industri, serta faktor-faktor. Peningkatan harga pakan juga dapat mempengaruhi harga komoditas peternakan, karena pakan merupakan biaya terbesar dalam produksi ternak. Jika harga pakan naik, maka biaya produksi juga akan naik dan hal ini dapat mempengaruhi harga jual produk sehingga harga komoditas peternakan sangat dinamis dan terus berubah seiring dengan perubahan di pasar. Pada industri ruminansia besar, masih mengandalkan usaha peternakan rakyat yang belum mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dan pengelolaan pakan belum diusahakan dengan baik. Terbatasnya infrastruktur terkait pengawasan lalu lintas ternak perlu ditingkatkan untuk mengendalikan penyebaran penyakit hewan dan agar dapat menghasilkan kualitas serta keamanan produk yang terjamin.

Sedangkan dari sisi konsumsi, terjadi kesenjangan ketersediaan dan permintaan, khususnya pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari luar Kalimantan Timur. Kapasitas produksi ayam ras masih mampu ditingkatkan lagi untuk memenuhi pasar luar Kalimantan Timur dengan penambahan sarana Rumah Potong Unggas (RPU).

Pemasukan ternak dari luar daerah berfungsi untuk menutupi kesenjangan ketersediaan pada beberapa komoditas ternak yang mengalami

kekurangan. Pemasukan ternak dari luar daerah selain berdampak untuk pemenuhan kebutuhan, juga berdampak terhadap keseimbangan harga komoditas antar daerah. Pemasukan ternak dari luar daerah dilakukan dengan tetap melakukan pengawasan terhadap resiko masuknya penyakit, berikut data pemasukan ternak dari luar daerah ke dalam Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 12. Pemasukan ternak dari Provinsi Kalimantan Selatan melalui jalur darat (Checkpoint) Tahun 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023 (ekor)

Pemasukan Ternak Pada Bulan-	Ayam Potong		Ayam Buras		Itik	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Januari	17,740	253,081	600	3,725	-	-
Februari	13,420	573,651	-	3,725	-	-
Maret	15,465	-	-	-	-	-
April	9,310	-	650	-	-	-
Mei	68,192	-	1,941	-	1,113	-
Juni	84,100	-	2,320	-	850	-
Juli	197,806	-	8,370	-	2,589	-
Agustus	20,053	-	-	-	-	-
September	218,746	-	13,289	-	-	-
Oktober	161,197	-	7,620	-	924	-
November	175,032	-	14,200	-	2,010	-
Desember	184,930	-	17,700	-	2,010	-
Total	1,168,013	828,755	66,690	7,450	9,496	-

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Pemasukan ternak dari luar daerah secara keseluruhan melalui jalur udara/jalur darat pada masing-masing komoditas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Pemasukan ternak dari Tahun 2019-2022

No.	Jenis Ternak	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	45,715	48,238	39,573	49,101	50,611	43,871
2	Sapi Perah	-	-	-	-	-	-
3	Kerbau	11	11	378	-	-	9
4	Kuda	42	15	-	-	-	57
5	Kambing	47,631	54,774	53,661	32,481	62,761	32,657
6	Domba	-	-	139	355	-	-
7	Babi	-	-	2,609	6,254	-	-
8	Ayam Buras	266,470	376,000	980,112	226,778	96,507	237,500
9	DOC Ayam Petelur	433,790	724,966	597,180	788,522	487,800	512,900
10	DOC Ayam Pedaging	1,714,242	1,090,840	1,735,309	1,186,639	965,178	1,158,800
11	I t i k	26,080	22,760	98,456	12,262	6,509	25,946
12	Kelinci	-	-	377	-	-	-
13	Puyuh	26,900	51,160	50,600	79,915	44,000	32,400
14	Merpati	-	-	287	-	-	-

15	Itik Manila	-	-	5,498	-	-	-
----	-------------	---	---	-------	---	---	---

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dinamika populasi ternak di Kalimantan Timur begitu dinamis, pada berbagai komoditas mengalami pertumbuhan positif dan beberapa komoditas juga mengalami pertumbuhan negatif. Dinamika populasi ternak selain dipengaruhi pemotongan, pemasukan, pengeluaran dan produksi/produktifitas. Faktor kesehatan hewan dalam produksi/produktifitas menjadi faktor yang dalam perkembangan terakhir menjadi perhatian yang serius mengingat kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMSZ) semakin meningkat terutama penyakit yang baru terjadi/masuk ke wilayah Kalimantan Timur, berikut data kejadian PHMS Tahun 2022:

Tabel 14. Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis Tahun 2019-2022 (Kasus)

No.	PHMSZ	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	PMK	-	-	-	123
2	Brucellosis	-	106	-	84
3	Jembrana	7	26	-	-
4	Hog Cholera	-	-	-	-
5	Asf	-	-	784	1,344
6	Rabies	1	2	1	1
7	AI	-	488	5	77
8	LSD	-	-	-	-
TOTAL		8	622	790	1,629

Sumber: Laporan Tahunan Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2022.

Kesehatan hewan menjadi faktor penting terhadap keberhasilan produksi, dalam pelaksanaan penyelidikan dan penelusuran kasus penyakit hewan diperlukan peran laboratorium kesehatan hewan yang memadai. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet memiliki peran penting dalam pemantauan, diagnostik, dan penelitian berbagai penyakit hewan. Berikut adalah ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Tabel 15. Ruang Lingkup Uji Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Tahun 2023

No.	Ruang Lingkup Uji	No.	Ruang Lingkup Uji
1	Pemeriksaan Patologi anatomi	21	Uji E coli (KIT)
2	Uji Pullorum	22	Uji Coliform (KIT)
3	Uji HA-HI Avian Influenza	23	Uji TPC
4	Uji HA-HI ND	24	Uji PCR identifikasi spesies babi
5	Uji Identifikasi Ulas Darah	25	Uji PCR identifikasi spesies kucing

No.	Ruang Lingkup Uji	No.	Ruang Lingkup Uji
6	Uji Identifikasi Telur Cacing	26	Uji PCR identifikasi spesies tikus
7	Uji seller Rabies	27	Uji rapid identifikasi spesies babi
8	Uji FAT Rabies	28	Uji formalin (konvensional)
9	Uji Elisa Rabies	29	Uji formalin (KIT)
10	Uji PCR AI	30	Uji Borax
11	Uji PCR Jembrana	31	Uji Nitrit (KIT)
12	Uji PCR IBH	32	Uji Rodhamin B
13	Uji Elisa Jembrana	33	Uji Methanil yellow
14	Uji Elisa BVD	34	Uji Pembusukan
15	Uji Elisa IBR		
16	Uji Elisa PMK		
17	Uji PCR ASF		
18	Uji Elisa ASF		
19	Uji Salmonella		
20	Uji Staphylococcus (KIT)		

Sumber: Laporan Tahunan UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Pembangunan peternakan tidak terlepas dengan kawasan yang digunakan untuk aktifitas budidaya/usaha peternakan, ketersediaan kawasan yang peruntukannya terfokus akan memberikan beberapa kemudahan diantaranya adalah:

1. Kejelasan tentang status lahan/kawasan akan memudahkan dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana peternakan serta pengendalian lingkungan.
2. Kawasan peternakan yang ditetapkan, pemerintah dan otoritas terkait dapat menerapkan regulasi, kebijakan, dan standar yang lebih baik untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan peternakan. Hal ini meliputi perizinan, persyaratan sanitasi, perlindungan lingkungan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, praktik peternakan dapat diawasi dan dikontrol secara lebih efektif.
3. Mempermudah mengelola risiko dan konflik antara kegiatan peternakan dengan kegiatan lain di sekitarnya. Dalam kawasan tersebut, dapat dilakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini membantu mengurangi risiko pencemaran lingkungan, konflik antara peternakan dengan pemukiman penduduk, serta memastikan adanya keselarasan antara kegiatan peternakan dan sektor lainnya.
4. Kawasan peternakan yang terencana, perhatian dapat diberikan pada keamanan pangan dan kesehatan hewan. Kegiatan pengawasan dan pemantauan dapat dilakukan secara lebih terfokus untuk memastikan produksi hewan yang sehat, kualitas pangan yang baik, dan pencegahan

penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Kawasan peternakan yang terpisah juga membantu mengisolasi dan mengendalikan penyakit hewan yang mungkin muncul.

Melalui pendekatan pembangunan peternakan berbasis kawasan, dapat terjadi pengelolaan yang lebih baik, lingkungan yang lebih berkelanjutan, kesehatan hewan yang lebih terjamin, dan peningkatan produktivitas dalam sektor peternakan, berikut pemanfaatan kawasan untuk aktifitas peternakan dari Tahun 2019-2022;

Tabel 16. Pemanfaatan Kawasan untuk aktifitas peternakan (Hektar) Tahun 2019-2022

NO.	KAB. /KOTA	TAHUN				JUMLAH (Ha)
		2019	2020	2021	2022	
1	Samarinda	0.00	0.00	0.00	3.91	3.91
2	Balikpapan	0.00	0.00	0.00	7.82	7.82
3	Berau	0.00	4.00	21.25	35.17	60.42
4	Bontang	0.00	0.00	4.25	3.91	8.16
5	Kutai Barat	39.99	8.00	12.75	15.63	76.38
6	Kutai Kartanegara	0.00	12.00	21.25	50.81	84.06
7	Kutai Timur	79.99	0.00	17.00	19.54	116.53
8	Mahakam Ulu	0.00	8.00	0.00	7.82	15.82
9	Penajam Paser Utara	39.99	8.00	12.75	11.72	72.47
10	Paser	39.99	8.00	12.75	35.17	95.92
JUMLAH (unit)		199.97	48.00	102.00	191.50	541.47

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator penting dalam analisis ekonomi suatu wilayah atau Daerah, PDRB memiliki peran penting dalam analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan suatu daerah. Pengukuran PDRB subsektor peternakan diukur untuk digunakan sebagai ukuran dinamika aktifitas ekonomi pada subsektor peternakan, yang menjadi bagian pada sektor pertanian arti luas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya PDRB subsektor peternakan diantaranya adalah populasi ternak, jumlah Pemotongan ternak, pemasukkan dan pengeluaran ternak serta harga komoditas produk peternakan.

Tabel 17. PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
----	----------------	------	------	------	------	------

A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50,147.99	51,899.65	53,455.32	59,089.40	64,891.73
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	33,332.64	34,634.13	36,303.77	41,015.03	45,619.74
a	Tanaman Pangan	1,348.27	1,366.80	1,459.16	1,380.06	1,417.70
b	Tanaman Hortikultura	2,132.56	2,289.80	2,349.30	2,400.91	2,562.58
c	Tanaman Perkebunan	27,584.36	28,541.94	29,979.19	34,639.52	38,839.90
d	Peternakan	2,001.57	2,150.80	2,219.29	2,288.29	2,473.65
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	265.88	284.78	296.84	306.25	325.92
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	7,431.07	7,312.20	6,989.51	7,230.44	7,488.49
3	Perikanan	9,384.29	9,953.32	10,162.05	10,843.93	11,783.51

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka BPS, 2023

Kontribusi subsektor peternakan pada Tahun 2022 mengalami penurunan 18,18 persen dengan peningkatan nilai milyar rupiah sebesar 64.891,73 M. Kontribusi sektor peternakan terbesar ada di Tahun 2020 yaitu sebesar 0,37 persen sementara untuk kontribusi terendah ada di Tahun 2022 yang memberikan kontribusi sebesar 0,27 persen subsektor peternakan.

Sedangkan rata-rata kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (milyar rupiah) yang diberikan dari subsektor peternakan terhadap sektor pertanian sebesar 5,46 % tiap Tahun. Untuk kontribusi terbesar ada di Tahun 2022 yaitu sebesar 8,10%, sementara untuk kontribusi terendah ada di Tahun 2021 yang memberikan kontribusi sebesar 3,11%.

Tabel 18. Distribusi Presentase PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.95	8.8	8.48	7.04
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.31	5.97	5.89	4.95
a	Tanaman Pangan	0.21	0.24	0.2	0.15
b	Tanaman Hortikultura	0.35	0.39	0.34	0.28
c	Tanaman Perkebunan	4.37	4.93	4.97	4.22
d	Peternakan	0.33	0.37	0.33	0.27
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	0.04	0.05	0.04	0.04
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.12	1.15	1.04	0.81

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
3	Perikanan	1.53	1.67	1.56	1.28

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka BPS, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase. LPE subsektor peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu (1) Peningkatan produksi daging, susu, telur, atau produk lain yang dihasilkan dari peternakan, (2) Nilai tambah yaitu selisih antara nilai produksi dan biaya input, keuntungan peternak, upah pekerja, dan biaya operasional lainnya (3) Jumlah Ternak (populasi) (4) Tingkat investasi dalam infrastruktur peternakan, teknologi, dan peralatan (5) Pertumbuhan nilai ekspor produk peternakan.

Tabel 19. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur (persen) 2019-2022

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.78	-0.98	-0.08	1.96
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.23	-0.36	-0.98	1.97
a	Tanaman Pangan	-1.52	4.35	-4.48	-1.74
b	Tanaman Hortikultura	3.91	0.54	0.92	-0.45
c	Tanaman Perkebunan	5.92	-0.9	-1.13	2.44
d	Peternakan	3.8	1.5	0.66	1.94
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	3.77	0.63	-0.43	0.92
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-3.15	-6.28	-0.88	-0.86
3	Perikanan	4.35	0.68	3.32	3.68

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka BPS, 2023

Pencapaian Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2019-2023 dapat diuraikan berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 20. Capaian Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA (2019-2023)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS RENSTRA	TARGET PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kesejahteraan peternak	NTP Peternakan	104	104.5	102	103	104	110.94	101.65	104.27	108.04	110.20	106.67	97.27	102.23	104.89	105.96
	Meningkatnya produksi pangan asal hewan	Produksi Daging (Ton)	82,811.60	85,479.70	73,274.74	74,740.23	76,235.08	79,262.43	80,917.96	75,811.96	74,461.03	75,950.25	95.71	94.66	103.46	99.63	99.63
2		Produksi Telur (Ton)	11,786.10	12,058.60	14,148.65	14,290.14	14,433.04	11,083.30	11,386.32	13,181.14	14,834.64	15,131.33	94.04	94.42	93.16	103.81	104.84

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka penjelasan pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor Peternakan terhadap Ekonomi Daerah

PDRB merupakan indikator utama untuk pembentukan output dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Subsektor peternakan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian, sehingga subsektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kecukupan protein hewani yang mayoritas terdapat pada komoditas peternakan, seperti daging, telur, dan susu yang tidak dapat digantikan dan ketersediaannya sebagian masih bergantung kepada impor. Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap ekonomi daerah mencapai 0,37 pada Tahun 2023 merupakan angka tertinggi jika dibandingkan 5 Tahun sebelumnya, kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap ekonomi daerah paling rendah berada pada Tahun 2022 dengan nilai 0,28. Struktur PDRB sektor pertanian luas mencapai 8,77% dari total PDRB. Pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, harga, dan biaya. Peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas ternak bersinergi dengan peningkatan kontribusi PDRB sub sektor peternakan. Pada Tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

2. NTP (Nilai Tukar Petani)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwan NTP Peternakan Nilainya diatas 100, yang paling tinggi berada pada Tahun 2019 dengan nilai 110,94 dan yang terendah berada di Tahun 2020 yaitu 101,65. Jika NTP di atas

100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibanding biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTP di bawah 100 peternak mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga.

3. Produksi Daging

Pangan asal ternak sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani serta perubahan gaya hidup sebagai akibat arus globalisasi dan urbanisasi sehingga mengandalkan kepada pasokan impor, baik dalam bentuk sapi hidup atau daging.

Dari tabel.4 dapat dilihat trend produksi daging meningkat setiap Tahunnya. Produksi terendah berada di Tahun 2022 dengan jumlah produksi daging mencapai 74.461,03 Ton dan yang paling tinggi Tahun 2020 mencapai 80.917,96 Ton. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permintaan daging yang semakin meningkat setiap Tahunnya sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi disamping itu juga tumbuh dan berkembangnya perusahaan asing (perusahaan pertambangan) di Kalimantan Timur.

4. Produksi Telur

Dari tabel.4 dapat dilihat trend produksi telur mengalami fluktuatif, produksi telur terendah mencapai 11.083,3 Ton pada Tahun 2019 dan produksi telur tertinggi mencapai 14.834,64 Ton pada Tahun 2022. Pandemi covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga konsumsi kebutuhan protein beralih ke telur dengan harga yang lebih terjangkau.

Program-program yang menunjang keberhasilan dalam mencapai kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai Kinerja utama diatas dari Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

2.4.2 Evaluasi Capaian Program Tahun 2019-2020

1. Program Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tahun 2019-2020 berturut-turut yaitu 123,57 dan 102,98. NTUP mengalami penurunan karena perhitungan dasar Tahun mengalami perubahan untuk Tahun 2019 ke bawah menggunakan dasar tahu 2010=100, dan untuk Tahun 2020 ke atas menggunakan dasar Tahun 2018=100. Namun walaupun NTUP mengalami penurunan nilai NTUP masih di atas 100 artinya pendapatan yang diterima peternak lebih besar dari biaya usaha yang dikeluarkan untuk beternak. Indeks harga yang diterima petani sub sektor peternakan/peternak berasal dari empat komoditas, yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hasil ternak.

Mini ranch yang teregister merupakan indikator baru mulai Tahun 2019. Miniranch Tahun 2019 yang difasilitasi sebanyak 5 unit mini ranch, Tahun 2020 sebanyak 12 unit miniranch, Tahun 2021 sebanyak 24 unit mini ranch, Tahun 2022 sebanyak 49 unit mini ranch dan Tahun 2023 sebanyak 30 unit mini ranch. Sistem Miniranch mini-ranch akan lebih efektif dan efisien sebab peternak tidak perlu menyiapkan makanan dan proses pengembangbiakan sapi akan berjalan secara kawin alam, sehingga peternak lebih hemat dalam hal biaya dan tenaga.

2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan

Pada Tahun 2019, Angka kelahiran sapi terealisasi sebesar 17,49% dari target 20%, angka kelahiran sapi Tahun 2020 terealisasi sebesar 20,1% dari target 20%, angka kelahiran sapi Tahun 2021 terealisasi sebesar 19% dari target 20,5% dan angka kelahiran sapi Tahun 2022 terealisasi sebesar 21% dari target 21%. Tahun 2019, jumlah kelahiran sapi Tahun 2019 sebanyak 20.146 ekor, namun ada kematian ternak sebanyak 2.229 ekor (1,87%).

Pada Tahun 2019, Calving Interval (CI) terealisasi 19 bulan dari target 18 bulan, Tahun 2020 CI terealisasi 18 bulan dari target 18 bulan, Tahun 2021 CI terealisasi 17 bulan dari target 17 bulan dan Tahun 2022 CI terealisasi 17 bulan dari target 17 bulan. Maka dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 jarak beranak tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Waktu CI menggambarkan

kemampuan induk sapi menghasilkan pedet dalam suatu ukuran waktu. Faktor yang mempengaruhi jarak beranak adalah post partum estrus (PPE), post partum mating (PPM), dan S/C. Penyebab CI menjadi panjang karena terlambatnya kawin pasca melahirkan, kawin berulang dan kegagalan memelihara kebuntingan hingga lahir. Semakin lama PPE dan PPM serta tingginya nilai S/C maka jarak beranak akan semakin lama pula. Efisiensi reproduksi pada sapi dianggap baik apabila jarak antar kelahiran tidak melebihi 12 bulan atau 365 hari.

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Capaian program ini adalah Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana pada Tahun 2019 terealisasi 5 unit miniranch dari target 5 unit miniranch dengan capaian 100%, Tahun 2020 35 unit miniranch dari target 35 unit mini ranch. Kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana terdapat di 1).Kutai Kartanegara (kelompok banteng perjuangan, kampung muhur, kec.muara begai), 2).PPU (kelompok sumber rejeki, kel.saloloang, kec.penajam), 3).Paser (kelompok gawi bersama, desa saing prupuk, kec.batu engau), 4).Kutai Timur 2 (dua) kompartemen yaitu kelompok sumber mulyo (desa manunggal jaya, kec.rantau pulung) dan kelompok sumber rejeki (desa manunggal jaya, kec.rantau pulung).

4. Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet

Capaian program (outcome) ini adalah Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%) terealisasi sebesar 11% dari target 11% dengan capaian 100%. Dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, maka UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet sangat berperan dalam menunjang keberhasilan tujuan organisasi sehingga untuk meningkatkan produksi daging dan populasi di Kalimantan Timur diperlukan surveilans pemeriksaan penyakit hewan dan produk pangan asal hewan melalui pengambilan sampel penyakit hewan dan produk pangan asal ternak..

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan. Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah sampel penyakit asal hewan yang diuji dari Tahun 2019-2020 yaitu 8.520 dan 15.058 yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Sampel penyakit hewan aktif adalah sampel penyakit

hewan yang diambil berdasarkan ketersediaan anggaran sedangkan jumlah sampel penyakit hewan yang pasif adalah sampel penyakit hewan yang diambil sesuai permintaan konsumen. Sampel penyakit hewan terdiri dari serum darah sapi, darah sapi, serum darah ayam, feses sapi, ulas darah sapi, darah ayam, swab kloaka, cadaver anjing, dan serum darah anjing.

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah sampel produk asal hewan yang diuji dari Tahun 2019-2020 yaitu 2.185 dan 2.548 yang tersebar di 9 kabupaten/kota kecuali Mahakam hulu/. Sampel pangan asal hewan yaitu adonan, bakso, bintang laut, burger, daging ayam, daging bebek, daging kerbau, daging domba, daging sapi, daging babi, kikil, hati ayam, nugget, prime shank cut, sarang wallet, sosis, siomay, sempolan, dan usus ayam.

5. Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak

Capaian program (outcome) ini adalah persentase produksi bibit ternak berkualitas pada Tahun 2019 terealisasi 9,8% dari target 10% dan Tahun 2020 terealisasi 6,6% dari target 9,8%. Dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, maka UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan tujuan organisasi sehingga untuk meningkatkan populasi sapi di Kalimantan Timur.

2.4.3 Evaluasi Capaian Program Tahun 2021-2022

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini merupakan program prioritas indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Capaian program (outcome) ini adalah angka kelahiran sapi. Capaian pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Tahun 2021 yaitu 92,68% atau 19% setara 22.885 ekor dari target 20%. Sedangkan capaian program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian pada Tahun 2022 yaitu 100% atau 21% setara 25.294 ekor dari target 21%. Permasalahan yang di hadapi Tahun 2019:

- a. Terjadinya replanting kelapa sawit di wilayah Kab. Paser berdampak pada terjualnya sapi betina \pm 2.000 ekor ke wilayah kalsel, wilayah lokal Kalimantan Timur dan dipotong, sehingga angka kelahiran sapi

- menjadi lebih lama dari yang kawin alam \pm 1 Tahun menjadi IB \pm 1,5 Tahun
- b. Terjadinya kasus penyakit brucellosis di wilayah Kutai Kartanegara
 - c. Perubahan komposisi antara sapi jantan dan betina karena masuknya sapi pejantan untuk penggemukan
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program ini merupakan program prioritas indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Capaian program (outcome) ini adalah Jumlah mini ranch yang ter-register. Capaian pada program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yaitu 100% atau jumlah mini ranch yang ter-register sebanyak 24unit mini ranch dari target 24unit mini ranch. Sedangkan Capaian pada Tahun 2022 jumlah mini ranch yang ter-register sebanyak 49unit dari target 49unit mini ranch.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Capaian program (outcome) ini adalah Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular dan Peningkatan penerapan system jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV). Pada Tahun 2021 Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular mencapai 50% dari target 50% dengan capaian 100%. Untuk indikator yang kedua yaitu peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) terealisasi sebesar 12% dari target 12% atau capaiannya 100%.). Pada Tahun 2022 Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular mencapai 60% dari target 60% dengan capaian 100%. Untuk indikator yang kedua yaitu peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV) terealisasi sebesar 13% dari target 13% atau capaiannya 100%
4. Program Penyuluhan Pertanian
- Capaian program (outcome) ini adalah persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha. Pada Tahun 2021 adalah Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha mencapai 25% dari target 25% dengan capaian 100%. Pada Tahun 2022 adalah Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang

mempunyai izin usaha mencapai 50% dari target 50% dengan capaian 100%

5. Program Penyuluhan Pertanian

Capaian program (outcome) ini adalah Cakupan binaan kelompok ternak. Pada Tahun 2021 adalah Cakupan binaan kelompok ternak mencapai 43% dari target 43% dengan capaian 100%. Pada Tahun 2022 adalah Cakupan binaan kelompok ternak mencapai 44% dari target 44% dengan capaian 100%

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Dalam Juta Rupiah)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (Dalam Juta Rupiah)					PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TAHUN KE (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN TAHUN	REALISASI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim (Gabungan)	46,903	46,634	59,945	49,294	63,476	43,150	42,071	48,439	44,885	10,935	92.00	90.22	80.81	91.06	17.23	7.86	(29.05)
1	Belanja Tidak Langsung	13,880	14,990	-	-	-	12,911	12,687	-	-	-	- 93.02	84.64	-	-	-	7.99	(1.73)
	Belanja Langsung	33,023	31,645	59,945	49,294	63,476	30,239	29,384	48,439	44,885	10,935	91.57	92.86	80.81	91.06	17.23	17.75	(22.45)
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim (Provinsi)	36,191	39,723	49,233	43,217	54,501	33,562	35,616	40,253	39,047	8,755	92.74	89.66	81.76	90.35	16.06	10.78	(28.53)
2	Belanja Tidak Langsung	13,880	14,990	-	-	-	12,911	12,687	-	-	-	- 93.02	84.64	-	-	-	7.99	(1.73)
	Belanja Langsung	22,311	24,733	49,233	43,217	54,501	20,651	22,929	40,253	39,047	8,755	92.56	92.70	81.76	90.35	16.06	25.02	(19.31)
3	UPTD Laboratorium Keswan Dan Kesmavet	2,160	2,885	3,743	2,890	3,517	2,139	2,736	3,615	2,802	1,270	99.01	94.86	96.59	96.94	36.12	12.96	(12.21)
	Belanja Langsung	2,160	2,885	3,743	2,890	3,517	2,139	2,736	3,615	2,802	1,270	99.01	94.86	96.59	96.94	36.12	12.96	(12.21)
4	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	8,552	4,027	6,600	3,187	5,458	7,449	3,719	4,570	3,037	910	87.10	92.36	69.24	95.28	16.67	(10.62)	(40.88)
	Belanja Langsung	8,552	4,027	6,970	3,187	5,458	7,449	3,719	4,570	3,037	910	87.10	92.36	65.57	95.28	16.67	(10.62)	(50.38)

Keterangan: Realisasi 2023 per 30 April

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

2.5.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Memperhatikan kondisi pembangunan peternakan baik secara nasional maupun wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan hasil yang ingin dicapai hingga Tahun 2023, maka banyak tantangan yang dihadapi dan akan berpengaruh pada kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu 2024 – 2026.

1. Tantangan Internal

Tantangan internal merupakan faktor potensial yang ada di dalam intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang belum secara optimal diberdayakan dalam pembangunan peternakan.

a. Sumber Daya manusia

Dalam kurun waktu 2011-2022 tidak ada pengangkatan PNS baik teknis maupun Non Teknis sehingga tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PPBASN. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dinas teknis yang mempunyai tanggung jawab bidang teknis peternakan dan kesehatan hewan maka memerlukan tenaga teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga non teknis. Untuk itu, perlu pemberdayaan tenaga non teknis dengan melalui bimbingan teknis, pelatihan/magang teknis peternakan dan kesehatan hewan, sehingga memiliki dasar pemahaman tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

b. Prasarana dan sarana

Secara umum, prasarana dan sarana perkantoran sudah memadai namun untuk prasarana dan sarana pelayanan di lokasi khususnya padat ternak masih sangat minim seperti check point, pasar hewan, depo obat hewan dan alat mesin peternakan. Perkembangan informasi elektronik sangat pesat sehingga kecepatan, ketepatan dan keterbukaan semakin dituntut oleh masyarakat. Publikasi saat ini harus mengikuti perkembangan dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan media elektronik serta prasarana dan sarana elektronik seperti

website, baliho, leaflet, spanduk perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Peran serta masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya media publikasi tersebut di dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan.

c. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Keterkaitan/keterpaduan dan sinergisitas antar instansi/lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar keterpaduan program dan kegiatan peternakan berjalan efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam pengembangan kawasan peternakan yang berbasis komoditas ternak dapat terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan hasil dan lahan eks tambang.

d. Konsistensi penganggaran

Renstra yang telah disusun sudah memuat rencana penganggaran dalam satu periode lima Tahun namun dalam implementasinya tidak secara konsisten penggaran tersebut dipenuhi sehingga target kinerja tidak tercapai, hal ini sangat tergantung dengan kondisi keuangan daerah.

2. Tantangan Eksternal

- a. Sumber pembiayaan selain belanja APBD dan APBN seperti Kredit Program (KKPE, KUPS), CSR, Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan penjaminan usaha peternakan sapi melalui AUTS belum secara optimal dapat diakses oleh peternak. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memecahkan permasalahan permodalan khususnya agunan yang harus dimiliki oleh peternak maka telah dibentuk lembaga penjaminan. Namun belum semua peternak memahami adanya lembaga penjaminan sehingga ke depan perlu sosialisasi mengenai pola penjaminan, disamping itu sifat kehati-hatian pihak perbankan masih menjadi Persyaratan utama sehingga agunan tetap harus dipenuhi.
- b. Keterlibatan peran swasta terutama perusahaan sawit dan perusahaan tambang terhadap pengembangan usaha peternakan masih rendah, sehingga pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang

- komitmen perusahaan terhadap pengembangan peternakan sapi potong belum optimal
- c. Pemotongan betina produktif khususnya sapi/kerbau lokal masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi peternak karena yang seharusnya dapat memberikan keuntungan dengan bertambahnya populasi namun harus dipotong. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan tentang larangan Pemotongan betina produktif perlu ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
 - d. Semakin meningkatnya lalu lintas ternak maupun produk peternakan akan semakin besar ancaman penyakit hewan strategis yang berdampak tinggi pada ekonomi. Kewaspadaan terhadap penyakit harus ditingkatkan karena Kalimantan Timur bebas Brucellosis, anthrax, Penyakit mulut dan kuku
 - e. Pemanfaatan sumber daya pakan ternak yang tersedia belum optimal, maka perlu peningkatan dan pemahaman pengelolaan pakan secara baik dan benar dengan di dukung teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha peternakan rakyat.

2.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan asal ternak yang ASUH maka peluang usaha di bidang peternakan juga semakin meningkat, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

1. Meningkatnya Konsumsi Daging dan Telur

Konsumsi daging berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan, kesadaran gizi serta pola hidup sehat. Struktur konsumsi daging jika dilihat atas jenis daging yang dikonsumsi maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (dalam Ton)

No.	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	10,961.24	12,444.65	10,694.27	9,924.65	7,091.87
2	K e r b a u	1,360.47	1,667.58	2,391.48	3,346.89	61.18
3	Kuda	0.18	0.63	1.81	1.36	0.29
4	Kambing	745.89	693.59	826.10	877.53	783.33

No.	Jenis Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
5	Domba	8.32	11.07	36.25	15.32	5.19
6	Babi	1,400.94	1,803.70	1,830.40	2,302.49	2,348.23
7	Ayam Buras	4,798.66	4,592.02	4,657.96	4,720.67	4,815.08
8	Ayam Petelur	452.21	365.77	522.29	629.19	641.77
9	Ayam Pedaging	63,028.77	69,243.31	60,372.41	65,702.56	54,830.23
10	I t i k	392.71	499.28	644.86	115.38	104.43
11	Kelinci	6.32	3.95	4.82	4.21	4.30
12	Puyuh	6.76	6.19	7.48	8.92	9.05
13	Merpati	1.05	1.25	1.31	1.40	1.43
14	Itik Manila	26.87	26.89	33.12	40.24	41.04
Jumlah		83.190,37	91.359,87	82.024,57	87.690,81	70.737,42

Sumber: Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Pada Tahun 2018 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 10.961,24 Ton dibandingkan dengan Tahun 2017 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9.393,51 Ton. Apabila dibanding dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 16,68% dan di Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali mencapai 12.444,65 Ton atau sebesar 11,9%. Namun pada Tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi daging sapi menjadi 10.694,27 Ton atau penurunan sebesar 14,1% hal ini dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 mengakibatkan adanya pembatasan sosial yang berdampak pada sektor peternakan dan keterbatasan pasokan daging serta kenaikan harga yang cukup signifikan di beberapa daerah. Meskipun konsumsi daging mengalami penurunan pada Tahun 2020 hal ini kemungkinan bersifat sementara dan bisa kembali meningkat setelah pandemi berakhir dan perekonomian pulih kembali.

Berdasarkan data konsumsi daging pada tabel diatas dimulai Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan setiap Tahunnya, Struktur konsumsi daging terbesar pada 5 Tahun terakhir mencapai 69.243,31 Ton adalah ayam pedaging. Prestasi yang telah diraih bahwa seluruh kebutuhan konsumsi ayam pedaging broiler telah dipenuhi dari produksi lokal Kalimantan Timur.

Pemenuhan konsumsi daging dalam rangka pembangunan IKN

Peningkatan kebutuhan daging pada pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- (1) Melakukan analisis kebutuhan terhadap kebutuhan daging yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi penghitungan

terhadap jumlah penduduk yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara, pertumbuhan populasi yang diharapkan, preferensi konsumsi daging, serta kebutuhan daging untuk sektor-sektor tertentu seperti konstruksi dan tenaga kerja.

- (2) Peningkatan produksi dalam daerah (lokal Kalimantan Timur), yaitu dengan mendorong peningkatan produksi daging dalam daerah dari peternak-peternak lokal, termasuk peternakan sapi, kambing, domba, dan ayam, untuk meningkatkan jumlah ternak yang diproduksi. Peningkatan produksi dapat dicapai melalui program-program pengembangan peternakan, peningkatan teknologi peternakan, pemenuhan pakan berkualitas, dan pengelolaan kesehatan hewan yang baik.
- (3) Peningkatan produktifitas perlu juga dilakukan, hal ini dapat dicapai melalui seleksi genetik yang baik untuk menghasilkan ternak yang lebih produktif, penerapan teknologi pertanian yang modern, penggunaan pakan berkualitas tinggi, serta penerapan praktik pengelolaan yang efisien.
- (4) Kerjasama dengan peternak lokal menjadi penting dalam pemenuhan kebutuhan daging. Pemerintah dapat mendorong kemitraan dengan peternak lokal, memberikan bantuan teknis, dukungan pembiayaan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas peternak lokal dalam memproduksi daging yang berkualitas dan memenuhi standar kebutuhan.
- (5) Diversifikasi sumber protein selain daging, penting juga untuk mendorong diversifikasi sumber protein, termasuk sumber protein nabati, untuk mengurangi tekanan terhadap sektor peternakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pertanian vertikal, pengembangan tumbuhan protein alternatif, serta promosi pola makan yang seimbang.

Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan daging untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu diperhatikan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, peternak, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan pemenuhan kebutuhan.

Tabel 23. Proyeksi Kebutuhan Daging berbagai Jenis Komoditas (ton)

Komoditas	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2045
S a p i	7,091.87	7,304.63	7,636.99	7,866.10	8,102.08	14,207.04
K e r b a u	61.18	63.02	65.88	67.86	69.89	122.56
Kuda	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.58
Kambing	783.33	806.83	843.54	868.85	894.91	1,569.23
Domba	5.19	5.35	5.59	5.76	5.93	10.40
Babi	2,348.23	2,418.68	2,528.73	2,604.59	2,682.73	4,704.18
Ayam Buras	4,815.08	4,959.53	5,185.19	5,340.75	5,500.97	9,645.98
Ayam Petelur	641.77	661.02	691.10	711.83	733.19	1,285.65
Ayam Pedaging	54,830.23	56,475.14	59,044.76	60,816.10	62,640.58	109,840.64
I t i k	104.43	107.56	112.46	115.83	119.31	209.20
Kelinci	4.30	4.43	4.63	4.77	4.91	8.61
Puyuh	9.05	9.32	9.75	10.04	10.34	18.13
Merpati	1.43	1.47	1.54	1.59	1.63	2.86
Itik Manila	41.04	42.27	44.19	45.52	46.89	82.21
Total	70,737.42	72,859.54	76,174.65	78,459.89	80,813.69	141,707.29

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diolah

Tabel 24. Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018– 2022 (dalam Ton)

No	Jenis Telur	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ayam Buras	2,926.55	2,800.53	2,840.75	3,084.63	3,177.17
2	Ayam Petelur	8,137.38	6,581.97	9,398.44	9,435.03	9,718.08
3	I t i k	1,366.89	1,398.21	1,398.57	1,434.34	1,477.37
4	Puyuh	67.92	67.12	80.81	96.23	99.11
5	Itik Manila	235.25	235.47	290.00	352.34	362.91
	Jumlah	12,734.00	11,083.30	14,008.57	14,402.56	14,834.64

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

Struktur konsumsi telur pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 jumlah konsumsi telur mencapai 12.734,00 Ton. Pada Tahun 2019 konsumsi telur mengalami penurunan mencapai 11.083,30 Ton. Kemudian naik signifikan atau mencapai 14.834,64 Ton pada Tahun 2022.

Pemenuhan konsumsi telur dalam rangka pembangunan IKN

Telur merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi, kaya nutrisi, praktis, dan terjangkau. Kelebihan ini menjadikan telur sebagai komoditas peternakan yang penting dalam pemenuhan pangan dan memberikan kontribusi dalam menjaga kesehatan dan gizi masyarakat.

Telur menjadi pilihan komoditas peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka pembangunan IKN, diman telur memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. Sumber protein yang berkualitas
2. Nutrisi yang lengkap, Telur mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin (A, D, E, B12, riboflavin), mineral (zat besi, seng, selenium), asam lemak sehat, kolin, dan antioksidan.
3. Harga terjangkau,
4. Fleksibilitas dalam penggunaan, Telur dapat digunakan dalam berbagai cara dalam makanan dan masakan. Fleksibilitas ini memungkinkan variasi dalam pola makan dan memenuhi preferensi masyarakat.
5. Daya tahan yang baik (Daya simpan)
6. Sumber energi yang baik

Tabel 25. Proyeksi konsumsi Telur dalam rangka pembangunan IKN

Jenis Telur	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2045
Ayam Buras	1,588.59	1,636.25	1,710.70	1,788.53	1,869.91	4,354.90
Ayam Petelur	23,532.14	24,238.10	25,340.94	26,493.95	27,699.43	64,510.06
Itik	1,314.86	1,354.31	1,415.93	1,480.35	1,547.71	3,604.50
Puyuh	59.47	61.25	64.04	66.96	70.00	163.03
Itik Manila	322.99	332.68	347.82	363.64	380.19	885.43
Total	26,818.05	27,622.59	28,879.42	30,193.43	31,567.23	73,517.92

Sumber: Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diolah

2. Daya Tampung Ternak Masih Tinggi

Daya tampung ternak mengacu pada kapasitas produksi maksimal dari suatu kawasan atau peternakan. Pernyataan bahwa daya tampung ternak masih tinggi dapat diartikan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan populasi ternak pada suatu kawasan atau peternakan. Melalui Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) akan melakukan kajian untuk pengembangan sapi pada lahan bekas tambang sehingga Kalimantan Timur diharapkan menjadi salah satu lumbung sapi nasional. Populasi sapi potong yang dikembangkan pada lahan perkebunan sawit sampai sekarang diperkirakan sebanyak 31.955 ekor yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota sedangkan yang dipelihara/dikembangkan pada lahan bekas tambang sampai saat ini sekitar 6.839 ekor yang tersebar pada 7 Kabupaten/kota. Sehingga dari populasi sapi potong di lahan perkebunan sawit dan lahan ex tambang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya peternakan berbasis korporasi.

3. Data Perkembangan populasi ternak berdasarkan jenis,

Data populasi ternak mulai Tahun 2016-2020 tercatat kenaikan dengan rasio 1,54% untuk Sapi, 1,72% untuk Kambing, 12,93% untuk Domba, 10,76% untuk Kuda, 16,97% untuk ayam petelur, 1,96% untuk Itik, 14,49% untuk Iti Manila. Kerbau 2,26%, Ayam buras 2,08% dan Puyuh 9,91% disamping kenaikan ada beberapa jenis ternak yang mengalami penurunan seperti Babi sebesar -0,12%, Sapi Perah sebesar -8,24%, Kelinci sebesar -8,96%. Perkembangan populasi ternak bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 26. Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No.	Jenis Ternak	Existing Population				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	S a p i	117,504	119,485	119,974	121,290	108,613
2	Sapi Perah	110	91	87	76	68
3	Kerbau	6,157	6,194	6,552	6,539	6,490
4	Kambing	66,378	67,892	69,929	68,997	58,552
5	Domba	439	590	635	694	642
6	Babi	78,968	82,546	83,652	76,292	45,839
7	Kuda	97	102	95	143	95
8	Ayam Buras	4,569,169	4,372,415	4,435,205	4,815,976	5,183,873
9	Ayam Petelur	1,055,432	853,693	1,218,994	2,263,835	1,340,217
10	Ayam Pedaging	66,672,445	67,886,566	59,402,832	55,877,917	61,412,191
11	Itik	248,978	254,683	254,749	261,263	269,564
12	Kelinci	14,189	8,859	10,830	9,462	7,931
13	Puyuh	66,593	65,808	79,222	94,339	88,143
14	Merpati	4,027	4,776	5,015	5,375	5,678
15	Itik Manila	42,851	42,890	52,823	64,178	67,608

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

4. Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna

Perkembangan teknologi peternakan tepat guna di Provinsi Kalimantan Timur sangat baik. Teknologi peternakan tepat guna di Kalimantan Timur adalah Biogas. Pada Tahun 2018-2022 jumlah instalasi biogas yang dibangun dan dimanfaatkan masyarakat yaitu 77 unit. Selain itu telah tumbuh upgrade kandang tertutup dari kandang terbuka dalam budidaya ayam potong mencapai 45%.

5. Kontribusi peran dalam pengurangan kasus stunting

Peran peternakan dalam penanganan kasus stunting pada anak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa cara berikut:

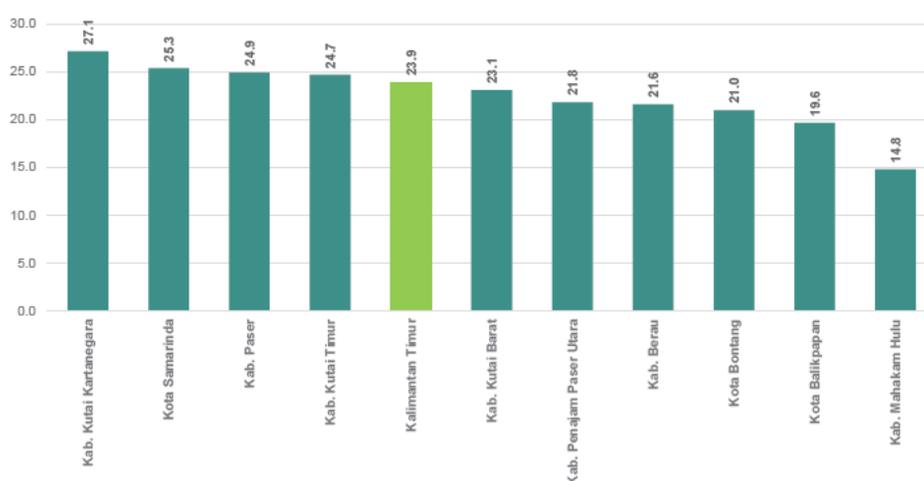
- a) *Sumber Protein Berkualitas*, Peternakan menyediakan sumber protein berkualitas tinggi seperti daging, susu, dan telur. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-

anak. Konsumsi protein yang cukup membantu memperbaiki status gizi anak yang mengalami stunting dan mendorong pertumbuhan linier yang optimal.

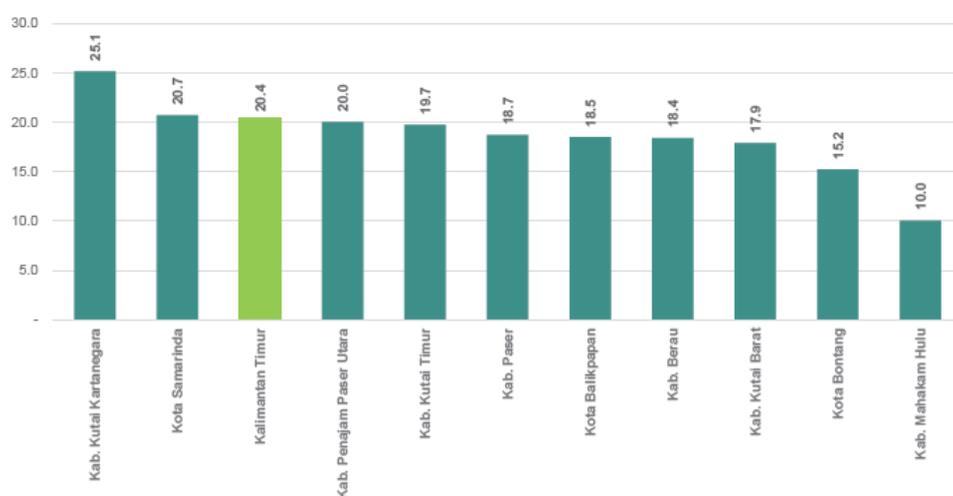
- b) *Asupan Zat Gizi Mikro*, Produk hewani seperti susu dan telur mengandung zat gizi mikro penting seperti zat besi, kalsium, vitamin B12, dan vitamin A. Kekurangan zat gizi mikro ini dapat menyebabkan stunting pada anak. Dengan memperoleh sumber makanan hewani yang kaya zat gizi mikro melalui peternakan, anak-anak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
- c) *Diversifikasi Pangan*, Peternakan dapat membantu dalam diversifikasi pangan, yaitu memperluas variasi makanan yang tersedia bagi anak-anak. Dengan memiliki peternakan yang beragam, seperti peternakan ayam, kambing, sapi, atau ikan, keluarga dapat mengonsumsi berbagai jenis makanan hewani yang memberikan nutrisi yang berbeda. Diversifikasi pangan penting untuk memastikan asupan gizi yang seimbang dan mengatasi kekurangan nutrisi yang mungkin menyebabkan stunting.
- d) *Ketersediaan Pangan Lokal*, Peternakan lokal dapat meningkatkan ketersediaan pangan hewani di wilayah tersebut. Ini akan mengurangi ketergantungan pada impor makanan hewani dan memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi keluarga dengan anggaran terbatas. Ketersediaan pangan lokal yang baik memungkinkan anak-anak untuk mengonsumsi makanan yang lebih segar dan berkualitas.
- e) *Edukasi dan Pengetahuan Gizi*, Peternakan dapat berperan sebagai agen pendidikan dan memberikan informasi tentang manfaat gizi dan pentingnya makanan hewani dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Peternak dapat memberikan edukasi tentang nutrisi yang baik, praktik peternakan yang sehat, serta pentingnya asupan gizi yang seimbang dalam mengatasi stunting. Dengan meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat, peternakan berkontribusi pada kesadaran akan penting.

Angka prevalensi kasus stunting di Kalimantan Timur Tahun 2022 sebanyak 23,9% dengan distribusi Kabupaten/Kota sebagaimana grafik berikut:

PREVALENSI BALITA *STUNTING* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR)
BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SSGI 2022



PREVALENSI BALITA *UNDERWEIGHT* (BERAT BADAN MENURUT UMUR)
BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SSGI 2022



Gambar 3. Grafik Prevalensi Balita Stunting Kalimantan Timur Tahun 2022

6. Kontribusi peran dalam pengurangan kemiskinan

Peran peternakan dalam penanganan kemiskinan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa cara berikut:

- a) *Peningkatan Pendapatan*, Peternakan dapat menjadi sumber pendapatan bagi keluarga yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil. Dengan memiliki peternakan yang berkelanjutan dan produktif, keluarga peternak dapat memperoleh pendapatan yang stabil dari penjualan produk hewani, seperti daging dan telur. Pendapatan ini dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrim dengan memberikan akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.

- b) *Pangan dan Keamanan Gizi*, Peternakan dapat menyediakan sumber makanan hewani yang penting untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Konsumsi protein dan zat gizi mikro yang cukup dari produk hewani membantu meningkatkan status gizi dan kesehatan keluarga. Selain itu, peternakan juga dapat membantu dalam diversifikasi pangan dengan menyediakan berbagai jenis makanan, yang membantu dalam mengatasi kekurangan nutrisi dan mencapai keamanan pangan yang lebih baik.
- c) *Pemberdayaan Ekonomi*, Peternakan dapat memberikan kesempatan pemberdayaan ekonomi kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Dengan melibatkan keluarga dalam kegiatan peternakan, mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola peternakan dengan efisien. Selain itu, melalui koperasi peternakan atau asosiasi peternak, keluarga dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas, memperoleh harga yang lebih baik, dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memasarkan produk peternakan.
- d) *Pemberdayaan Perempuan*, Peternakan dapat memberikan peluang pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Perempuan sering kali terlibat dalam kegiatan peternakan, seperti pemeliharaan ternak, produksi makanan, atau pengolahan produk hewani. Melalui keterlibatan aktif dalam peternakan, perempuan dapat meningkatkan kontribusi ekonomi mereka, memperoleh keahlian baru, dan memperkuat peran serta pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat.

2.6 Crosscutting Map

Dinas Peternakan dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidak dapat berperan sebagai *single fighter*, namun diperlukan koordinasi fungsi dengan perangkat dinas lain atau bisa disebut menjalankan fungsi "crosscutting" yang mempengaruhi berbagai sektor keberhasilan pembangunan peternakan. Mendorong dan mengedepankan kolaborasi dan koordinasi antara departemen atau bagian yang berbeda terkait pelaksanaan program kegiatan teknis/nonteknis peternakan.

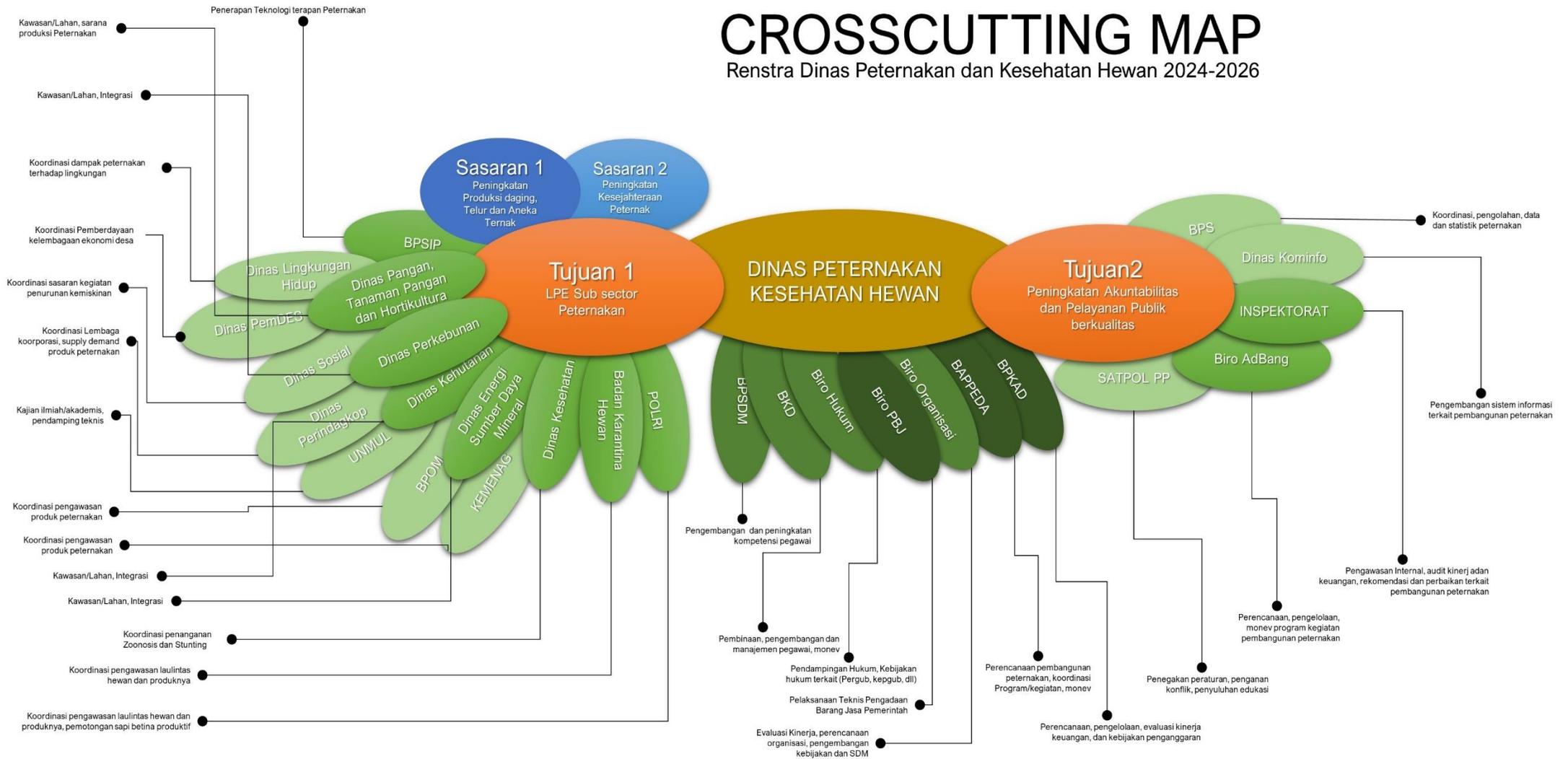
Crosscutting dalam dinas peternakan dan kesehatan hewan dapat berupa urusan terkait:

- i. Kesehatan Hewan: Kesehatan hewan melibatkan berbagai aspek, termasuk pemantauan penyakit hewan, vaksinasi, kebersihan, dan pengendalian penyakit. Ini melibatkan kerjasama antara departemen yang bertanggung jawab atas pemantauan kesehatan hewan, vaksinasi, pengobatan, serta praktisi hewan dan pemilik ternak.
- ii. Keamanan Pangan: Keamanan pangan melibatkan pengawasan dan pengendalian kualitas dan keamanan produk peternakan seperti daging, susu, dan telur. Ini melibatkan kerjasama antara departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan keamanan pangan, pemilik peternakan, dan pihak terkait dalam rantai pasokan pangan.
- iii. Kebijakan Pertanian: Dalam mengembangkan kebijakan pertanian, dinas peternakan perlu berkolaborasi dengan departemen pertanian, peneliti pertanian, dan organisasi petani untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan industri peternakan yang seimbang.
- iv. Pembangunan Pedesaan: Dinas peternakan juga terlibat dalam pembangunan pedesaan karena peternakan seringkali merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat pedesaan. Ini melibatkan koordinasi dengan dinas-dinas lain yang bertanggung jawab atas infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

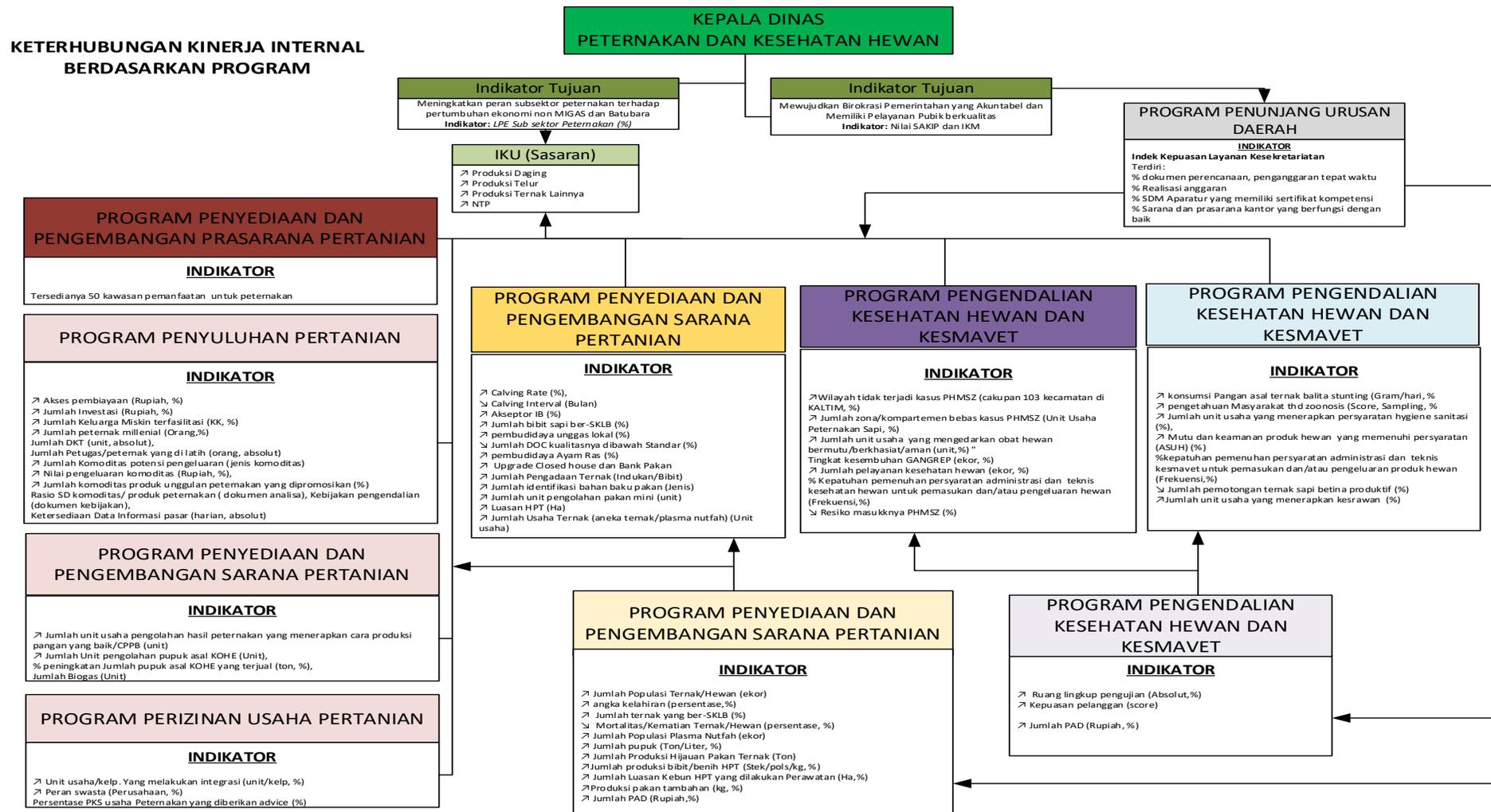
Dalam semua aspek ini, crosscutting menjadi penting untuk memastikan kerjasama dan sinergi antara departemen dan pihak terkait yang berbeda agar tujuan dan kebijakan peternakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien, peta fungsi crosscutting antar Perangkat Dinas dan Internal Dinas dapat dilihat pada gambar berikut.

CROSSCUTTING MAP

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2024-2026



Gambar 4. Crosscutting Map antar Perangkat Dinas



Gambar 5. Keterhubungan Kinerja Internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan kondisi pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan sasaran yang ingin dicapai dalam 3 (Tiga) Tahun ke depan, maka diperlukan suatu analisis terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja pembangunan peternakan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah “ *Belum Optimalnya peran sub sektor peternakan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat*”, sehingga akar masalah dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan ke depan dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Masalah Utama, Permasalahan dan Akar Masalah Pembangunan Peternakan di Provinsi Kalimantan Timur

Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
Belum Optimalnya peran sub sektor peternakan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	a. Populasi Dasar Tidak Mencukupi Kebutuhan , Produksi Dan Produktifitas Ternak Rendah	1.Reproduksi ternak belum optimal 2.Mutu Genetik ternak rendah 3.Ketersediaan Ternak Dasar (Sapi Betina Produktif) belum mencukupi 4.Penerapan GBP dan GFP belum optimal
	b. Efisiensi Produksi Rendah, Harga Pokok produksi Tinggi	1.Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal
	c. Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak Belum Memadai	1.Bahan baku pakan terbatas dan harganya mahal 2.Terbatasnya produksi pakan penguat lokal (konsentrat), dan masih dipasok dari luar daerah 3.Produksi Hijauan Pakan ternak rendah 4.Luas Lahan Hijauan Pakan Ternak terbatas
	d. Potensi Komoditas Ternak Lokal Belum Dimanfaatkan Secara Optimal	1.Potensi ternak lokal belum dimanfaatkan secara maksimal 2.Potensi produksi aneka ternak belum optimal 3.Minimnya komoditas unggulan peternakan
	e. Masih Adanya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	1.Masih terjadi kasus PHMS dan zoonosis 2.Belum adanya penerapan sertifikasi zona/kompartemen bebas kasus penyakit
	f. Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Pengawasan Mutu Obat Hewan Belum Optimal	1.Banyaknya peredaran obat hewan yang Mutu, khasiat dan keamanan tidak memadai 2.Banyaknya kasus Gangguan reproduksi pada sapi betina 3.Pelayanan kesehatan hewan belum optimal
	g. Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak Optimal	1.Belum tertibnya Lalu lintas Hewan/ Ternak yang masuk atau keluar wilayah Provinsi KALIMANTAN TIMUR 2.Belum adanya analisa Risiko Penyakit Hewan, terhadap hewan yang masuk ke wilayah KALIMANTAN TIMUR
	h. Layanan Laboratorium Keswan Dan Kesmavet	Lingkup dan pelayanan pengujian laboratorium belum memadai dengan situasi

Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
	Belum Sepenuhnya Memadai Untuk Kondisi Situasi Terkini	terkini (Penyakit hewan dan atau keamanan produk pangan asal hewan)
	i. Pemenuhan Konsumsi Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (Asuh) Belum Sepenuhnya Dipahami Secara Merata Di Masyarakat	1. Terjadi kasus stunting pada balita di Kalimantan Timur 2. Pemahaman Masyarakat tentang penyakit zoonosis masih rendah
	j. Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Asal Hewan Belum Optimal	1. Pengawasan keamanan pangan asal hewan belum optimal 2. Belum tertibnya laulintas produk asal hewan
	k. Pematangan Betina Produktif Dan Kesejahteraan Hewan Masih Terjadi Secara Sporadis Di Kalimantan Timur	1. Masih banyaknya Pematangan sapi betina, yang diindikasi masih produktif 2. Kasus kesejahteraan Hewan belum mendapatkan atensi/perhatian secara hukum
	l. Terbatasnya Kawasan Peternakan	1. Belum adanya penetapan kawasan peternakan di kabupaten/kota 2. Area budidaya ternak yang semakin terbatas
	m. Akses Pembiayaan Usaha Peternakan Oleh Masih Rendah	1. Usaha peternakan masih dianggap usaha "High Risk" sehingga sulit mendapatkan kepercayaan pembiayaan 2. Bunga Bank Tinggi masih berat untuk diakses usaha peternakan
	n. Keterlibatan Swasta Dalam Usaha Peternakan Masih Rendah	Minat usaha peternakan masih rendah, baik pengusaha maupun level masyarakat
	o. Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Peternakan masih rendah	1. Minimnya regenerasi peternak 2. Rendahnya kualitas SDM Peternak 3. Sering terjadi permasalahan sistem kemitraan 4. Tertinggalnya kelembagaan peternak dan jejaring bisnis
	p. Daya Saing Produk Peternakan Rendah dan Fluktuasi Harga Komoditas Picu Inflasi	1. Nilai tambah produk peternakan masih rendah 2. Kebutuhan pupuk asal KOHE meningkat, potensi Energi Baru Terbarukan belum optimal 3. Fluktuasi Harga komoditas peternakan akibat tidak seimbangnya supply Demand

Secara rinci permasalahan sub sektor peternakan diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 *Populasi Dasar Tidak Mencukupi Kebutuhan, Produksi Dan Produktifitas Ternak Rendah*

Dinamika pertumbuhan populasi komoditas peternakan di Kalimantan Timur sejak Tahun 2018 sampai dengan 2022 masih relatif rendah, dari 15 komoditas binaan sub sektor peternakan terdapat 8 komoditas dengan tren pertumbuhan positif, dan terdapat 7 komoditas mengalami tren penurunan. Permasalahan pada masing-masing komoditas bersifat spesifik dan perlu strategi yang spesifik dan fokus penyelesaian masalah pada komoditas tersebut.

Komoditas peternakan diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar yaitu komoditas Ruminansia, Komoditas Non Ruminansia (termasuk

didalamnya aneka ternak). Komoditas ruminansia diantaranya adalah Sapi potong, sapi perah, Kerbau, Kambing, dan domba sedangkan komoditas non ruminansia diantaranya adalah Ayam Potong, Ayam Petelur, Ayam Buras (kampung), Itik, Puyuh, Merpati, Kelinci, Kuda, Babi dan itik manila.

Pertumbuhan negatif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas ruminansia terutama pada ternak sapi potong, Sapi Perah dan kambing mengalami tren penurunan pada masing-masing -1,95%, -11,31% dan -3,09%, namun terdapat komoditas ternak ruminansia yang mengalami pertumbuhan positif yaitu domba dengan pertumbuhan 9,97%. Sedangkan pertumbuhan positif banyak dialami pada dinamika populasi komoditas non ruminansia ayam buras, ayam petelur, itik dan itik manila berturut-turut 3,21%, 6,15%, 2,01% dan 12,08%, namun juga terdapat penurunan pada komoditas ayam potong -2,03%.

Penurunan tren pertumbuhan komoditas ruminansia, terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti manajemen reproduksi ternak yang ada belum optimal, Mutu Genetik ternak rendah, Jumlah Ternak Dasar (Sapi Betina Produktif) sebagai pabrik produksi pedet belum mencukupi. Peternak belum sepenuhnya menerapkan Good Breeding Practice (GBP) dan Good Farming Practice (GFP) yang dijadikan acuan dalam usaha pembibitan, budidaya ternak dan tentunya penurunan tren komoditas ruminansia ini akibat terjadinya wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kalimantan Timur, peningkatan tren pada komoditas domba menunjukkan bahwa komoditas domba bersifat lebih adaptif pakan dan penyakit, sehingga banyak diminati oleh peternak, pertumbuhan populasi dengan berbagai komoditas di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel.2.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah Pematangan per Tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap Tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi Tahun 2022 sebanyak 108,613 ekor sehingga masih perlu penambahan 322,415 ekor. Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat digambarkan dengan indikator sebagai berikut :

- a. Bobot lahir rata-rata Kurang dari 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg

- b. Rata-rata berat hidup sapi (Non BX) yang dipotong 242,15 kg sedangkan rata-rata berat potong sapi Brahman 292,50kg pada Tahun 2021 (BPS-RI, 2021).
- c. Angka Kelahiran dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 15,91%, Kerbau 28.84%, Kambing 21,02%. (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017)
- d. Angka Kematian dari total populasi pada Tahun 2017 berturut-turut Sapi 2,41%, Kerbau 7,27% dan Kambing 7,66% (BPS-RI, Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan 2017, 2017)
- e. Calving interval rata-rata 19,6 bulan
- a. Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir sapi Bali hingga mencapai 25 kg dan Sapi silangan mencapai 35Kg, untuk bobot potong sapi Minimal 400 kg dan calving interval rata-rata 16-17 bulan.

Peningkatan tren komoditas non ruminasia terjadi akibat prospek usaha komoditas ini secara umum menguntungkan, namun secara manajemen usaha/bisnis perlu adanya dorongan/interfensi dalam bentuk upaya peningkatan usaha, pengolahan produk, pembiayaan dan pemasaran.

3.1.2 Penerapan Teknologi Peternakan Belum Optimal

Introduksi teknologi maupun inovasi dalam bidang peternakan harus terus diupayakan untuk disosialisasikan kepada para petani dan peternak. Berbagai informasi teknologi dan inovasi terbaru yang telah dikembangkan hendaknya dapat diterapkan pada mitra (petani dan peternak) secara penuh dan berkelanjutan. Penerapan teknologi yang tepat dapat menjawab masalah Harga pokok Produksi (HPP) ternak di Kalimantan Timur. Meningkatnya Harga Pokok Produksi Ayam Pedaging Tahun 2012 hanya 13.500 /kg sedangkan Tahun 2022 menjadi 23.500 /kg atau naik 74%. (PINSAR, 2022) menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan daya saing produk peternakan di Kalimantan Timur.

Teknologi yang diterapkan untuk menekan HPP dapat berupa penerapan penggunaan kandang tertutup (Closed House System), Inovasi penggunaan bahan pakan baru seperti maggot, penggunaan pakan fermentasi dan teknologi Bank Pakan. Budidaya ayam padaging dan ayam petelur dipelihara menggunakan kandang sistem open house

dan closed house, saat ini di teknologi pemeliharaan dengan kandang closed house di Kalimantan Timur sebanyak 45%, sehingga perlu didorong untuk peningkatan penerapan teknologi pada sistem budidaya pada level peternak.

3.1.3 Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak Belum Memadai

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

Produksi hijauan pakan ternak Tahun 2021 mencapai 36.400 Ton dengan luas kebun HPT 1.367Ha, dengan Produktifitas produksi hijauan mencapai 26,6 Ton/Ha/Tahun. Produktivitas hijauan ini akan meningkat jika dilakukan pemeliharaan/manajemen perawatan HPT yang baik, pemupukan yang baik dan dengan bibit HPT yang berkualitas. Potensi produktivitas rumput gajah dapat mencapai 200-300 Ton/ha/Tahun.

Terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam pengembangan pakan ternak, diantaranya adalah:

1. Variabilitas musim di Kalimantan Timur yang memiliki iklim tropis cenderung mempengaruhi produksi hijauan pakan ternak. Variabilitas musim, termasuk periode kekeringan dan musim hujan yang ekstrem, dapat mempengaruhi ketersediaan hijauan pakan dan kualitasnya.
2. Pemilihan varietas dan spesies hijauan pakan yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah Kalimantan Timur menjadi penting, sehingga perlu adanya penelitian dan pengembangan varietas hijauan yang tahan terhadap kondisi lingkungan setempat serta memberikan nilai gizi yang baik untuk ternak.
3. Penerapan teknik budidaya hijauan pakan yang tepat menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hijauan.

Di Kalimantan Timur, penggunaan teknologi pertanian yang modern, seperti sistem pengairan, pemupukan yang tepat, dan manajemen gulma yang baik, dapat membantu mengatasi permasalahan ini.

3.1.4 Potensi Komoditas Ternak Lokal Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

Permasalahan potensi komoditas ternak lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kalimantan Timur menjadi persoalan yang perlu ditangani. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain:

1. Kurangnya perhatian pemerintah. Pemerintah belum memberikan perhatian yang optimal terhadap pengembangan potensi ternak lokal di Indonesia. Sehingga, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Kurangnya akses pasar. Beberapa komoditas ternak lokal belum memiliki akses pasar yang luas sehingga peternak tidak memiliki insentif yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya.
3. Keterbatasan teknologi dan informasi. Peternak seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak lokal yang mereka miliki.
4. Tidak adanya dukungan keuangan. Peternak kecil dan menengah seringkali kesulitan untuk mendapatkan dukungan keuangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan bisnisnya.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat. Konsumen belum sepenuhnya menyadari potensi dan nilai dari komoditas ternak lokal sehingga masih lebih memilih komoditas ternak impor.

Kalimantan Timur memiliki potensi ternak lokal seperti Kerbau Kalimantan Timur (Kerbau kalang), Rusa Sambar, Ayam Nunukan dan Aneka Ternak, yang belum di manfaatkan dan di eksplorasi secara maksimal agar dapat menjadi usaha peternakan yang menguntungkan. Aneka ternak yang juga menjadi potensi adalah budidaya Burung Walet, Kelinci dan Lebah Kelulut. Setiap jenis ternak tersebut memiliki

keunggulan dan layak untuk dikembangkan dalam mendukung diversifikasi usaha peternakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3.1.5 Masih Adanya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)

Kesehatan hewan masih menjadi perhatian khusus untuk 3 Tahun kedepan, penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) harus terus diupayakan secara masif, agar Kalimantan Timur segera bebas dari wabah tersebut. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan.

Kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau dan antar wilayah juga harus dikendalikan melalui sistem lalulintas ternak yang efektif.

Beberapa penyakit hewan menular strategis yang menjadi permasalahan di Kalimantan Timur meliputi:

- a. Penyakit Mulut dan Kuku (FMD): Penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar pada peternakan sapi dan kerbau karena dapat menyebabkan kematian atau menurunkan produktivitas ternak.
- b. Penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi,
- c. Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang kejadiannya masih cukup tinggi seperti BVD, IBR, Pullorum, Jembrana, brucellosis
- d. Newcastle Disease (ND): Penyakit ini menyerang unggas, terutama ayam, dan dapat menyebabkan kematian yang signifikan, berdampak pada industri peternakan ayam di Kalimantan Timur.

Zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Beberapa zoonosis yang menjadi permasalahan di Kalimantan Timur adalah:

- a. Leptospirosis: Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Leptospira* yang dapat ditularkan melalui air atau tanah yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi. Infeksi manusia dapat menyebabkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan gangguan ginjal.

- b. Rabies: Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies yang ditularkan melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Rabies merupakan penyakit yang fatal dan dapat menular ke manusia jika tidak ditangani dengan baik.
- c. Avian Influenza (AI): Penyakit ini juga dikenal sebagai flu burung dan disebabkan oleh virus influenza tipe A. Infeksi manusia dapat terjadi melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi dan dapat menyebabkan penyakit parah atau bahkan kematian.

Keterbatasan tenaga medis/ paramedik, dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut, penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis di Kalimantan Timur memerlukan kerjasama antara pemerintah, peternak, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Upaya-upaya yang perlu dilakukan meliputi pengawasan penyakit yang ketat, vaksinasi hewan yang tepat, pemantauan kesehatan hewan yang baik, edukasi tentang pencegahan penyakit, serta peningkatan kapasitas petugas kesehatan hewan dan tenaga medis. Pemerintah daerah juga dapat mendorong program-program penanggulangan dan pengendalian penyakit serta memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif.

3.1.6 Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Pengawasan Mutu Obat Hewan Belum Optimal

Ancaman terhadap kejadian kasus penyakit hewan juga disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal. Masih banyak terjadi kasus penolakan sampel obat hewan yang akan diperiksa disebabkan oleh komposisi dan klasifikasi obat hewan tidak sesuai yang didaftarkan, serta nomor registrasi sudah kadaluarsa.

Pelayanan kesehatan hewan masih kurang optimal hal ini disebabkan karena sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana sangat terbatas. Sumber daya meliputi tenaga medik dan paramedik, fasilitas seperti peralatan dan obat-obatan serta sarana dan prasarana klinik hewan milik pemerintah maupun swasta belum ada di setiap kecamatan.

3.1.7 Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak Optimal

Lalu lintas hewan ke Kalimantan Timur melalui darat, laut dan udara dengan frekuensi yang sangat tinggi menyebabkan masuknya

penyakit hewan dari luar sehingga Kalimantan Timur menjadi daerah terancam kasus penyakit hewan menular. Jalur keluar masuknya hewan melalui laut dan udara, pengawasannya menjadi tanggung jawab Karantina Pertanian, sedangkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan prov. Kalimantan Timur hanya berwenang mengeluarkan surat pertimbangan teknis kesehatan hewan, namun masih banyak klien yang belum tertib administrasi untuk mendapatkan surat izin pemasukan/pengeluaran hewan. Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi dengan Karantina Pertanian Balikpapan, Samarinda dan Karantina Daerah asal ternak. Lalu lintas Hewan dan Produk ternak melalui darat menjadi tanggung jawab DPKH namun sarana prasarana untuk pengawasan peredaran hewan dan produk ternak masih sangat kurang, yaitu check point hanya ada 1 (satu) unit di Kec. Muara Komam sebagai unit pelaksana pengawasan untuk lalu lintas hewan dari Kalimantan Selatan sedangkan wilayah perbatasan dengan Kalimantan utara, Kalimantan tengah, belum tersedia check point. Kegiatan penguatan check point di perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus baik SDM teknis, Sarana prasarana dan penguatan sistem.

3.1.8 Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Belum Sepenuhnya Memadai Untuk Kondisi Situasi Terkini

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan kualitas hasil peternakan baik yang bersifat zoonosis dan non zoonosis yang ada di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemampuan Analisa hasil uji laboratorium dapat dilihat dari berbagai metode pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di laboratorium, dengan tingkat ketelitian masing-masing pengujian dan sesuai dengan permintaan customer.

Kondisi perkembangan kasus kejadian penyakit hewan saat ini begitu pesat, Seperti contoh Penyakit Penyakit Mulut dan Kuku dan *Lumpy Skin Diseases* (LSD), kedua penyakit ini sangat merugikan secara ekonomi sehingga dalam menentukan uji penyakit ini harus secara cepat dan akurat, sehingga segera dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan prosedur tetap. Dengan kondisi tersebut maka perlu peningkatan pelayanan dalam hal penambahan ruang lingkup uji

maupun pengembangan sistem/metode pengujian sehingga deteksi penyakit akan lebih cepat dan akurat.

3.1.9 Pemenuhan Konsumsi Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (Asuh) Belum Sepenuhnya Dipahami Secara Merata Di Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan keamanan pangan asal hewan meningkat saat masa pandemic Covid-19, mulai dari daging dan telur ayam, daging sapi yang termasuk ke dalam pangan asal hewan. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019, pangan asal hewan berpotensi dapat membahayakan manusia dan kemungkinan terkontaminasi cemaran biologis, kimia, dan zat yang membahayakan sangat tinggi.

Kesadaran tentang pentingnya kebutuhan protein hewani juga perlu didorong untuk pemenuhan kebutuhan gizi pada anak/balita kasus stunting. Stunting memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depan balita. Adapun dampak jangka pendeknya yaitu meningkatnya angka kesakitan dan kematian, dan adanya risiko bagi balita stunting menderita berbagai penyakit infeksi. Sementara dampak jangka panjangnya yaitu menurunnya kemampuan kognitif, dan rendahnya Intelligence Quotion (IQ) dan kapasitas fisik.

Kementrian Kesehatan menyatakan ”bahwa protein hewani adalah instrumen gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil guna mencegah stunting pada anak”, (<https://promkes.kemkes.go.id/protein-hewani-cegah-stunting>), kontribusi sub sektor peternakan sangat diperlukan dalam penanganan kasus stunting, selain itu dilakukan untuk upaya mewujudkan keamanan pangan di Kalimantan Timur adalah dengan menerapkan pola pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, halal), yaitu pangan yang bebas dari kontaminasi berbahaya (kontaminasi fisik, kimia atau biologis), memiliki nilai gizi yang tinggi, tidak tercampur bahan lain, dan diolah berdasarkan syariat Islam sehingga halal untuk dikonsumsi.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan ASUH adalah:

1. Kurangnya edukasi dan informasi. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan edukasi dan informasi yang memadai tentang konsumsi pangan ASUH. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan program

- edukasi dan informasi tentang keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi dari sumber hewan.
2. Mitos dan kepercayaan yang salah. Beberapa masyarakat masih memiliki mitos atau kepercayaan yang salah tentang cara memilih dan mempersiapkan pangan asal hewan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memperhatikan kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi.
 3. Keterbatasan akses. Di beberapa daerah, akses terhadap pangan ASUH yang berkualitas masih terbatas. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, keterbatasan distribusi, atau faktor ekonomi.

3.1.10 Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Asal Hewan Belum Optimal

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara Kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional.

Hasil uji penyakit hewan untuk penyakit zoonosis seperti brucellosis, pullorum dan avian influenza terdapat hasil positif, perlu adanya penyidikan dan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait pada wilayah atau daerah yang terinfeksi penyakit-penyakit tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Masih ditemukannya cemaran mikroba dengan jumlah mikroba diatas nilai ambang batas untuk uji kualitas hasil peternakan pada pengujian TPC, Salmonella, E. Coli, Colliform dan TPC dan masih ditemukannya pemalsuan daging sapi dengan daging babi. Perlu adanya upaya sosialisasi dan pembinaan tentang penanganan PAH pada produsen oleh instansi terkait di wilayah Kab./Kota yang ada di Provinsi

Kalimantan Timur. Surveillance pangan asal ternak terhadap cemaran mikroba, Bahan kimia dan spesies babi Tahun 2022 berturut-turut 57,23% dengan jumlah 636 sampel, 3% dengan jumlah 933 sampel, dan 1,23% dengan jumlah 486 sampel. Kondisi ini menunjukkan bahwa pangan asal ternak perlu mendapatkan perhatian dalam keamanannya.

3.1.11 Pemotongan Betina Produktif Dan Kesejahteraan Hewan Masih Terjadi Secara Sporadis Di Kalimantan Timur

Sapi Betina Produktif merupakan sapi betina yang dinyatakan normal organ reproduksi/ peranakan yang dinyatakan oleh dokter hewan atau petugas peternakan. Sesuai dengan Dasar Hukum Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (2) bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Akibat Pemotongan sapi Betina produktif adalah terhentinya aktifitas produksi pedet (anak sapi) untuk regenerasi selanjutnya, Pemotongan sapi betina produkif mengakibatkan penurunan populasi secara signifikan. Pemotongan sapi betina di Kalimantan Timur termasuk relatif tinggi, walaupun masih perlu di konfirmasi apakah sapi tersebut sudah tidak produktif atau masih produktif.

Tingginya Pemotongan sapi betina ini perlu dilakukan verifikasi bahwa sapi tersebut sudah tidak produktif, dan dicarikan solusi atas ketersediaan stok sapi tersebut. Jika larangan Pemotongan ternak betina produktif tetap dilanggar maka ada sangsi hukumnya dan ini berlaku pula untuk Pemotongan ternak ruminansia kecil dengan ketentuan Pidana pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 pasal 86.

3.1.12 Terbatasnya Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Di Kalimantan Timur, masih terdapat permasalahan terkait alokasi kawasan peternakan yang

memadai. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya alokasi kawasan peternakan di Kalimantan Timur adalah:

1. Kurangnya dukungan pemerintah Kota/Kabupaten. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika tidak ada dukungan yang cukup dari pemerintah Kota/Kabupaten, maka alokasi kawasan peternakan akan terbatas.
2. Keterbatasan lahan yang tersedia. Di Kalimantan Timur, lahan menjadi faktor pembatas dalam alokasi kawasan peternakan yang memadai. Jika lahan tidak cukup, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam alokasi kawasan peternakan. Jika masyarakat tidak memahami pentingnya kawasan peternakan yang memadai, maka sulit untuk mengalokasikan kawasan peternakan yang optimal. Pengembangan Kawasan peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menciptakan wilayah komoditas. Pengembangan Kawasan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal padahal potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur cukup mendukung diantaranya tersedianya lahan eks tambang, adanya perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan sapi, dan adanya kebijakan menggunakan perhutanan social untuk masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih besar dalam alokasi kawasan peternakan, termasuk dukungan dana dan infrastruktur.
2. Memprioritaskan kawasan peternakan yang strategis. Dalam alokasi kawasan peternakan, penting untuk memprioritaskan kawasan yang strategis untuk mengoptimalkan produksi hewan ternak.
3. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kawasan peternakan yang memadai. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kawasan peternakan yang memadai,

diharapkan dapat mempercepat alokasi kawasan peternakan yang optimal di Kalimantan Timur.

4. Mengoptimalkan penggunaan lahan yang tersedia. Pemanfaatan lahan yang tepat dan optimal dapat membantu memperluas alokasi kawasan peternakan yang tersedia.
5. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan peternakan. Kerja sama yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat akan membantu meningkatkan alokasi kawasan peternakan yang memadai di Kalimantan Timur.

3.1.13 Akses Pembiayaan Usaha Peternakan Oleh Masih Rendah

Akses pembiayaan untuk usaha peternakan sering menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan akses pembiayaan dalam usaha peternakan antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan tentang produk pembiayaan. Banyak peternak yang tidak mengetahui produk pembiayaan yang tersedia untuk usaha peternakan sehingga sulit untuk memperoleh pembiayaan.
2. Ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Persyaratan yang ketat dari lembaga pembiayaan seringkali sulit dipenuhi oleh para peternak, terutama bagi peternak yang baru memulai usahanya.
3. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan biasanya meminta jaminan dalam bentuk aset yang cukup besar, dan hal ini seringkali menjadi kendala bagi peternak yang belum memiliki aset yang cukup besar.

3.1.14 Keterlibatan Swasta Dalam Usaha Peternakan Masih Rendah

Keterlibatan swasta dalam pembangunan peternakan di Kalimantan Timur menjadi permasalahan yang masih perlu diperhatikan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan swasta antara lain:

1. Kurangnya insentif dari pemerintah untuk menarik investasi swasta. Pemerintah perlu memberikan insentif yang cukup menarik bagi investor swasta untuk berinvestasi di sektor peternakan.
2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan layanan pendukung di daerah tersebut. Infrastruktur yang buruk dan kurangnya layanan pendukung, seperti listrik, air, dan jalan yang baik, seringkali menjadi kendala bagi para investor swasta.
3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di Kalimantan Timur. Tanpa adanya data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di daerah tersebut, para investor swasta cenderung enggan untuk berinvestasi.

Perusahaan peternakan swasta di Kalimantan Timur masih sedikit dan didominasi oleh perusahaan ayam pedaging. Perusahaan swasta yang menggeluti usaha ayam pedaging dalam jumlah besar baru 7 perusahaan, selebihnya yaitu perusahaan skala menengah dan kemitraan. Sedangkan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam skala besar baru terdapat 1 unit di Kab. PPU. Peran swasta yang masih rendah ini dikarenakan tingginya biaya investasi peternakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk peternakan rakyat kesulitan mendapat modal untuk usaha dibidang peternakan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah:

1. Memberikan insentif yang cukup menarik bagi investor swasta. Pemerintah dapat memberikan insentif yang cukup menarik bagi investor swasta, seperti pembebasan pajak, keringanan biaya lahan, dan sebagainya.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan pendukung di daerah tersebut. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan pendukung, seperti memperbaiki jalan, menambah kapasitas listrik dan air, serta meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan di daerah tersebut.
3. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di Kalimantan Timur. Pemerintah dapat menyediakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang potensi peternakan di daerah tersebut, seperti data tentang populasi ternak, ketersediaan pakan ternak, dan sebagainya, yang dapat

digunakan oleh para investor swasta dalam membuat keputusan investasi.

4. Membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta. Dengan membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor swasta untuk berinvestasi di sektor peternakan di Kalimantan Timur.
5. Mengembangkan program pelatihan dan pendampingan untuk peternak lokal. Pemerintah dan swasta dapat mengembangkan program pelatihan dan pendampingan untuk peternak lokal agar mereka dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha ternaknya, sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor swasta.

3.1.15 Kapasitas SDM Dan Kelembagaan Peternakan masih rendah

Masalah kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan yang masih rendah merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan sektor peternakan di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan antara lain:

1. *Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai.* Pelatihan dan pendidikan yang memadai sangat penting dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan. Namun, kurangnya fasilitas dan program pelatihan dan pendidikan yang memadai juga menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.
2. *Rendahnya kualitas kemampuan manajemen peternakan.* Masalah manajemen peternakan yang buruk dapat menghambat perkembangan peternakan dan menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.
3. *Kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai.* Dukungan kelembagaan yang memadai, seperti asosiasi peternak atau kelompok tani, dan regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk mendukung pengembangan peternakan. Namun, kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang memadai dapat menghambat perkembangan peternakan dan mengurangi kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan.

Penurunan jumlah RTUP pada beberapa komoditas ternak menunjukkan bahwa terdapat penurunan minat usaha terhadap komoditas tersebut dengan berbagai alasan diantaranya adalah minat generasi peternak terhadap usaha peternakan yang turun, kasus penyakit hewan, kelayakan usaha dan permasalahan terbatasnya lahan usaha untuk peternakan.

3.1.16 Daya Saing Produk Peternakan Rendah dan Fluktuasi Harga Komoditas Picu Inflasi

Potensi basis komoditas dan produk peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar lokal. Daya saing produk peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik lokal maupun nasional. Provinsi Kalimantan Timur untuk usaha hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah dan manajemen pemasaran produk peternakan masih kurang.

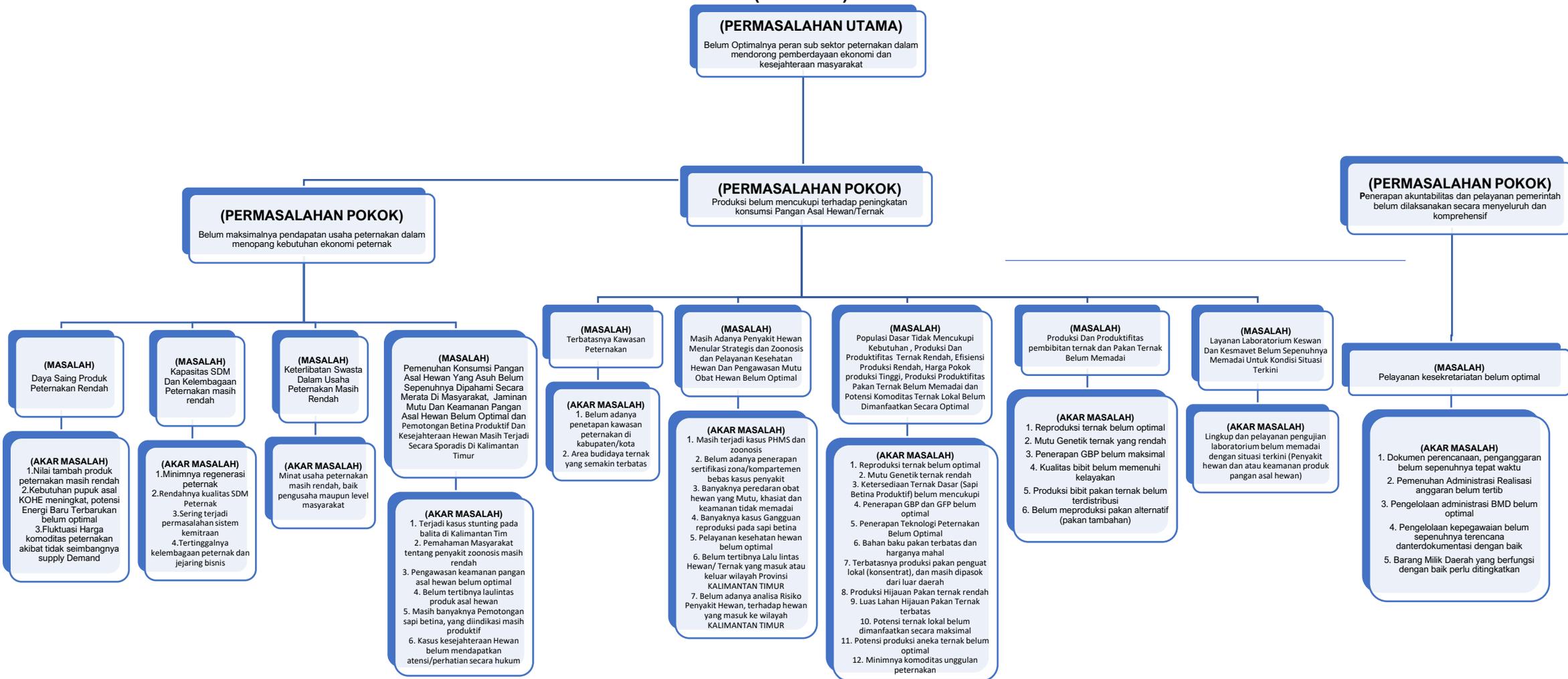
Masalah fluktuasi harga komoditas ayam potong yang dapat memicu inflasi merupakan permasalahan yang cukup signifikan di Indonesia, mengingat konsumsi ayam potong cukup tinggi di masyarakat Kalimantan Timur yaitu 79% dari total konsumsi daging. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga komoditas ayam potong antara lain:

1. *Faktor musim dan cuaca.* Harga ayam potong dipengaruhi oleh faktor musiman dan cuaca, seperti peningkatan permintaan pada saat perayaan hari besar atau cuaca buruk yang mengganggu produksi peternakan ayam.
2. *Kenaikan harga pakan ternak.* Harga pakan ternak yang tinggi dapat membuat biaya produksi peternakan ayam meningkat dan berdampak pada kenaikan harga ayam potong.
3. *Kondisi kesehatan ternak.* Jika ada wabah penyakit ternak atau kondisi kesehatan ternak yang buruk, produksi ayam potong bisa menurun dan harga ayam potong bisa naik.
4. *Ketergantungan terhadap impor.* Indonesia masih mengimpor ayam potong dalam jumlah yang cukup besar. Jika terjadi kenaikan harga ayam potong di pasar internasional, maka harga ayam potong di dalam negeri juga bisa naik.

Untuk mengetahui secara mendalam dan detail maka diperlukan informasi Supply demand yang memadai akurat dan terpercaya, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat. Kolaborasi antar perangkat Dinas terkait pengendalian inflasi dan kenaikan harga sangat diperlukan, dengan lebih mendalam memahami kondisi stok barang, produksi lokal, pemasukkan dari luar daerah dan rantai distribusi yang menyebabkan dan faktor kenaikan harga.

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi, untuk kemudian diklasifikasikan dan dianalisa dengan menggunakan sistem "pohon masalah", dengan metode analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan akar permasalahan yang dihadapi dalam suatu konteks atau situasi. Metode ini sangat membantu dalam pemahaman mendalam tentang masalah yang ada serta membantu merumuskan solusi yang tepat. Pohon masalah ini lazim untuk perencanaan program atau proyek, kebijakan publik, dan pengembangan strategi, pohon masalah dapat dilihat pada gambar berikut:

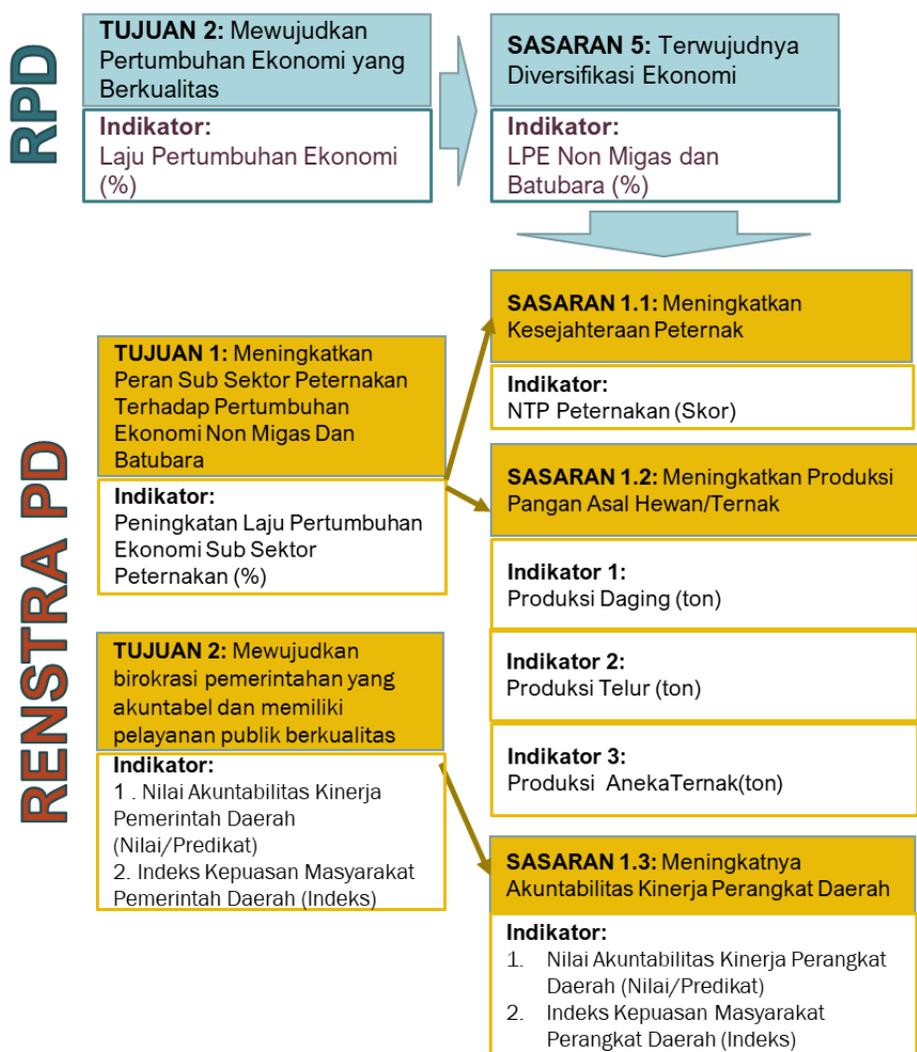
POHON MASALAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Panduan)



Gambar 6. Pohon Masalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari misi RPJPD 2005-2025, agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, keterkaitan dan keselarasan rencana strategis Dinas Peternakan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Keterkaitan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, dalam Rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan tentunya terdapat hal-hal yang mendorong dan menghambat, faktor pendorong dan penghambat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Telaahan RPD Provinsi Kalimantan Timur dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

RPD	Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.</p> <p>Sasaran 5 : Terwujudnya diversifikasi ekonomi</p>	<p>a. Populasi dan produktivitas ternak masih rendah</p> <p>b. Produksi dan produktivitas Hijauan Pakan Ternak masih rendah</p> <p>c. Pengembangan Kawasan Peternakan belum optimal</p> <p>d. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal</p> <p>e. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal</p> <p>f. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal</p>	<p>a. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdiri sendiri berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016.</p> <p>b. Integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budi daya sapi potong Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 105/Permentan/pd.300/8/2014</p> <p>c. Tersedianya lahan eks tambang yang telah direklamasi dan revegetasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2018 tentang pengendalian Pematangan betina produktif.</p>

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1 Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian pertanian Republik Indonesia

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut :” **Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern**”.

Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumberdaya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan

pengecehan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat. Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi padarantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan sertap engendalian dan penanggulangan zoonosis. P roduk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.
5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing
Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antarlain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.
6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.
Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya

manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tabel 29. Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak						
Peningkatan Produksi daging (%)	4480,8 ribu ton	0,4	0,85	1,2	1,24	1,28
Peningkatan Produksi susu (%)	994,54 ribu ton	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Peningkatan Produksi telur (ribu ton)	5.355,62 ribu ton	2,15	2,15	2,16	2,16	2,16
SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan						
Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%)	US\$ 744,3 ribu	15	15	20	25	30
SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak						
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	80	81,5	82	82,5	83	83,5
SP4. Tersedianya sarana prasarana peternakan yang sesuai kebutuhan						
Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan (%)		85	87	90	92	95
SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan						
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	80	80	80,5	80,5	81	81
SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia						
Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus)	122	122	120	118	116	114
SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai)	22,01	32,3	32,75	33,5	34	35,5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4))	3,4	3,37	3,44	3,51	3,55	3,58
SP8. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas						
Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai)	87,82	88,25	88,68	88,93	90,32	90,85

Sumber: Renstra Ditjen PKH

Tabel 30. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah	Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak.	a. Populasi dan Produktivitas ternak/pakan rendah	a. Ketersediaan lahan eks tambang, integrasi sapi sawit, dan lahan perhutanan social
2.	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan.	b. Daya saing produk peternakan masih rendah	b. Teknologi peternakan yang sudah cukup maju dan modern
3.	Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak	c. Kawasan Peternakan belum optimal	c. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragaman genetik ternak, dan ragam pangan olahan)
4.	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan	d. Kalimantan Timur belum bebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	d. Sinergi dan dukungan peternak, akademisi dan pemerintah yang tersedia
5.	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	e. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal	e. Pangsa Pasar produk peternakan meningkat
6.	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	f. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal	f. Kesadaran global tentang keamanan pangan (<i>food safety</i>), <i>bio security</i> dan kesejahteraan hewan
		g. Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah	g. Tersedianya sarana pelatihan bagi SDM peternakan

3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Adapun Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2020-2024 adalah **“Prasarana dan Sarana Pertanian berkualitas dan berkesinambungan yang dimanfaatkan dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan luas panen”**

Untuk mencapai Visi tersebut Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

1. Optimasi pemanfaatan alsintan pra-panen untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan

Misi ini menekankan pada pemanfaatan alsintan untuk seluruh komoditas pertanian yang merata sesuai dengan kawasan pertanian nasional. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian BerbasisKorporasi Petani. Optimasi pemanfaatan Alsintan merujukpada pembangunan pertanian berbasis kewilayahan untukkomoditas prioritas nasional tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

2. Memberikan akses air berkualitas dari berbagai sumber untuk seluruh lahan pertanian

Misi ini menjelaskan terkait penyediaan akses jaringanirigasi pertanian untuk seluruh komoditas pertanian secara efektif dan efisien. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian misi ini adalah dengan melakukan modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian mendapatkan akses irigasi pertanian. Dengan ini, diharapkan masalah terkait minimnya sumber air untuk lahan pertanian dapat teratasi.

3. Mengendalikan kualitas pupuk dan pestisida terstandar secara efektif dan efisien

Misi ini menitik-beratkan kepada pengendalian pupuk dan pestisida dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian. Pengendalian yang dimaksud meliputi penyediaan, pendaftaran serta pengawasan pupuk dan pestisida. Penyediaan yang dimaksud adalah memastikan ketersediaan pupuk dan pestisida. Pendaftaran yang dimaksud adalah pengelolaan pendaftaran formulasi pupuk dan pestisida yang beredar. Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu pupuk dan pestisida beredar.

4. Meningkatkan Akses Pembiayaan petani dan perlindungan usaha pertanian

Misi ini berfokus pada peningkatan akses serta pemanfaatan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Secara konkret, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan melebarkan cakupan pembiayaan dan perlindungan petani untuk seluruh komoditas pertanian. Pembiayaan pertanian ke depan diharapkan tidak hanya bersumber dari APBN, namun juga dari sektor lainnya. Sementara perlindungan, akan mengalami pengembangan lebih lanjut dengan cakupan asuransi pertanian yang lebih luas, tidak hanya fokus pada komoditas padi. Dengan demikian, permasalahan finansial yang dihadapi oleh para petani dalam mencari modal usaha pertanian dapat diminimalisir.

5. Menyediakan dan melindungi lahan pertanian secara konsisten dan berkesinambungan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk semua komoditas pertanian yang menjadi prioritas. Penyediaan lahan mengacu pada kebutuhan lahan pertanian untuk mendukung target produksi nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian, mengacu pada target perluasan lahan pertanian dalam rangka meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

6. Implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas

Implementasi reformasi birokrasi merupakan amanah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilaksanakan mengacu dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Dengan demikian, target pencapaian road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dapat tercapai.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang prasarana dan sarana pertanian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- a. Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan peternakan.
- b. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha peternakan yang mudah di akses peternak.
- c. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan prasarana dan sarana peternakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 31. Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program	Sat	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	1	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	%	75,84	75,84	75,84	75,84	75,84
		2	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	%	52,18	52,26	52,33	52,39	52,45
2	Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang	3	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana	%	80	80	80	80	80
	Efektif dan Efisien	4	Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Direktorat jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	31,68	34,45	37,22	39,99	42,76
3	Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana yang Akuntabel dan Berkualitas	5	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	66,53	65,84	64,79	63,88	63,03

Sumber : Renstra Ditjen PSP

Tabel 32. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah	Penghambat	Pendorong
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	a. Tidak tersedianya sumber air b. Tingginya biaya operasional pemanfaatan Pompa c. Lokasi lahan sulit dijangkau, dengan kemiringan yang cukup tinggi	a. Berkembangnya usaha peternakan b. Rencana Desa Korporasi Ternak c. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak

Sumber: Renstra Ditjen PSP

3.3.3 Keterkaitan RENSTRA Kabupaten/Kota

Dengan terbitnya UU 23 Tahun 2015 maka terjadi perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten/ Kota, sebagian besar perangkat daerah lingkup pertanian yang ada digabung menjadi satu, bahkan ada yang digabung dengan kehutanan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan.

Keterkaitan RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024- 2026 dengan Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur.

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2021 – 2026 :“ Meningkatkan Produksi Pertanian Dan Peternakan Dengan Menerapkan Teknologi Yang Ramah Lingkungan Menjadikan Petani Yang Kreatif, Inovatif, Dan Mandiri Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”
2. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan dan sasaran renstra, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 : Meningkatkan Produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas dan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri”.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Visi Tahun 2021 – 2026 : *“Mewujudkan Swasembada Dan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara Yang Sejahtera, Berkualitas dan Berdaya Saing”* .
5. Dinas Pertanian Kota Samarinda dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : "Terwujudnya Pertanian Maju, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan"
6. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Ketersediaan Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Pemanfaatan Sumber Petanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Seinerjis dan Berkelanjutan”.
7. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”.
8. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun

2021 – 2026 :Sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan pertanian Kota Bontang adalah : 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Perikanan, Pertanian dan Peternakan; 2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

9. Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah misi nomor 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing, dengan tujuan nomor 1 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian. Yang meliputi urusan pertanian, pangan, perindustrian, penanaman modal dan ketenagakerjaan.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahulu Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang terarah, berkesinambungan didasarkan pada keunggulan kompetitif wilayah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.”

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Aspek Kinerja dari SDG's)

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Belum adanya kawasan atau lahan khusus pengembangan peternakan dipandang sebagai salah satu faktor belum tercapainya swasembada daging sapi dan kerbau di Kalimantan Timur. Sebab, upaya percepatan mewujudkan swasembada daging dengan pengembangan peternakan skala besar bergantung pada lahan potensial sebagai lokasi pengembangan yang tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pakan di lahan tersebut.

Pengembangan kawasan peternakan dan Kesehatan Hewan secara nasional terbagi menjadi 4 kawasan yaitu :

1. Kawasan khusus padang penggembalaan termasuk di dalamnya lahan eks tambang di Kalimantan Timur.
2. Kawasan daerah padat penduduk terbagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Intensif umumnya di wilayah pengembangan peternakan dengan lokasi terbatas pada umumnya di wilayah Pulau Jawa dan Bali
 - b. Kawasan integrasi ternak-tanaman:

Pada umumnya pengembangan peternakan berada di wilayah pertanian tanaman pangan seperti padi, singkong, jagung dan lain-lain.

3. Kawasan Integrasi ternak-tanaman perkebunan

Pada umumnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang terdiri atas :

a. Integrasi sapi-sawit:

Semua kawasan pengembangan sapi potong di Kalimantan Timur termasuk di dalam integrasi sapi-sawit.

b. Integrasi sapi dengan tanaman perkebunan lainnya

Pada umumnya tanaman perkebunan lainnya seperti kakao, karet, kelapa dan lain-lain.

4. Kawasan pemanfaatan perhutanan sosial

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Bahwa Pemanfaatan kawasan perhutanan sosial (KPS) dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat serta menjaga kelestarian hutan. Berikut ini adalah beberapa acuan pemanfaatan kawasan perhutanan sosial:

1. Pengembangan agroforestry

Agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan tanaman hutan dan tanaman pertanian pada satu lahan. Dalam hal ini, masyarakat setempat dapat memanfaatkan lahan KPS dengan menanam berbagai jenis tanaman, seperti tanaman pangan, buah-buahan, rempah-rempah, dan tanaman kayu. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan untuk peternakan, seperti sapi, kambing, dan ayam.

2. Pemanfaatan kayu dan non-kayu

Masyarakat setempat dapat memanfaatkan kayu dan non-kayu yang ada di KPS. Pengambilan kayu dan non-kayu harus dilakukan secara berkelanjutan dan mengikuti aturan yang berlaku.

3. Pengembangan wisata alam

Kawasan perhutanan sosial dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata alam. Masyarakat setempat dapat mengembangkan objek wisata seperti trekking, camping, dan spot foto. Dalam pengembangan wisata alam, perlu diperhatikan aspek konservasi alam dan keberlanjutan.

4. Pengelolaan kehutanan

Masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam pengelolaan KPS. Hal ini meliputi pengawasan, pengendalian, dan pemantauan kegiatan di KPS. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu dalam pemulihan dan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak.

5. Pengembangan energi terbarukan

KPS dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, seperti energi biomassa dan energi surya. Masyarakat setempat dapat mengembangkan sistem pengelolaan energi terbarukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di KPS.

Dalam pemanfaatan kawasan perhutanan sosial harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek konservasi alam, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kemitraan antara masyarakat setempat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam pengelolaan KPS.

Mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016, maka pola pengembangan peternakan diarahkan pada pengembangan kawasan baik kawasan yang sudah ada maupun kawasan baru yang potensial di Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan pengembangan sapi potong dengan pola integrasi terdiri atas :

- a. Kabupaten Berau
- b. Kutai Kartanegara
- c. Kutai Timur
- d. Paser
- e. Penajam Paser Utara

Di samping komoditas strategis nasional yaitu sapi potong dikembangkan pula kawasan komoditas unggulan sebagai berikut :

- a. Kawasan pengembangan ternak kerbau di Kutai Kartanegara
- b. Kawasan pengembangan ternak babi di Kutai Barat
- c. Kawasan pengembangan ayam Buras di Kota Samarinda

Kawasan industri tanaman pangan berlokasi di PPU dan Paser yang terletak di bagian Selatan Kalimantan Timur sebagai *hinterland* Kota Balikpapan. Sementara itu, sektor peternakan juga baik dikembangkan di wilayah tersebut. Penajam Paser Utara (PPU) fokus pada pengembangan unggas di Kecamatan Penajam dan Babulu, Sapi Brahman dan Sapi Bali di Kecamatan Sepaku serta Rusa Api-api di Kecamatan Waru. PPU dan Paser diprediksi akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Kalimantan Timur

Program pengembangan ternak sapi melalui pemanfaatan lahan eks tambang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengambil nilai lebih dari lokasi eks tambang yang rata-rata tidak subur lagi. Dengan pembangunan kawasan integrasi ternak-tambang ini diharapkan tanah yang strukturnya telah rusak dapat kembali subur dengan penggunaan pupuk kandang hasil kotoran ternak. Selain itu, pemanfaatan lahan eks tambang telah dilakukan pemerintah dengan dukungan perusahaan, selaku pemilik lahan dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Di antara daerah yang paling banyak lahan eks tambang batubara adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, akan dikembangkan juga di Paser, Kutim, Berau dan Samarinda.

3.4.2 Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/ SDGs

Sub sektor Peternakan merupakan bagian penting dari upaya pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Berikut adalah beberapa keterkaitan peternakan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, tabel berikut:

Tabel 33. Keterkaitan Subsektor Peternakan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

No.	TPB/ SDGs	KETERKAITAN SUBSEKTOR PETERNAKAN
1.		Pengentasan kemiskinan (SDG 1) Peternakan dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat pedesaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, peternakan juga dapat memberikan akses ke sumber daya alam yang penting seperti tanah dan air.

2.  **Pangan yang cukup dan berkualitas (SDG 2)**
Peternakan dapat memproduksi makanan berprotein tinggi seperti daging, susu, dan telur. Namun, untuk mencapai SDG 2, peternakan harus dioperasikan dengan cara yang berkelanjutan dan etis, serta memperhatikan kesejahteraan hewan dan lingkungan.
 3.  **Kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3)**
Peternakan yang berkelanjutan dan etis dapat menghasilkan produk yang aman dan sehat bagi konsumen. Selain itu, peternakan juga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi peternak dan masyarakat sekitar melalui akses terhadap produk susu dan produk hewani lainnya
 4.  **Kesetaraan Gender (SDG 5)**
Penguatan Peran Perempuan dalam usaha Peternakan dalam Budidaya Unggas Lokal/Ayam Ras Petelur/Aneka Ternak/Plasma Nutfah/Pengolahan produk, *Peningkatan Kompetensi KWT(%)*
Aktifitas: Pelatihan Keterampilan dan fasilitasi Budidaya Ternak/Pengolahan Produk Peternakan
 5.  **Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SDG 12)**
Peternakan yang berkelanjutan harus menjaga keseimbangan antara produksi dan penggunaan sumber daya alam. Ini berarti melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan
 6.  **Mengatasi perubahan iklim (SDG 13)**
Peternakan dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca. Namun, peternakan juga dapat berperan dalam mengurangi emisi dengan menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan seperti penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi emisi dari limbah ternak.
 7.  **Kehidupan di bawah air (SDG 14)**
Peternakan dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan air jika pengelolaannya tidak berkelanjutan. Namun, praktik-praktik peternakan yang berkelanjutan juga dapat berkontribusi pada keberlangsungan kehidupan di bawah air seperti pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
-

8.



Kehidupan di atas daratan (SDG 15)

Praktik peternakan yang berkelanjutan dapat mempromosikan konservasi dan restorasi habitat yang penting bagi keanekaragaman hayati. Selain itu, peternakan juga dapat mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penting untuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan peternakan. Praktik-praktik peternakan yang berkelanjutan dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

3.5 Faktor/Isu Strategis Pembangunan Peternakan dan Analisa SWOT

3.5.1 Penentuan (Identifikasi) dan Klasifikasi (Pengelompokan) Faktor/Isu Strategis

Faktor - faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut akan membimbing dan mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan.

Dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini akan terkait dengan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal. Untuk itu perlu mengenal kondisi internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui peluang dan ancaman, dengan menggunakan pendekatan analisis *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Penentuan faktor dan isu strategis telah melibatkan berbagai unsur Internal pemerintah, Organisasi lingkup peternakan, swasta dan perguruan Tinggi, dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yaitu tergambar pada tabel berikut:

Tabel 34. Klasifikasi Faktor/Isu Strategis Terkait pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur

FAKTOR DAN ISU STRATEGIS PETERNAKAN RPD 2024-2029	Internal/ Eksternal	SWOT
Biaya produksi ternak tinggi	E	ANCAMAN (THREATS)
Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Bahan Baku pakan relatif mahal (jagung, dedak)	E	ANCAMAN (THREATS)
Meningkatnya kebutuhan pupuk organik	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Konsumsi pangan asal hewan semakin meningkat	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Rendahnya minat Investor terhadap peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)
Akses permodalan/pembiayaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal	E	ANCAMAN (THREATS)
Bunga bank konvensional memberatkan usaha peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)
Minim offtaker (inti) usaha peternakan Ruminasia	E	ANCAMAN (THREATS)
Kurangnya perhatian/keberpihakan terhadap sub sektor peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)
Minimnya Kawasan Peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)
Terdapatnya obat hewan ilegal	E	ANCAMAN (THREATS)
Tergesernya lokasi peternakan oleh pemukiman warga atau peruntukan lainnya	E	ANCAMAN (THREATS)
Luas Kebun Kelapa Sawit Kalimantan Timur Hampir 2 Juta Hektar	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Area perhutanan sosial seluas 618,11 Hektar	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Lahan reklamasi pasca tambang	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Letak geografis Kalimantan Timur diantara negara-negara ASIA TENGGARA	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Pembangunan Infastruktur IKN dan konektifitas pendukungnya	E	PELUANG(OPPORTUNITY)
Munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Sarana prasarana pendukung produksi peternakan belum memadai	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Pencemaran lingkungan akibat aktivitas Peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Aplikasi teknologi peternakan hulu hilir belum optimal	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Hasil sampingan sawit (bungkil sawit) belum optimal dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Kurangnya produksi daging sapi dan telur	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Ketidak seimbangan Supply demand daging Ayam Potong dan telur	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Daya saing produk peternakan dan jaminan mutu serta keamanan produk hewan masih rendah	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Belum terpenuhinya konsumsi protein hewani terhadap kasus balita stunting	I	KEKUATAN (STRENGTH)
Masih rendahnya penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan	I	KEKUATAN (STRENGTH)
Minim komoditas unggulan (ekspor)	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Pengendalian Pemotongan betina produktif	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Ketidak harmonisan pelaksanaan sistem kemitraan ternak	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Ternak sebagai usaha sampingan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Minimnya regenerasi peternak	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Pemerintahan yang profesional dan akuntabel	I	KEKUATAN (STRENGTH)
Pemberantasan kemiskinan	I	KEKUATAN (STRENGTH)
Tertinggalnya kelembagaan peternak dan jejaring bisnis	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)
Belum ada kejelasan kawasan peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)

3.5.2 Pembobotan Faktor/Isu Strategis

Proses pembobotan faktor/isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan seberapa besar dampak faktor/isu tersebut terhadap keberlangsungan organisasi, pembobotan dilakukan dengan cara melibatkan beberapa unsur Pemerintah, swasta dan Perguruan Tinggi, Hasil pembobotan Faktor Eksternal dan Internal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Pembobotan Faktor Eksternal

FAKTOR/ ISU STRATEGIS	Internal /Eksternal	SWOT	BOBOT	BOBOT	RATING	SKOR
			1-5 (BANTU)	(TINGKAT SIGNIFIKAN)	1-4 (URGENSI)	
Biaya produksi ternak tinggi	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	4	0.27
Bahan Baku pakan relatif mahal (jagung, dedak)	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	4	0.27
Rendahnya minat Investor terhadap peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	4	0.055	2	0.11
Akses permodalan/pembiayaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal	E	ANCAMAN (THREATS)	3	0.041	2	0.08
Bunga bank konvensional memberatkan usaha peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	2	0.14
Minim offtaker (inti) usaha peternakan Ruminasia	E	ANCAMAN (THREATS)	3	0.041	1	0.04
Kurangnya perhatian/keberpihakan terhadap sub sektor peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	4	0.27
Minimnya Kawasan Peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	4	0.27
Terdapat Obat hewan ilegal	E	ANCAMAN (THREATS)	4	0.055	3	0.16
Tergesernya lokasi peternakan oleh pemukiman warga atau peruntukan lainnya	E	ANCAMAN (THREATS)	5	0.068	4	0.27
SUB TOTAL ANCAMAN						1.90
Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	4	0.055	2	0.11
Meningkatnya kebutuhan pupuk organik	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	4	0.055	2	0.11
Konsumsi pangan asal hewan semakin meningkat	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	4	0.055	3	0.16
Luas Kebun Kelapa Sawit Kalimantan Timur Hampir 2 Juta Hektar	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	3	0.041	2	0.08
Area perhutanan sosial seluas 618,11 Hektar	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	3	0.041	2	0.08
Lahan reklamasi pasca tambang	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	4	0.055	3	0.16
Letak geografis Kalimantan Timur diantara negara-negara ASIA TENGGARA	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	2	0.027	1	0.03
Pembangunan Infastruktur IKN dan konektifitas pendukungnya	E	PELUANG (OPPORTUNITY)	5	0.068	4	0.27
SUB TOTAL PELUANG						1.01
TOTAL FAKTOR EKSTERNAL (ANCAMAN DAN PELUANG)			73			2.92

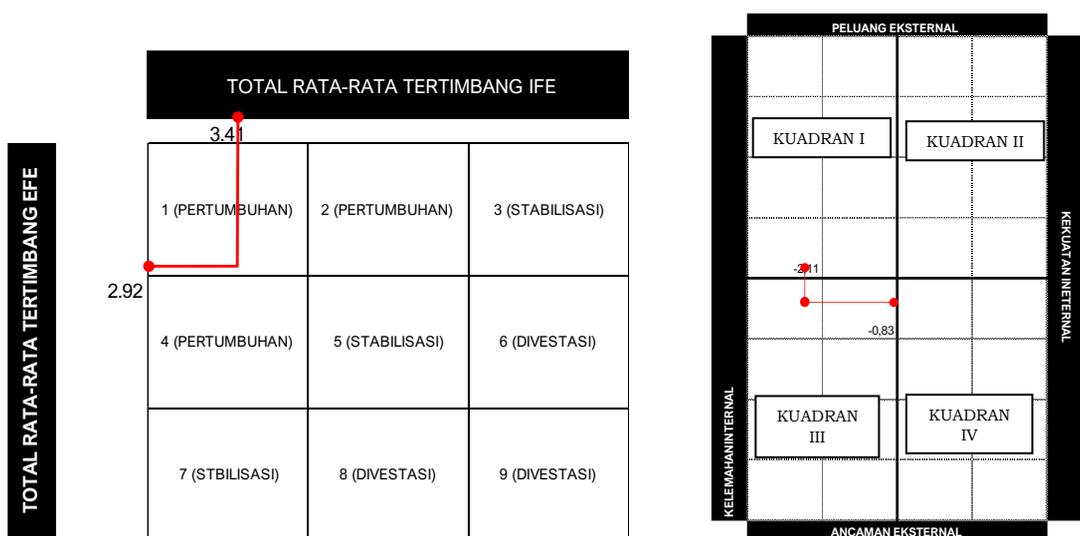
Tabel 36. Pembobotan Faktor Internal

FAKTOR/ ISU STRATEGIS	Internal / Eksternal	SWOT	BOBOT 1-5 (BANTU)	BOBOT (TINGKAT SIGNIFIKAN)	RATING 1-4 (URGENSI)	SKOR
Belum terpenuhinya konsumsi protein hewani terhadap kasus balita stunting	I	KEKUATAN (STRENGTH)	5	0.054	3	0.16
Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan	I	KEKUATAN (STRENGTH)	5	0.054	3	0.16
Pemerintahan yang profesional dan akuntabel	I	KEKUATAN (STRENGTH)	5	0.054	4	0.22
Pemberantasan kemiskinan	I	KEKUATAN (STRENGTH)	5	0.054	2	0.11
SUB TOTAL KEKUATAN						0.65
Munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Sarana prasarana pendukung produksi peternakan belum memadai	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	3	0.13
Pencemaran lingkungan akibat aktivitas Peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	3	0.032	2	0.06
Aplikasi teknologi peternakan hulu hilir belum optimal	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	3	0.13
Hasil sampingan sawit (bungkil sawit) belum optimal dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	3	0.13
Kurangnya produksi daging sapi dan telur	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Ketidak seimbangan Supply demand daging Ayam Potong dan telur	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	4	0.17
Daya saing produk peternakan dan jaminan mutu serta keamanan produk hewan masih rendah	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	3	0.13
Masih rendahnya penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	3	0.032	2	0.06
Minim komoditas unggulan (ekspor)	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	3	0.032	3	0.10
Pengendalian Pemotongan betina produktif	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Ketidak harmonisan pelaksanaan sistem kemitraan ternak	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4	0.043	3	0.13
Ternak sebagai usaha sampingan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Minimnya regenerasi peternak	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Tertinggalnya kelembagaan peternak dan jejaring bisnis	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
Belum ada kejelasan kawasan peternakan	I	KELEMAHAN (WEAKNESS)	5	0.054	4	0.22
SUB TOTAL KELEMAHAN						2.76
TOTAL FAKTOR INTERNAL (KEKUATAN DAN KELEMAHAN)			93			3.41

3.5.3 Analisa arah Strategi berdasarkan pembobotan faktor strategis

Berdasarkan faktor strategis yang telah diidentifikasi, setelah faktor strategis yang paling penting telah diidentifikasi, maka dalam ditentukan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki organisasi, dengan menentukan arah

strategi berdasarkan pembobotan dan analisa faktor internal dan eksternal. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur, berdasarkan hasil analisa berada pada kuadran **“Pertumbuhan”** dan berada pada kuadran III, Dengan arti bahwa (*CONCERVATIVE*) : Peluang yang sangat besar berhadapan dengan kelemahan internal yang kuat. Strategi yang dilakukan adalah meminimalisir permasalahan internal untuk merebut peluang yang ada. Kuadran pertumbuhan menunjukkan bahwa Dinas peternakan dan kesehatan hewan harus melakukan upaya (effort) yang lebih keras untuk mendorong pergerakan pembangunan peternakan karena dihadapkan oleh kelemahan internal dan ancaman yang begitu kuat.



Gambar 8. Arah strategi berdasarkan pembobotan faktor internal dan eksternal.

3.5.4 Kebijakan strategi

Kebijakan strategi memberikan gambaran bagaimana dinas peternakan dapat mengoptimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengambil keuntungan dari peluang, dan mengatasi ancaman dengan cara yang tepat. Namun, kebijakan strategi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi spesifik. Kebijakan strategi yang didapatkan adalah sebagai berikut :

- ✓ Kebijakan berdasarkan Kekuatan-Peluang (S-O)
 1. Meningkatkan konsumsi pangan asal hewan dalam penanggulangan balita stunting
 2. Meningkatkan produksi pupuk organik dengan teknologi pengolahan dan biogas

3. Mendorong teralokasikanya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota
4. Mendorong integrasi dan pemanfaatan lahan perkebunan sawit, reklamasi pasca tambang dan perhutanan sosial
5. KIE Masyarakat veteriner
6. Peningkatan KIE Penerapan Kesejahteraan hewan
7. Peningkatan pengawasan dan penerapan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
8. Peningkatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
9. Peningkatan pengawasan peredaran produk hewan.

✓ Kebijakan berdasarkan Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Mendorong akses pembiayaan usaha peternakan dengan subsidi/bantuan bunga
2. Mempermudah dan mendorong investor untuk usaha peternakan
3. Pengupayaan dan penerapan teknologi peternakan yang minim pencemaran lingkungan
4. Mengupayakan alternatif teknis dalam upaya menekan biaya produksi
5. Mengupayakan usaha peternakan sederhana untuk keluarga miskin
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan

✓ Kebijakan berdasarkan Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Pencegahan dan pemberantasan PHMS dan zoonosis
2. Peningkatan pengawasan Lalu lintas ternak
3. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak
4. Menambah jumlah sapi betina produktif
5. Optimalisasi reproduksi ternak
6. Memaksimalkan potensi kearifan ternak lokal (Plasma Nutfah)
7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian Pemotongan ternak ruminansia betina produktif
8. Peningkatan dan penerapan teknologi peternakan
9. Peningkatan kapasitas SDM peternakan dan kelembagaan

10. Penanganan gangguan reproduksi
 11. Pemberdayaan pemuda sebagai peternak millennial
 12. Peningkatan daya saing komoditas dan produk unggulan peternakan (ekspor)
 13. Mendorong Sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit
 14. Pengendalian Supply demand produk peternakan
- ✓ Kebijakan berdasarkan Kekuatan-Ancaman (S-T)
1. Mengeksplorasi bahan baku pakan yang murah
 2. Mendorong pembangunan pabrik pakan skala kecil (mini feedmil)
 3. Meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan peternakan
 4. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas
 5. Mendorong ketersediaan lahan kawasan peternakan
 6. Mengoptimalkan akses pembiayaan usaha peternakan
 7. Mendorong pelaksanaan kemitraan profesional berkeadilan

Kebijakan strategi yang berdasarkan faktor kekuatan-kelemahan-Peluang dan Ancaman disusun berdasarkan hasil FGD bersama bidang terkait pada gambar.6 berikut;

			Belum terpenuhinya konsumsi protein hewani terhadap kasus balita stunting	KEKUATAN (STRENGTH)	Munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	KELEMAHAN (WEAKNESS)
			Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan	KEKUATAN (STRENGTH)	Sarana prasarana pendukung produksi peternakan belum memadai	KELEMAHAN (WEAKNESS)
			Pemerintahan yang profesional dan akuntabel	KEKUATAN (STRENGTH)	Pencemaran lingkungan akibat aktivitas Peternakan	KELEMAHAN (WEAKNESS)
			Pemberantasan kemiskinan	KEKUATAN (STRENGTH)	Aplikasi teknologi peternakan hulu hilir belum optimal	KELEMAHAN (WEAKNESS)
IFAS	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)				
EFAS						
Peluang (Opportunity)	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang				
Ancaman (Threats)	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan mengulangi ancaman				
Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah	E	PELUANG(OPPORTUNITY)	1. Meningkatkan konsumsi pangan asal hewan dalam penanggulangan balita stunting		1. Pencegahan dan pemberantasan PHMS dan zoonosis	
Meningkatnya kebutuhan pupuk organik	E	PELUANG(OPPORTUNITY)	2. Meningkatkan produksi pupuk organik dengan teknologi pengolahan dan biogas		2. Peningkatan pengawasan Lalu lintas ternak	
Konsumsi pangan asal hewan semakin meningkat	E	PELUANG(OPPORTUNITY)	3. Mendorong terlokasikannya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota		3. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak	
Luas Kebun Kelapa Sawit KalimantanTimur Hampir 2 Juta Hektar	E	PELUANG(OPPORTUNITY)	4. Mendorong integrasi dan pemanfaatan lahan perkebunan sawit, reklamasi pasca tambang dan perhutanan sosial		4. Menambah jumlah sapi betina produktif	
Area perhutanan sosial seluas Juta Hektar	E	PELUANG(OPPORTUNITY)	5. KIE Masyarakat veteriner		5. Optimalisasi reproduksi ternak	
Lahan reklamasi pasca tambang seluas Juta Hektar	E	PELUANG(OPPORTUNITY)	6. Peningkatan KIE Penerapan Kesejahteraan hewan		6. Memaksimalkan potensi kearifan ternak lokal (Plasma Nutfah)	
Letak geografis Kaltim diantara negara-negara ASIA TENGGARA	E	PELUANG(OPPORTUNITY)	7. Peningkatan pengawasan dan penerapan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan		7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif	
Pembangunan Infrastruktur IKN dan konektivitas pendukungnya	E	PELUANG(OPPORTUNITY)	8. Peningkatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		8. Peningkatan dan penerapan teknologi peternakan	
			9. Peningkatan pengawasan peredaran produk hewan.		9. Peningkatan kapasitas SDM peternakan dan kelembagaan	
Biaya produksi ternak tinggi	E	ANCAMAN (THREATS)				
Bahan Baku pakan relatif mahal (jagung, dedak)	E	ANCAMAN (THREATS)	1. Mendorong akses pembiayaan usaha peternakan dengan subsidi/bantuan bunga		1. Mengeksplorasi bahan baku pakan yang murah	
Rendahnya minat Investor terhadap peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	2. Mempermudah dan mendorong investor untuk usaha peternakan		2. Mendorong pembangunan pabrik pakan skala kecil (mini feedmill)	
Akses permodalan/pembiayaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal	E	ANCAMAN (THREATS)	3. Pengupayaan dan penerapan teknologi peternakan yang minim pencemaran lingkungan		3. Meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan peternakan	
Bunga bank konvensional memberatkan usaha peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	4. Mengupayakan alternatif teknis dalam upaya menekan biaya produksi		4. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas	
Minim offtaker (inti) usaha peternakan Ruminasia	E	ANCAMAN (THREATS)	5. Mengupayakan usaha peternakan sederhana untuk keluarga miskin		5. Mendorong ketersediaan lahan kawasan peternakan	
Kurangnya perhatian/keberpihakan terhadap sub sektor peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan		6. Mengoptimalkan akses pembiayaan usaha peternakan	
Minimnya Kawasan Peternakan	E	ANCAMAN (THREATS)	7. Penguatan tugas dan fungsi Cek point di wilayah perbatasan		7. Mendorong pelaksanaan kemitraan profesional berkeadilan	
Terdapat Obat hewan Ilegal	E	ANCAMAN (THREATS)				
Tergesernya lokasi peternakan oleh pemukiman warga atau peruntukan lainnya	E	ANCAMAN (THREATS)				
					8. Peningkatan Layanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	
					9. Peningkatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

Gambar 9. Penyusunan Kebijakan strategi berdasarkan SWOT

Kebijakan strategi yang disusun kemudian dilakukan pemilahan, pengkategorian urusan, dan perumusan narasi, sehingga didapatkan Strategi dan kebijakan teknis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 37. Strategi dan Kebijakan Teknis yang disusun dan dirumuskan narasinya

STRATEGI	KEBIJAKAN PRODUKSI
MENDORONG PENINGKATAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	1. Pengupayaan dan penerapan teknologi peternakan yang minim pencemaran lingkungan 2. Mengupayakan alternatif teknis dalam upaya menekan biaya produksi
PENINGKATAN POPULASI, PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS TERNAK	1. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak 2. Menambah jumlah sapi betina produktif
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PAKAN TERNAK	1. Mengeksplorasi bahan baku pakan yang murah 2. Mendorong pembangunan pengolahan pakan skala kecil (<i>mini feedmil</i>) 3. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas
PEMBERDAYAAN POTENSI KOMODITAS TERNAK LOKAL	Memaksimalkan potensi ternak lokal (Aneka ternak, plasma nutfah)
STRATEGI	KEBIJAKAN KESEHATAN HEWAN
PENINGKATAN STATUS KESEHATAN HEWAN	1. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis 2. Mendorong penerapan sertifikasi zona/kompartemen bebas kasus penyakit
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN MUTU OBAT HEWAN	1. Penjaminan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar 2. Penanganan gangguan reproduksi 3. Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan
PENINGKATAN PENGAWASAN LALULINTAS HEWAN/TERNAK	1. Peningkatan pengawasan Lalu lintas Hewan/ Ternak 2. Analisa Risiko Penyakit Hewan
STRATEGI	KEBIJAKAN KESMAVET
PENINGKATAN PEMENUHAN PANGAN ASAL HEWAN YANG AMAN SEHAT UTUH DAN HALAL (ASUH)	1. Peningkatan Konsumsi pangan asal hewan yang ASUH dalam upaya berkontribusi menurunkan kasus balita stunting 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyakit zoonosis
PENINGKATAN JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN	1. Peningkatan Mutu dan keamanan produk hewan (ASUH) 2. Pengawasan lalu lintas dan peredaran produk hewan
PENINGKATAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KESEJAHTERAAN HEWAN	1. Pengendalian Pemotongan ternak ruminansia betina produktif 2. Peningkatan penerapan masyarakat terhadap Kesejahteraan Hewan (Kesrawan)
STRATEGI	KEBIJAKAN KAWASAN DAN AGRIBISNIS
PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN	1. Mendorong teralokasikanya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota 2. Mendorong integrasi dan pemanfaatan lahan perkebunan sawit, reklamasi pasca tambang dan perhutanan sosial
PENGUATAN KEMUDAHAN DAN AKSES PEMBIAYAAN USAHA PETERNAKAN	1. Mendorong dan mengoptimalkan akses pembiayaan usaha peternakan
PENINGKATAN PERAN SWASTA DAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT	1. Mempermudah dan mendorong pelaku usaha peternakan 2. Mengupayakan usaha peternakan untuk keluarga miskin 3. Meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan peternakan
PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN	1. Pemberdayaan pemuda sebagai peternak millennial 2. Peningkatan kapasitas SDM peternakan dan kelembagaan

PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PETERNAKAN	3. Mendorong pelaksanaan kemitraan profesional berkeadilan 1. Peningkatan daya saing komoditas dan produk unggulan peternakan (keluar Kalimantan Timur) 2. Meningkatkan pemanfaatan kotoran hewan dengan teknologi pengolahan 3. Pengendalian Supply demand produk peternakan
--	--

STRATEGI	KEBIJAKAN TEKNIS UPTD PTHPT
PENINGKATAN POPULASI, PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS TERNAK	Peningkatan produksi dan produktifitas ternak
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PAKAN TERNAK	Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas Peningkatan PAD dari UPTD PTHPT Api-api

STRATEGI	KEBIJAKAN TEKNIS LAB UPTD
PENGUATAN LAYANAN LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET	Peningkatan Layanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Peningkatan PAD UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru, sesuai hasil analisis SWOT yang dijabarkan pada bab terdahulu.

Sehubungan dengan itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur harus mempunyai Motto sebagai cara pandang jauh ke depan terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”**, Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka Motto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Korporasi Peternak wujudkan Ketahanan Pangan Asal Hewan Yang Berdaulat, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan”

Motto tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yang merupakan pernyataan keinginan yang mencerminkan mimpi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yakni: 1) Pengembangan Korporasi Peternak; dan 2) Ketahanan Pangan Asal Hewan

Korporasi Peternak, berarti model pemeliharaan ternak yang berbrntuk kelembagaan ekonomi peternak untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

Ketahanan Pangan Asal Hewan, berarti kondisi dimana Kalimantan Timur dapat memproduksi dan menyediakan sumber daya pangan yang cukup dari subsektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dengan memperhatikan pengelolaan ternak, penggunaan teknologi dan pengembangan pasar yang berkelanjutan.

Sebagaimana untuk mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran diversifikasi ekonomi non migas dan batubara, maka hal

tersebut sejalan dengan pengembangan kelembagaan peternakan sapi potong di lahan eks tambang dan integrasi dengan tanaman merupakan upaya dalam meningkatkan populasi sapi potong di Kalimantan Timur melalui pengembangan Korporasi Peternak untuk penyediaan daging yang berdaulat sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan asal hewan.

4.1 Tujuan

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”, sasaran ke-5 yaitu Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi,

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil dan resilien dengan tidak mengandalkan pada sektor ekstraktif, sehingga dilakukan diversifikasi ekonomi (horizontal dan vertikal) pada sektor ekonomi unggulan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 3-5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.

Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi; yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara horizontal adalah mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan (diluar sektor non-migas dan batubara) seperti sektor pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pangan, tanaman pangan, dan hortikultura, sektor industri dan sektor pariwisata). Sedangkan yang dimaksud diversifikasi ekonomi secara vertikal adalah mendorong penganekaragaman pengolahan komoditas-komoditas unggulan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi (tidak hanya dipasarkan dalam bentuk produk mentah).

Penjabaran atau implementasi dari tujuan pembangunan daerah Kalimantan Timur 2024-2026 dengan pencapaian tujuan ke-2 yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”, dan sesuai dengan sasaran ke- 1 yaitu Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi, maka arah pembangunan sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 (Dua) tujuan mendasar yaitu:

Tujuan 1.

“Meningkatkan Peran Subsektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara”

Indikator:

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan (%)

Pembangunan subsektor peternakan di Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai penyedia protein hewani, penyedia bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sehingga akan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera melalui peningkatan output dan pendapatan dengan memanfaatkan beberapa hasil dari produk-produk peternakan seperti biogas, pupuk, dan produk-produk hewani (daging, telur).

Diversifikasi ekonomi melalui subsektor peternakan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- a. Diversifikasi ekonomi melalui subsektor peternakan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang dominan. Subsektor peternakan yang berkembang dengan baik, sehingga daerah dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga atau permintaan dalam sektor lain, seperti sektor pertambangan atau perkebunan.
- b. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, Pengembangan subsektor peternakan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Peternakan yang berkembang akan membutuhkan tenaga kerja untuk berbagai kegiatan seperti pemeliharaan ternak, pemrosesan produk peternakan, distribusi, dan pemasaran. Dengan demikian, diversifikasi ke sektor peternakan dapat memberikan peluang kerja yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Memperkuat keamanan pangan, Subsektor peternakan yang kuat dapat memainkan peran penting dalam memperkuat keamanan pangan suatu daerah. Diversifikasi ekonomi melalui peternakan memungkinkan produksi lokal yang lebih tinggi dari produk hewani, seperti daging, susu, dan telur. Hal ini mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan ketahanan pangan, dan memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi populasi.
- d. Meningkatkan nilai tambah dan ekspor, Dengan mengembangkan subsektor peternakan yang beragam, daerah dapat meningkatkan nilai tambah pada produk hewani. Proses pemrosesan dan pengolahan yang

lebih maju dapat meningkatkan nilai jual produk, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan ekonomi. Selain itu, peternakan yang berkembang juga dapat menjadi sumber ekspor yang signifikan, memperkuat neraca perdagangan dan menghasilkan pendapatan devisa bagi negara.

- e. Peningkatan akses terhadap gizi dan pangan yang seimbang, Diversifikasi ekonomi melalui subsektor peternakan juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap gizi yang seimbang. Peternakan dapat memproduksi berbagai produk hewani yang kaya protein, vitamin, dan mineral, yang penting untuk pemenuhan kebutuhan gizi manusia. Dengan demikian, pengembangan peternakan yang beragam dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Diversifikasi ekonomi melalui subsektor peternakan memberikan berbagai manfaat tersebut, yang secara keseluruhan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun target Laju Pertumbuhan Ekonomi subsektor peternakan dari Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38. Target Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal 2023 (Akhir 2022)	Target		
			2024	2025	2026
1	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan (%)	1,94	2,00	2,14	2,29

Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik didukung dengan ASN ber-AKHLAK

Selaras dengan tujuan ke-4 Rencana Pembangunan daerah yaitu Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjabarkan tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan penerapan core value ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan publik ini memiliki beberapa maksud, antara lain:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan memiliki birokrasi yang akuntabel, transparan, dan berintegritas, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mempromosikan partisipasi publik, dan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, Birokrasi yang berorientasi pelayanan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan efisien kepada masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip manajemen yang baik, penyederhanaan/reformasi birokrasi, dan penggunaan teknologi informasi, diharapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.
- c. Birokrasi yang akuntabel berperan penting dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, regulasi yang jelas, dan kultur organisasi yang berintegritas, praktik korupsi dapat diminimalkan. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan menghasilkan pemerintahan yang bersih.
- d. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, Birokrasi yang berorientasi pelayanan publik harus memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, evaluasi, dan monitoring program dan kebijakan publik akan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.
- e. Menjaga akuntabilitas dan transparansi, Birokrasi yang akuntabel harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik, baik itu anggaran, aset, maupun keputusan yang diambil. Dengan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, penggunaan dana publik, dan pelaporan kinerja, birokrasi dapat menjaga akuntabilitasnya terhadap masyarakat dan membangun kepercayaan yang lebih besar.

Tujuan 2.

“Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas”

Indikator:

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja secara lengkap dan menyeluruh. Kelima komponen manajemen kinerja tersebut adalah : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Kinerja; dan 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Peningkatan Evaluasi Nilai SAKIP dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam menjawab tujuan dan sasaran dari perangkat daerah. Adapun target peningkatan nilai SAKIP selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39. Target Nilai SAKIP di Kalimantan Timur 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2023	2024	2025	2026
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,84	78,50	79,30	80,01

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik atau kinerja pemerintah. IKM dapat dihitung dengan menggunakan metode survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah atau lembaga riset.

Hasil survei tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan skor atau indeks yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat, dengan mengetahui indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah dapat mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki layanan yang disediakan.

Adapun target Indeks Kepuasan Masyarakat (%) selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 40. Target Indeks Kepuasan Masyarakat di Kalimantan Timur 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2023	2024	2025	2026
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,60	85,00	85,50	86,00

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah (1) Meningkatnya kesejahteraan peternak; (2) Meningkatkan produksi pangan asal hewan atau ternak; dan (3) meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kepuasan masyarakat.

Masing-masing sasaran tersebut, dapat dijabarkan ke dalam beberapa indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kesejahteraan peternak

Indikator:

1. Peningkatan Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP) (Skor)

Peningkatan Kesejahteraan Peternak dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan yang merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani. Pada Bulan Desember 2022, NTP Peternakan

dengan indeks 108,77. Sementara itu, untuk NTP Subsektor lain indeksinya masih di atas 100, terlihat dari nilai NTP Tahun 2022 mencapai 126,03. Kondisi ini menggambarkan bahwa daya beli petani masih lebih dari biaya produksi. NTP Peternakan dan NTP keseluruhan dapat dilihat dari target berikut.

Tabel 41. Nilai Tukar Pertanian Tahun 2021-2022

No	Lapangan Usaha	NTP	
		2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	120,94	126,03
a	Tanaman Pangan	95,28	92,34
b	Tanaman Hortikultura	106,07	112,32
c	Tanaman Perkebunan	151,1	162,54
d	Peternakan	104,28	108,77
e	Perikanan	101,77	99,42

Sumber : Kalimantan Timur dalam angka BPS, 2023
Keterangan: NTPT = NTP Peternakan, NTP = NTP Pertanian

Semakin tinggi Nilai Tukar Petani (NTP) peternakan, semakin baik daya jual peternak terhadap produk-produk peternakan dibanding daya beli peternak terhadap kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibandingkan biaya rumah tangga dan secara relatif lebih sejahtera. Adapun Target NTP Peternakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42. Target NTP Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal 2023 (Akhir 2022)	Target		
			2024	2025	2026
1	Nilai Tukar Petani Peternak	108,04	108,58	109,12	110,00

Sasaran 2. Meningkatnya produksi pangan asal hewan

Indikator:

1. Produksi Daging

Sumber protein asal daging secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu daging sapi dan kerbau, daging kambing dan domba, serta daging unggas. Produksi daging unggas memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi/kerbau maupun kambing/domba. Seiring dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat, konsumsi produk peternakan cenderung turut meningkat. Tahun 2022 terdapat penurunan produksi daging dikarenakan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak sapi dan menyerang wilayah

asal bibit ternak di Kalimantan Timur, sehingga bibit ternak luar daerah tidak dapat memasuki wilayah Kalimantan Timur untuk mencegah penularan.

Tabel 43. Target Peningkatan Produksi Daging di Kalimantan Timur 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2023 (Akhir 2022)	2024	2025	2026
1	Peningkatan Produksi Daging	74.461	76.024,70	77.773,30	79.717,60

2. Produksi Telur

Pemenuhan protein asal ternak dapat dipenuhi dari produk selain daging, yaitu telur dan susu. Telur merupakan salah satu produk ternak yang memiliki nilai nutrisi yang baik, mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Tingkat konsumsi berbagai jenis telur secara nyata dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga, ukuran rumah tangga dan tingkat pendidikan keluarga.

Produksi telur merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu dan usaha peternakan rakyat dalam waktu tertentu, sedangkan konsumsi telur merupakan jumlah telur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun target produksi telur selama 3 (tiga) Tahun dari Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 44. Tabel Target Peningkatan Produksi Telur di Kalimantan Timur 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2023 (Akhir 2022)	2024	2025	2026
1	Peningkatan Produksi Telur	14,834.64	15,294.50	15,799.20	16,352.20

3. Produksi Ternak (Aneka Ternak) Lainnya

Peningkatan Kesejahteraan peternak dengan meningkatkan produksi ternak selain daging, telur dan susu, tetapi juga sumber daya pangan lainnya seperti sarang burung walet, madu kelulut, magot dan hasil lainnya yang dihasilkan dari hewan atau ternak. Peningkatan Produksi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas hewan, pengembangan teknologi dan metode pengolahan

yang lebih efisien yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan peterna dan juga kontribusi subsektor peternakan dalam perekonomian.

Tabel 45. Target Peningkatan Aneka Ternak di Kalimantan Timur 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2023 (Akhir 2022)	2024	2025	2026
1	Produksi Aneka Ternak Lainnya	166,62	174,95	183,70	192,88

Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat

Indikator:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Penilaian akuntabilitas kinerja perangkat dinas terdiri dari 5 Unsur yaitu (1) Kualitas Perencanaan Kinerja dapat dinilai berdasarkan pada kriteria-kriteria yaitu: (a) Perencanaan kinerja harus memiliki tujuan yang terkait dengan visi, misi, dan strategi organisasi yang jelas dan terukur, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatasan waktu (SMART) (b) Perencanaan kinerja harus mengidentifikasi indikator-indikator yang relevan dan tepat untuk mengukur pencapaian tujuan (c) Perencanaan kinerja menetapkan target realistis untuk setiap indikator kinerja dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang relevan.

(2) Pengukuran dan Penilaian Kinerja, Pengukuran dan penilaian kinerja merupakan langkah penting dalam evaluasi kinerja. Dalam hal ini, organisasi perlu memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur yang dapat digunakan untuk melacak pencapaian sasaran. Indikator ini harus relevan, dapat diandalkan, dan dapat diverifikasi. Penggunaan data yang akurat dan up-to-date juga penting untuk mengevaluasi kinerja dengan tepat. (3) Pelaporan Kinerja, Pelaporan kinerja merupakan elemen penting dalam SAKIP. Organisasi harus memiliki sistem pelaporan yang efektif dan transparan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja kepada pemangku kepentingan. Pelaporan yang baik harus mencakup data yang akurat, ringkas, dan mudah dipahami. Selain itu, pelaporan kinerja harus memuat informasi yang relevan dan menarik bagi pembaca

agar dapat memahami prestasi dan dampak yang telah dicapai oleh organisasi. (4) Pengendalian dan Pengawasan Kinerja, Pengendalian dan pengawasan kinerja adalah unsur penting dalam menjamin kesuksesan evaluasi kinerja. Organisasi perlu memiliki mekanisme pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa sasaran dan indikator kinerja tercapai sesuai dengan rencana. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses evaluasi kinerja. (5) Peningkatan Kinerja, Peningkatan kinerja adalah elemen yang tidak boleh diabaikan dalam SAKIP. Organisasi harus berkomitmen untuk terus-menerus. Target nilai akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Target Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal		Target	
		2023	2024	2025	2026
1	Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP)	75,60	77,07	78,54	80,01

2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui Survey kepuasan masyarakat (SKM) melalui pengumpulan data tentang persepsi, opini, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, program, atau kebijakan perangkat Dinas. Tujuan dari survei ini adalah untuk memahami pandangan masyarakat terhadap kualitas dan efektivitas layanan yang disediakan serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Survei kepuasan masyarakat dapat membantu pemerintah dan organisasi dalam memahami kebutuhan masyarakat, mengukur tingkat kepuasan mereka, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Dengan melibatkan responden secara terbuka dan memberikan tindak lanjut.

Tabel 47. Target Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2024-2026

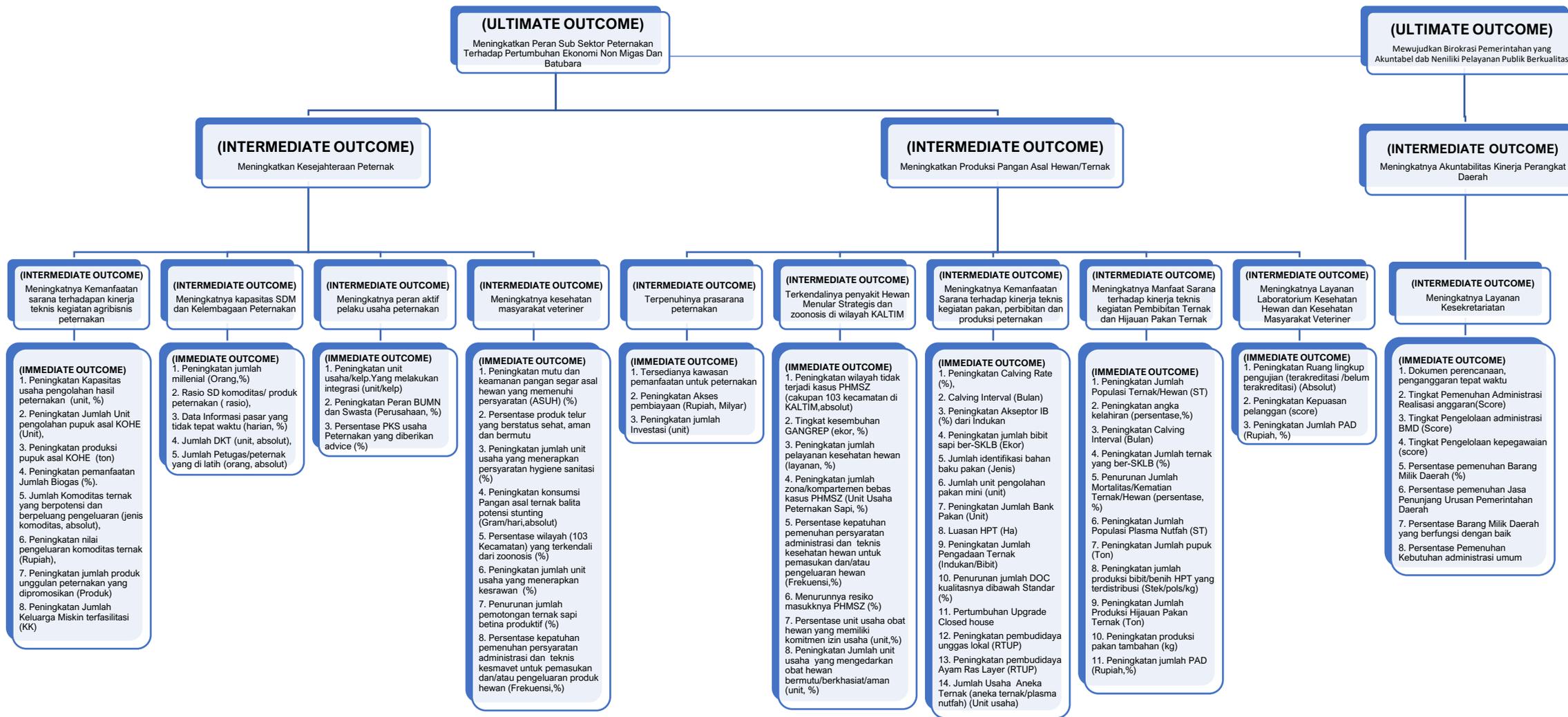
No	Indikator	Kondisi Awal		Target	
		2023 (Akhir 2022)	2024	2025	2026
2	Indek Kepuasan Masyarakat	80,25	85,00	85,50	86,00

4.3 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja (Tujuan, Output dan Outcome)

Pohon kinerja membantu dalam menyusun rencana tindakan yang terarah dan terukur serta memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja secara sistematis. Membantu para pemangku kepentingan dalam memahami hubungan antara tujuan, hasil, kegiatan, dan indikator kinerja, dengan menggunakan pohon kinerja, program atau proyek dapat lebih efektif dalam mengelola kinerja dan mengarahkan upaya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Kinerja yang telah tersusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, divisualisasikan kedalam pohon kinerja agar memudahkan melakukan evaluasi, dan memahami keterkaitan pada masing masing kinerja bagian/bidang, dapat dilihat pada gambar berikut:

POHON KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Panduan)



.Gambar 10. Pohon Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Cascading (penjabaran) kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disusun melalui proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading dilakukan disusun secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi Bidang/Unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment). Cascading Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk mencapai 2 (Dua) tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana pada lampiran 1.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah rencana tindakan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka panjang. Strategi umumnya melibatkan analisis situasi, pengembangan rencana tindakan, dan implementasi dan pengawasan rencana tersebut. Strategi dapat digunakan oleh organisasi, perusahaan, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam pengembangan strategi, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Analisis situasi: melakukan analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tujuan atau visi yang ingin dicapai. Analisis ini akan membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal.
2. Penetapan tujuan: menentukan tujuan atau visi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Tujuan harus jelas, spesifik, terukur, dan realistis.
3. Pengembangan strategi: merumuskan strategi yang dapat mencapai tujuan atau visi yang telah ditentukan. Strategi harus realistis, dapat diukur, dan berkelanjutan.
4. Implementasi strategi: melaksanakan strategi yang telah disusun. Ini melibatkan alokasi sumber daya, penentuan tindakan prioritas, serta pengaturan dan pengawasan implementasi.
5. Pengawasan dan evaluasi: memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan strategi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan strategi berjalan dengan baik. Jika ada masalah atau perubahan dalam situasi, strategi dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam bisnis, politik, pendidikan, dan organisasi sosial. Penting untuk memperhatikan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan strategi, serta memastikan bahwa strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan berkelanjutan.

Strategi yang disusun Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan telah melalui tahapan-tahapan dalam penyusunan dan perumusannya,

sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, maka strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Peningkatan Dan Penerapan Teknologi Peternakan
2. Peningkatan Populasi, Produksi Dan Produktifitas Ternak
3. Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak
4. Pemberdayaan Potensi Komoditas Ternak Lokal
5. Peningkatan Status Kesehatan Hewan
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Mutu Obat Hewan
7. Peningkatan Pengawasan Lalulintas Hewan/Ternak
8. Peningkatan Pemenuhan Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (Asuh)
9. Peningkatan Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Asal Hewan
10. Peningkatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif Dan Kesejahteraan Hewan
11. Pengembangan Kawasan Peternakan
12. Penguatan Kemudahan Dan Akses Pembiayaan Usaha Peternakan
13. Peningkatan Peran Swasta Dan Usaha Peternakan Rakyat
14. Peningkatan Kapasitas Sdm Dan Kelembagaan Peternakan
15. Pengendalian Dan Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan
16. Peningkatan Populasi, Produksi Dan Produktifitas Ternak
17. Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Pakan Ternak
18. Penguatan Layanan Laboratorium Keswan Dan Kesmavet

5.2 Arah Kebijakan Teknis

Arah kebijakan teknis adalah arah atau tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan yang berhubungan dengan aspek teknis peternakan dan kesehatan hewan, Kebijakan teknis telah susun dikelompokkan sebagaimana berikut:

5.2.1 Kebijakan Perbibitan, Pakan Dan Produksi Peternakan

1. Pengupayaan dan penerapan teknologi peternakan yang minim pencemaran lingkungan
2. Mengupayakan alternatif teknis dalam upaya menekan biaya produksi
3. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak
4. Menambah jumlah sapi betina produktif
5. Mengeksplorasi bahan baku pakan yang murah
6. Mendorong pembangunan pengolahan pakan skala kecil (mini feedmil)
7. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas
8. Memaksimalkan potensi ternak lokal (Aneka ternak, plasma nutfah)

5.2.2 Kebijakan Kesehatan Hewan

1. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis
2. Mendorong penerapan sertifikasi zona/kompartemen bebas kasus penyakit
3. Penjaminan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar
4. Penanganan gangguan reproduksi
5. Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan
6. Peningkatan pengawasan Lalu lintas Hewan/ Ternak
7. Analisa Risiko Penyakit Hewan

5.2.3 Kebijakan Kawasan Dan Agribisnis

1. Mendorong teralokasikanya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota
2. Mendorong integrasi dan pemanfaatan lahan perkebunan sawit, reklamasi pasca tambang dan perhutanan sosial
3. Mendorong dan mengoptimalkan akses pembiayaan usaha peternakan
4. Mempermudah dan mendorong pelaku usaha peternakan
5. Mengupayakan usaha peternakan untuk keluarga miskin
6. Meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan peternakan
7. Pemberdayaan pemuda sebagai peternak millennial
8. Peningkatan kapasitas SDM peternakan dan kelembagaan
9. Mendorong pelaksanaan kemitraan profesional berkeadilan

10. Peningkatan daya saing komoditas dan produk unggulan peternakan (keluar Kalimantan Timur)
11. Meningkatkan pemanfaatan kotoran hewan dengan teknologi pengolahan
12. Pengendalian Supply demand produk peternakan

5.2.4 Kebijakan Kesmavet

1. Peningkatan Konsumsi pangan asal hewan yang ASUH dalam upaya berkontribusi menurunkan kasus balita stunting
2. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyakit zoonosis
3. Peningkatan Mutu dan keamanan produk hewan (ASUH)
4. Pengawasan lalu lintas dan peredaran produk hewan
5. Pengendalian Pemetongan ternak ruminansia betina produktif
6. Peningkatan penerapan masyarakat terhadap Kesejahteraan Hewan (Kesrawan)

5.2.5 Kebijakan Teknis Uptd Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak

1. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak
2. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas
3. Peningkatan PAD dari UPTD PTHPT Api-api

5.2.6 Kebijakan Teknis Uptd Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Peningkatan Layanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
2. Peningkatan PAD UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

5.3 Indikator Teknis

5.3.1 Bidang Perbibitan, Pakan Dan Produksi Peternakan

1. Mengupayakan alternatif teknis dalam upaya menekan biaya produksi, *Indikator:* Pertumbuhan penerapan teknologi Upgrade Closed house.
2. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak, *Indikator:* Peningkatan Calving Rate (%), Calving Interval (Bulan), Peningkatan Akseptor IB (%) dari Indukan, Peningkatan jumlah bibit sapi ber-SKLB (%), Peningkatan pembudidaya unggas lokal (%), Penurunan

jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar (%), Peningkatan pembudidaya Ayam Ras (%), Menambah jumlah sapi betina produktif.

3. Mengeksplorasi bahan baku pakan yang murah, *Indikator:* Peningkatan Jumlah identifikasi bahan baku pakan (Jenis).
4. Mendorong pembangunan pengolahan pakan skala kecil (mini feedmil), *Indikator:* Peningkatan jumlah unit pengolahan pakan mini (unit)
5. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas, *Indikator:* Peningkatan Luasan Hijauan (Ha)
6. Memaksimalkan potensi ternak lokal (Aneka ternak, plasma nutfah), *Indikator:* Peningkatan Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) (Unit usaha)

5.3.2 Bidang Kesehatan Hewan

1. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan PHMS dan zoonosis, *Indikator:* Peningkatan wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM, %)
2. Mendorong penerapan sertifikasi zona/kompartemen bebas kasus penyakit, *Indikator:* Peningkatan jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ (Unit Usaha Peternakan Sapi, %)
3. Penjaminan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar, *Indikator:* Peningkatan Jumlah unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman (unit,%)
4. Penanganan gangguan reproduksi, *Indikator:* Tingkat kesembuhan GANGREP (ekor, %).
5. Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan, *Indikator:* Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan hewan (ekor, %).
6. Peningkatan pengawasan Lalu lintas Hewan/ Ternak, *Indikator:* 'persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan (Frekuensi,%).
7. Analisa Risiko Penyakit Hewan, *Indikator:* Menurunnya resiko masuknya PHMSZ (%),

5.3.3 Bidang Kawasan Dan Agribisnis

1. Mendorong teralokasikanya kawasan Peternakan di Kabupaten/Kota, *Indikator:* Tersedianya kawasan pemanfaatan untuk peternakan.
2. Mendorong integrasi dan pemanfaatan lahan perkebunan sawit, reklamasi pasca tambang dan perhutanan sosial, *Indikator:* Peningkatan unit usaha/kelp. Yang melakukan integrasi (unit/kelp, %)
3. Mendorong dan mengoptimalkan akses pembiayaan usaha peternakan, *Indikator:* Peningkatan Akses pembiayaan (Rupiah, %)
4. Mempermudah dan mendorong pelaku usaha peternakan, *Indikator:* Peningkatan jumlah Investasi (Rupiah, %)
5. Mengupayakan usaha peternakan untuk keluarga miskin, *Indikator:* Peningkatan Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi (KK, %)
6. Meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan peternakan, *Indikator:* Peningkatan Peran swasta (Perusahaan, %)
7. Pemberdayaan pemuda sebagai peternak millennial, *Indikator:* Peningkatan jumlah peternak millennial (Orang,%)
8. Peningkatan kapasitas SDM peternakan dan kelembagaan, *Indikator:* Jumlah DKT (unit, absolut), Jumlah Petugas/peternak yang di latih (orang, absolut)
9. Mendorong pelaksanaan kemitraan profesional berkeadilan, *Indikator:* Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice (%)
10. Peningkatan daya saing komoditas dan produk unggulan peternakan (keluar Kalimantan Timur), *Indikator:* Jumlah Komoditas potensi pengeluaran (jenis komoditas), peningkatan nilai pengeluaran komoditas (Rupiah, %), Peningkatan jumlah komoditas produk unggulan peternakan yang dipromosikan (%)
11. Meningkatkan pemanfaatan kotoran hewan dengan teknologi pengolahan, *Indikator:* Peningkatan Jumlah Unit pengolahan pupuk asal KOHE (Unit), Peningkatan Jumlah pupuk asal KOHE yang terjual (ton, %), Peningkatan pemanfaatan Jumlah Biogas (Unit,%).
12. Pengupayaan dan penerapan teknologi peternakan yang minim pencemaran lingkungan, *Indikator:* Peningkatan penggunaan biogas.

13. Pengendalian Supply demand produk peternakan, *Indikator:* Rasio SD komoditas/ produk peternakan (dokumen analisa), Data Informasi pasar (harian, absolut).
14. Peningkatan Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan (unit, %), *Indikator:* Persentase usaha pengolahan hasil yang ditingkatkan kapasitasnya (%).

5.3.4 Bidang Kesmavet

1. Peningkatan Konsumsi pangan asal hewan yang ASUH dalam upaya berkontribusi menurunkan kasus balita stunting, *Indikator:* Peningkatan konsumsi Pangan asal ternak balita stunting (Gram/hari, %)
2. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penyakit zoonosis, *Indikator:* Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis (%)
3. Peningkatan Mutu dan keamanan produk hewan (ASUH), *Indikator:* Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) (%)
4. Pengawasan lalu lintas dan peredaran produk hewan, *Indikator:* persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan (Frekuensi,%)
5. Pengendalian Pemetongan ternak ruminansia betina produktif, *Indikator:* Penurunan jumlah Pemetongan ternak sapi betina produktif (%)
6. Peningkatan penerapan masyarakat terhadap Kesejahteraan Hewan (Kesrawan), *Indikator:* Peningkatan jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan (%)

5.3.5 UPTD Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak

1. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak, *Indikator:* Peningkatan Jumlah Populasi Ternak/Hewan (ST), Peningkatan angka kelahiran (persentase,%), Peningkatan Calving Interval (Bulan), Peningkatan Jumlah ternak yang ber-SKLB (%), Penurunan Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan (persentase, %),

Peningkatan Jumlah Populasi Plasma Nutfah (ST), Peningkatan Jumlah pupuk (Ton),

2. Pengembangan Hijauan Pakan ternak secara kualitas dan kuantitas, Indikator: Peningkatan jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi (Stek/pols/kg), Peningkatan Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak (Ton), Peningkatan produksi pakan tambahan (kg), Peningkatan jumlah PAD (Rupiah,%).
3. Peningkatan PAD dari UPTD PTHPT Api-api

5.3.6 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Peningkatan Layanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet, *Indikator:* Peningkatan Ruang lingkup pengujian (terakreditasi /belum terakreditasi) (Absolut), Peningkatan Kepuasan pelanggan (score)
2. Peningkatan PAD UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam kerangka strategis nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional serta dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Program pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama 3 Tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), dan perubahan terakhir Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian

6. Program Penyuluhan Pertanian

6.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Kegiatan-kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan pada Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provisini

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian meliputi sub kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDH Tumbuhan dan Mikroorganisme
 - c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan
 - e. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor meliputi sub kegiatan:
 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 - f. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, meliputi sub kegiatan:

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
 - c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
 - Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
 - Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis

- e. Kegiatan Kesejahteraan Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
 - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya
5. Program Perizinan Pertanian
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dala Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Fasilitasi Pemenihan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
6. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
 - b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawan, meliputi sub kegiatan:
 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
 - Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kerangka pendanaan serta indikator kinerja Tahun 2024-2026 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Program Prioritas yang mendukung RPD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal			Target		Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
I. Indikator Kinerja Tujuan								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	1.94	1.94	2.00	2.14	2.29	2.45
II. Indikator Kinerja Sasaran Strategis								
2	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP)	Skor	108.04	104,00	108.50	109.12	110.00	110.00
3	Produksi Daging	Ton	74,461,00	76,235.10	76,024.70	77,773.30	79,717.60	79,717.60
4	Produksi Telur	Ton	14,834.60	14,433,00	15,294.50	15,799.20	16,352.20	16,352.20
5	Produksi Aneka Ternak	Ton	166.62	166.62	174.95	183.70	192.88	192.88
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	77,06	75,60	77,07	78,54	80,01	80,01
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,12	80,25	85,00	85,50	86,00	86,00

Tabel 49. Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023 (target)	2024	2025	2026	
I. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian								
1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	83.67	-2	-2.74	-2.75	-3.64	-3.64

Tabel 50. Indikator kinerja Program Prioritas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	72,55	97,19	97,67	97,1	
Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Calving Rate	%	60,00	61	61,5	62	
	Persentase Akseptor IB (%) dari Indukan	%	12,14	12,5	13	13,5	
Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	150,00	175	225	280	
	Penurunan Jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	2,00	1,95	1,85	1,75	
	Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	46,00	50	60	72	
	Jumlah Pembudidaya Unggas	RTUP	48,865	49,000	49,100	49,300	
	Jumlah Usaha Aneka Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	Unit Usaha	100	108	119	130	

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	72,55	97,19	97,67	97,1
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Jumlah Pengadaan Ternak Indukan/Bibit		1,254	2,700	4,700	7,200
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, Bank Pakan	Unit	10	17	30	40
	Luasan HPT	Ha	1,123	1,150	1,225	1,250
Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	Unit	23,26%	25,00	27,00%	29,00%
	Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	383.768	385.000	410.000	435.000
	Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	26,46	30	45,00	55,00
	Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	833	860	920	970
	jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	559	600	660	725

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	72,91	88,54	98,73	99
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	133,53	133,70	194,00	204,50
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Angka kelahiran	%	25,46	25,50	26,10	27,00
	Calving Interval	Bulan	17,05	17,01	16,66	16,3
	Persentase ternak yang ber-SKLB	%	0	0,00	5,00	10,00
	Angka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	2,14	2,13	2,05	1,97
	Jumlah produksi pupuk	Ton	5	10	20	25
	Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	Stek/Pols/Kg	6.000	10.000	15.000	20.000
	Jumlah Produksi HPT dan Pakan Tambahan	Ton	1400	1500	1800	1850

	Jumlah PAD	Rupiah	Rp 112.290.000	Rp 113.000.000	Rp 120.000.000	Rp 127.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	92,08	98,68	99,18	99,44
Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Ruang lingkup pengujian (terakreditasi /belum terakreditasi)	Absolut	34	39	45	50
	Nilai Kepuasan pelanggan	Skor	82,18	84,00	86,00	88,31
	Jumlah PAD	Rupiah	Rp 180.000.000	Rp 190.000.000	Rp 212.000.000	Rp 235.000.000
Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	%	79,51%	81,00%	86,00%	91,00%
	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting	Gram/Hari	0	27,50	30,50	33,60
	Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	5,83%	20,00%	22,50%	26%
Kegiatan Kesejahteraan Hewan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	%	1,30%	1,32%	1,41%	1,50%

	Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif	%	25%	24,80%	23,50%	22,00%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ	Skor	87,08	91,79	92,41	92,45
Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Masyarakat Veteriner	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	57,42%	58,00%	60,00%	65,00%
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	63	64	68	72
	Tingkat kesembuhan GANGREP	%	76,10%	76,50%	80,00%	83,00%
	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	%	43,32%	43,50%	45,80%	49,00%

Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	15	23	36	47
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ	Skor	87,08	91,79	92,41	92,45
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	71,33%	72%	80%	88%
	Persentase Penurunan resiko masuknya PHMSZ	%	3,47	3,20	2,85	2,40
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko. Retail. Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	1,17	32,90	65,80	100
	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	Unit	105	114,00	126	139

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	89,61	93,75	95,63	97,35
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Luasan kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Kawasan	126,00	134,00	147,00	158,00
	Jumlah Nilai Akses pembiayaan	(Rupiah, Milyar)	102,00	112,20	123,42	135,76
	Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	2,00	3,00	4,00	5,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	46,4	99,58	99,67	99,81
Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Presentase Jumlah peternak millennial	%	50	75	100	125
	Jumlah pembudidaya unggas	RTUP	48.865	49.000	49.100	49.300
	Rasio SD komoditas/ produk peternakan	Rasio	1.156	1.154	1.146	1.139
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah DKT	Unit	1	8	13	11

Indikator yang mendukung program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang terdapat pada Bidang Pakan, Perbibitan dan Produksi diantaranya yaitu Peningkatan Calving Rate; Calving Interval; Peningkatan Akseptor IB dari Indukan; Peningkatan Jumlah Bibit Sapi Ber-SKLB; Penurunan Jumlah DOC Kualitasnya dibawah Standar; Pertumbuhan Upgrade Closed House; Peningkatan Pembudidaya Unggas Lokal; Peningkatan Pembudidaya Ayam Ras Layer; Jumlah Usaha Aneka Ternak (Aneka Ternak/Plasma Nutfah); Peningkatan Jumlah Pengadaan Ternak; Jumlah Identifikasi bahan baku pakan; Jumlah Unit Pengolahan Pakan Mini; Peningkatan Jumlah Bank Pakan; Luasan Hijauan Pakan Ternak (HPT);

Pada Bidang Kawasan dan Agribisnis terdapat indikator yaitu Peningkatan Kapasitas Usaha Pengolahan Hasil Peternakan; Peningkatan Jumlah Unit Pengolahan Pupuk asal KOHE; Peningkatan Produksi pupuk asal KOHE; Peningkatan Pemanfaatan Jumlah Biogas; Jumlah Komoditas Ternak yang Berpotensi dan berpeluang pengeluaran; Peningkatan nilai pengeluaran komoditas ternak; Peningkatan Jumlah Produk unggulan peternakan yang dipromosikan; Peningkatan Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi.

Indikator yang mendukung Program Penyuluhan Pertanian yaitu Jumlah Peningkatan Jumlah Peternakan Millennial; Rasio SD Komoditas/Produk Peternakan; Data Informasi Pasar yang tidak tepat waktu; Jumlah DKT; Jumlah Petugas/Peternak yang dilatih.

Indikator yang mendukung pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Bidang Kesehatan Hewan diantaranya yaitu Peningkatan Wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ dengan cakupan 103 kecamatan di Kalimantan Timur; Tingkat kesembuhan GANGREP; Peningkatan Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan; Peningkatan Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Kasus PHMSZ; Persentase Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan administrasi dan teknis kesehatan; Persentase Unit Usaha obat hewan yang memiliki komitmen izin usaha; Peningkatan Jumlah Unit Usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat.

Indikator yang mendukung pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner diantaranya yaitu Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan; Persentase Produk Telur yang berstatus sehat, aman dan bermutu; Peningkatan Jumlah Unit usaha yang menerapkan persyaratan hygiene sanitasi; Peningkatan Konsumsi Pangan asal ternak balita

potensi stunting; Persentase wilayah 103 kecamatan yang terkendali zoonosis; Peningkatan Jumlah Unit Usaha yang menerapkan kesrawan; Penurunan Jumlah Pemotongan ternak sapi betina produktif; Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untu pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan.

Rancangan

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan peternakan untuk lima (3) Tahun yang memuat strategi atau kebijakan umum, serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur, yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis juga bertujuan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). RENSTRA ini juga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang baik serta acuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya sebagai fasilitator, stimulator, motivator, dan regulator.

Pada setiap Tahun akan disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada RENSTRA, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sehingga tertuang dalam program dan kegiatan. Pendanaan setiap kegiatan akan dihitung secara rinci dan mengacu pada peraturan penganggaran yang dihimpun secara berjenjang melalui Musrenbang.

Semoga RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja ikhlas, cerdas dan tuntas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian **Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan.**

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, ST, M.T

Pembina Tingkat I

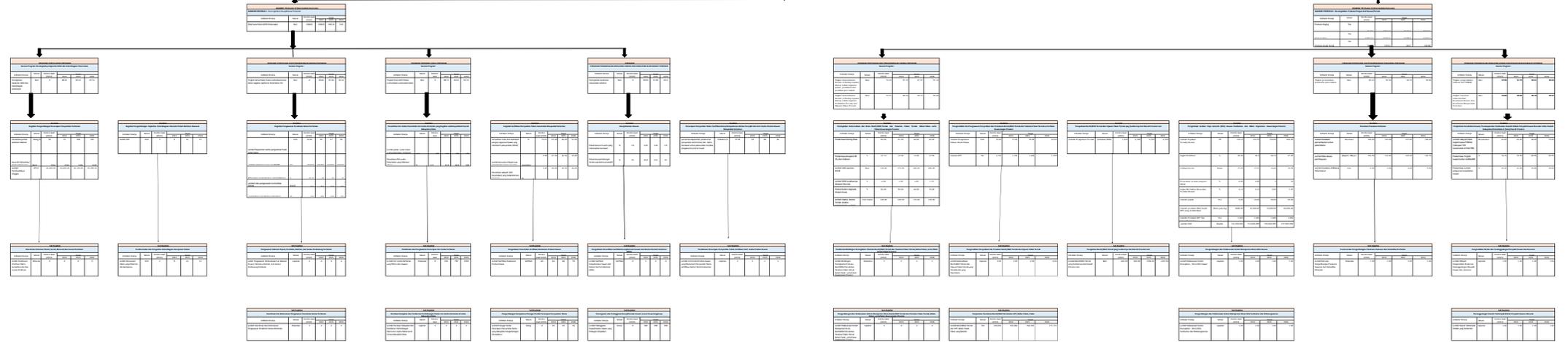
NIP 19741216 200604 1 006

Rancangan

LAMPIRAN

Rancangan

Sintesi dei dati generali				
Tipologia dell'opera
Località
Periodo di riferimento
...



**Tabel RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI		
								2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																	
1	Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi Sub Sektor Peternakan				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Migas dan Batubara	%	1,94	2,00	81.935.083.000	2,14	107.107.243.000	2,29	92.153.979.000	2,29	281.196.305.000		
	Meningkatnya kesejahteraan peternak				Nilai Tukar Petani Peternak	Nilai	104,00	108,58	11.728.510.704	109,12	14.799.263.352	110,00	13.276.587.552	110,00	39.804.361.607	Kepala Dinas	
		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	72,22	96,88	3.086.450.185	97,75	3.894.542.987	97,61	3.493.838.829	97,61	10.474.832.002	Kepala Dinas	
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	23,26	25,00	1.851.870.111	27,00	2.336.725.792	29,00	2.096.303.298	29,00	6.284.899.201	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Agribisnis Peternakan	
					Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	383.768	385.000		410.000		435.000		435.000	-		
					Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	26,46	37,04		47,62		58,20		58	-		
					Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	559,00	600,00		660,00		725,00		725			
					Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	833,00	860,00	1.234.580.074	920,00	1.557.817.195	970,00	1.397.535.532	970,00	4.189.932.801		
		3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2,00	4,00	1.851.870.111	4,00	2.336.725.792	4,00	2.096.303.298	4,00	6.284.899.201		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
		3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1,00	1,00	1.234.580.074	1,00	1.557.817.195	1,00	1.397.535.532	1,00	4.189.932.801		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	75,08	95,11	3.703.740.222	95,81	4.673.451.585	97,75	4.192.606.595	97,75	12.569.798.402	Kepala Dinas	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	57,42	58,00	555.561.033	60,00	701.017.738	65,00	628.890.989	65,00	1.885.469.760	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	1,00	1,00	555.561.033	1,00	701.017.738	1,00	628.890.989	1,00	1.885.469.760		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	%	79,51	81,00	1.481.496.089	86,00	1.869.380.634	91,00	1.677.042.638	91,00	5.027.919.361	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting			Gram/hari	0,00	27,50	30,50	33,60	33,60							
		Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis			%	5,83	20,00	555.561.033	22,50	701.017.738	26,00	628.890.989	26,00	1.885.469.760			
			3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	64,00	66,00	1.481.496.089	68,00	1.869.380.634	70,00	1.677.042.638	204,00	5.027.919.361		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.04.1.04.02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	0,00	20,00	555.561.033	20,00	701.017.738	20,00	628.890.989	60,00	1.885.469.760		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	%	1,30	1,32	1.111.122.067	1,41	1.402.035.475	1,50	1.257.781.979	1,50	3.770.939.521	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif			%	25,00	24,80	23,50	22,00	22,00							
			3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	0,00	1,00	185.187.011	2,00	233.672.579	3,00	209.630.330	6,00	628.489.920		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI			
								2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	
			3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	0,00	100,00	925.935.056	200,00	1.168.362.896	300,00	1.048.151.649	600,00	3.142.449.601		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	
			3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	67,17	99,35	617.290.037	99,59	778.908.597	99,73	698.767.766	99,73	2.094.966.400	Kepala Dinas		
			3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	1,17	32,90	123.458.007	65,80	155.781.719	100,00	139.753.553	100,00	418.993.280	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Agribisnis Peternakan		
					Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	Unit	105,00	114,00	493.832.030	126,00	623.126.878	139,00	559.014.213	139,00				
			3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	395	123.458.007	790	155.781.719	1200	139.753.553	2.384	418.993.280		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	
			3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1,00	1,00	493.832.030	1,00	623.126.878	1,00	559.014.213	1,00	1.675.973.120		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	
			3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	Skor	46,40	99,58	4.321.030.259	99,67	5.452.360.182	99,81	4.891.374.361	99,81	14.664.764.803	Kepala Dinas		
			3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase jumlah peternak millennial	%	50,00	75,00	1.728.412.104	100,00	2.180.944.073	125,00	1.956.549.744	125,00	5.865.905.921	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Agribisnis Peternakan		
					Rasio SD komoditas/ produk peternakan	rasio	1,156	1,154		1,146		1,139	1,139					
					Jumlah pembudidaya unggas	RTUP	49.048	49.190		49.310		49.530		148.030				
			3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis. Sosial. Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	4,00	3,00	1.728.412.104	3,00	2.180.944.073	3,00	1.956.549.744	2,00	5.865.905.921		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	
			3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	Unit	1,00	8,00	2.592.618.156	13,00	3.271.416.109	11,00	2.934.824.617	32,00	8.798.858.882	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Agribisnis Peternakan		
			3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1,00	8,00	2.592.618.156	13,00	3.271.416.109	11,00	2.934.824.617	32,00	8.798.858.882		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI		
								2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
		Meningkatnya produksi pangan asal ternak			1. Produksi daging	Ton	76.235,08	76.024,70	35.864.551.153	77.773,30	45.254.589.512	79.717,60	40.598.407.198	79.717,60	121.717.547.862		
					2. Produksi telur	Ton	14.433,04	15.294,50		15.799,20		16.352,20		16.352,20			
					3. Produksi Ternak Lainnya	Ton	166,62	174,95		183,70		192,88		192,88			
			3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	72,55	97,19	22.963.189.378	97,67	28.975.399.825	97,10	25.994.160.891	97,10	77.932.750.094	Kepala Dinas	
					Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	72,91	88,54	3.271.637.196	98,73	4.128.215.566	99,00	3.703.469.159	99,00	3.351.946.241	Kepala Dinas	
			3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Populasi Ternak/Hewan	ST	133,53	133,70	1.799.400.458	194,00	2.270.518.562	204,50	2.036.908.038	204,50	6.106.827.057	Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
					angka kelahiran	%	25,46	25,50		26,10		27,00		27,00			
					Calving Interval	Bulan	17,05	17,01		16,66		16,30		16,30			
					Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	%	0,00	0,00		0,05		0,10		0,10			
					Angaka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan	%	2,14	2,13		2,05		1,97		1,97			
					Jumlah produksi pupuk	Ton	5,00	10,00	1.472.236.738	20,00	1.857.697.005	25,00	1.666.561.122	25,00	4.996.494.865		
					Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi	(Stek/pols/kg)	6000,00	10.000,00		15.000,00		20.000,00		20.000,00			
					Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan	Ton	1.400	1.500		1.800		1.850		1.850			
					Jumlah PAD	Rupiah	112.290.000	113.000.000		120.000.000		127.000.000		127.000.000			
			3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1,00	1,00	1.799.400.458	1,00	2.270.518.562	1,00	2.036.908.038	1,00	6.106.827.057		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1,00	1,00	1.472.236.738	1,00	1.857.697.005	1,00	1.666.561.122	1,00	4.996.494.865		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI			
								2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	
			3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit	Persentase Calving Rate	%	60,00	61,00	5.777.834.747	61,50	7.290.584.472	62,00	6.540.466.289	62,00	19.608.885.508	Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan		
				Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	12,14	12,50		13,00		13,50		13,50					
				Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	150,00	175,00		225,00		280,00		280,00					
				Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	2,00	1,95	2.444.468.547	1,85	3.084.478.046	1,75	2.767.120.353	1,75	8.296.066.946				
				Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	46,00	50,00		60,00		72,00		72,00					
				Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	Unit Usaha	100,00	108,00		119,00		130,00		357,00					
			3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	5.777.834.747	1,00	7.290.584.472	1,00	6.540.466.289	1,00	19.608.885.508		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	
			3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan. serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3,00	3,00	2.444.468.547	3,00	3.084.478.046	3,00	2.767.120.353	3,00	8.296.066.946		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	
			3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	Unit	10,00	17,00	2.888.917.373	30,00	3.645.292.236	40,00	3.270.233.144	87,00	9.804.442.754	Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan		
				Luasan HPT	Ha	1.123	1.150	3.333.366.200	1.225	4.206.106.426	1.250	3.773.345.936	3.625					
			3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	2,00	2,00	2.888.917.373	2,00	3.645.292.236	2,00	3.270.233.144	2,00	9.804.442.754		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT. Bahan Pakan. Pakan yang Beredar	Ton	100.000	165.066	3.333.366.200	168.367	4.206.106.426	171.734	3.773.345.936	505.167	11.312.818.562		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	%	11,83	29,58	740.748.044	47,30	934.690.317	65,00	838.521.319	65,00	2.513.959.680	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	
			3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu. Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1,00	1,00	740.748.044	1,00	934.690.317	1,00	838.521.319	1,00	2.513.959.680		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	(Indukan/Bibit)	1.254	2.700	7.777.854.467	4.700	9.814.248.328	7.200	8.804.473.850	7.200	26.396.576.645	Kepala Bidang Perbibitan, Pakan dan Produksi Peternakan	
			3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	200,00	800,00	7.777.854.467	1.300,00	9.814.248.328	1.100,00	8.804.473.850	3.200	26.396.576.645		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	89,61	93,75	1.234.580.074	95,63	1.557.817.195	97,35	1.397.535.532	97,35	4.189.932.801	Kepala Dinas	
			3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	126,00	134,00	1.234.580.074	147,00	1.557.817.195	158,00	1.397.535.532	158,00	4.189.932.801	Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis Peternakan	
				Jumlah Nilai Akses pembiayaan	(Rupiah, Milyar)	102,00	107,00		120,00		133,00		133,00				
				Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	Unit	2,00	3,00		4,00		5,00		5,00				
			3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1,00	1,00	1.234.580.074	1,00	1.557.817.195	1,00	1.397.535.532	1,00	4.189.932.801		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	87,08	91,79	6.666.732.400	92,41	8.412.212.852	92,45	7.546.691.872	92,45	22.625.637.124	Kepala Dinas	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
					Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Skor	92,08	98,68	1.728.412.104	99,18	2.180.944.073	99,44	1.956.549.744	99,44	5.865.905.921	Kepala Dinas	
			3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	63,00	64,00	1.851.870.111	68,00	2.336.725.792	72,00	2.096.303.298	72,00	6.284.899.201	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	
				Tingkat kesembuhan GANGREP	%	76,10	76,50	2.222.244.133	80,00	2.804.070.951	83,00	2.515.563.957	83,00	7.541.879.041			
				Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	43,32	43,50		45,80		49,00	49,00					
			3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1,00	1,00	1.851.870.111	1,00	2.336.725.792	1,00	2.096.303.298		6.284.899.201		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	1,00	1,00	2.222.244.133	1,00	2.804.070.951	1,00	2.515.563.957		7.541.879.041		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	71,33	72,00	370.374.022	80,00	467.345.158	88,00	419.260.660	88,00	1.256.979.840	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	
				Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	%	3,47	3,20	1.481.496.089	2,85	1.869.380.634	2,40	1.677.042.638	2,40	5.027.919.361			
			3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1,00	1,00	370.374.022	1,00	467.345.158	1,00	419.260.660	1,00	1.256.979.840		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	1,00	1,00	1.481.496.089	1,00	1.869.380.634	1,00	1.677.042.638	1,00	5.027.919.361		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	15,00	23,00	740.748.044	36,00	934.690.317	47,00	838.521.319	47,00	2.513.959.680	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	
				Jumlah Ruang lingkup pengujian	Absolut	34,00	39,00	1.728.412.104	45,00	2.180.944.073	50,00	1.956.549.744	50,00	5.865.905.921	Kepala UPTD. Lab Keswan & Kesmavet		
				Nilai Kepuasan pelanggan	score	82,18	84,00		84,00		88,31		88,31				
				Jumlah PAD	Rupiah	180.000.000	190.000.000		212.000.000		235.000.000		235.000.000				
			3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	4,00	8,00	740.748.044	13,00	934.690.317	11,00	838.521.319	32,00	2.513.959.680		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	105,00	400,00	1.728.412.104	500,00	2.180.944.073	600,00	1.956.549.744	1.500	5.865.905.921		bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas				Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Poin	78,25	78,50	34.342.021.143	79,30	47.053.390.137	80,01	38.278.984.251	80,01	119.674.395.531		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,60	85,00		85,50		86,00	86,00	86,00			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dinas dan Kepuasan Masyarakat			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	77,06	78,50	34.342.021.143	79,30	47.053.390.137	80,01	38.278.984.251	80,01	119.674.395.531		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89,50	85,00		85,50		86,00	86,00	86,00			
			3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Layanan Kesekretarian (Dinas)	Score	90,00	93,30	28.848.139.814	95,17	32.121.103.619	96,88	32.059.951.134	96,88	93.029.194.567	Kepala Dinas	
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti (Dinas)	%	95,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00			
					Indeks Layanan Kesekretarian (UPTD PTHPT)	Score	90,00	93,30	2.901.263.174	95,17	3.660.870.408	96,88	3.284.208.500	96,88	9.846.342.082	Kepala Dinas	
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti (UPTD PTHPT)	%	95,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00			
					Indeks Layanan Kesekretarian (UPTD LKK)	Score	90,00	93,30	2.592.618.156	95,17	11.271.416.109	96,88	2.934.824.617	96,88	16.798.858.882	Kepala Dinas	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI		
								2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti (UPTD LKK)	%	95,00	100,00		100,00		100,00					
			3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	88,00	90,00	1.691.374.702	92,00	2.134.209.557	94,00	1.914.623.678	94,00	5.740.207.937	Sekretaris Dinas	
			3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8,00	8,00	591.981.146	8,00	746.973.345	8,00	670.118.287	8,00	2.009.072.778	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	
			3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	84.568.735	2,00	106.710.478	2,00	95.731.184	2,00	287.010.397	Smd	
			3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	84.568.735	2,00	106.710.478	2,00	95.731.184	2,00	287.010.397	smd	
			3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	5,00	338.274.940	5,00	426.841.911	5,00	382.924.736	5,00	1.148.041.587	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	
			3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9,00	9,00	591.981.146	9,00	746.973.345	9,00	670.118.287	9,00	2.009.072.778	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv	
			3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran (Dinas)	Score	89,00	90,00	21.744.366.067	91,00	23.157.423.480	92,00	24.018.531.685	92,00	68.920.321.232	Sekretaris Dinas	
					Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran (UPTD. PTHPT)	Score	89,00	90,00	232.101.054	91,00	292.869.633	92,00	262.736.680	92,00	787.707.367	Kepala UPTD. PTHPT	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI		
								2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
					Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran (UPTD. LKK)	Score	89,00	90,00	207.409.452	91,00	261.713.289	92,00	234.785.969	92,00	703.908.711	UPTD Lab Keswan & Kesmavet	
			3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81,00	81,00	20.391.266.306	81,00	21.450.055.834	81,00	22.486.832.742	81,00	64.328.154.882		Smd
			3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas)	Dokumen	12,00	12,00	676.549.881	12,00	853.683.823	12,00	765.849.471	12,00	2.296.083.175		smd
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPTD. PTHPT)	Dokumen	12,00	12,00	188.582.106	12,00	237.956.577	12,00	213.473.552	12,00	640.012.235		smd
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPTD. LKK)	Dokumen	12,00	12,00	168.520.180	12,00	212.642.047	12,00	190.763.600	12,00	571.925.827		smd
			3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas)	Dokumen	12,00	12,00	84.568.735	12,00	106.710.478	12,00	95.731.184	12,00	287.010.397		smd
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD. PTHPT)	Dokumen	12,00	12,00	43.518.948	12,00	54.913.056	12,00	49.263.127	12,00	147.695.131		Smd
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (UPTD. LKK)	Dokumen	12,00	12,00	38.889.272	12,00	49.071.242	12,00	44.022.369	12,00	131.982.883		Smd
			3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	1,00	84.568.735	1,00	106.710.478	1,00	95.731.184	1,00	287.010.397		Smd
			3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	1,00	380.559.308	1,00	480.197.150	1,00	430.790.328	1,00	1.291.546.786		smd, bpn, luarPrv

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			3.27.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	2,00	126.853.103	2,00	160.065.717	2,00	143.596.776	2,00	430.515.595		smd
			3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD (Dinas)	Score	77,00	80,00	422.843.675	83,00	533.552.389	86,00	478.655.920	86,00	1.435.051.984	Sekretaris Dinas	
					Tingkat Pengelolaan administrasi BMD (UPTD. PTHPT)	Score	77,00	80,00	290.126.317	83,00	366.087.041	86,00	328.420.850	86,00	984.634.208	Kepala UPTD. PTHPT	
					Tingkat Pengelolaan administrasi BMD (UPTD. LKK)	Score	77,00	80,00	259.261.816	83,00	327.141.611	86,00	293.482.462	86,00	879.885.888	UPTD Lab Keswan & Kesmavet	
			3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas)	Dokumen	1,00	1,00	84.568.735	1,00	106.710.478	1,00	95.731.184	1,00	287.010.397		smd
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (UPTD. PTHPT)	Dokumen	1,00	1,00	58.025.263	1,00	73.217.408	1,00	65.684.170	1,00	196.926.842		ppu
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (UPTD. LKK)	Dokumen	1,00	1,00	51.852.363	1,00	65.428.322	1,00	58.696.492	1,00	175.977.178		smd
			3.27.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas)	Dokumen	2,00	2,00	84.568.735	2,00	106.710.478	2,00	95.731.184	2,00	287.010.397		smd
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (UPTD. PTHPT)	Dokumen	2,00	2,00	116.050.527	2,00	146.434.816	2,00	131.368.340	2,00	393.853.683		ppu
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (UPTD. LKK)	Dokumen	2,00	2,00	103.704.726	2,00	130.856.644	2,00	117.392.985	2,00	351.954.355		smd
			3.27.01.1.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas)	Laporan	4,00	4,00	253.706.205	4,00	320.131.434	4,00	287.193.552	4,00	861.031.191		smd
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (UPTD. PTHPT)	Laporan	4,00	4,00	116.050.527	4,00	146.434.816	4,00	131.368.340	4,00	393.853.683		ppu
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (UPTD. LKK)	Laporan	4,00	4,00	103.704.726	4,00	130.856.644	4,00	117.392.985	4,00	351.954.355		smd

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian (Dinsa)	Score	77,00	80,00	549.696.778	83,00	693.618.106	86,00	622.252.696	86,00	1.865.567.580	Sekretaris Dinas	
					Tingkat Pengelolaan kepegawaian (UPTD. PTHPT)	Score	77,00	80,00	435.189.476	83,00	549.130.561	86,00	492.631.275	86,00	1.476.951.312	Kepala UPTD. PTHPT	
					Tingkat Pengelolaan kepegawaian (UPTD. LKK)	Score	77,00	80,00	388.892.723	83,00	490.712.416	86,00	440.223.693	86,00	1.319.828.832	UPTD Lab Keswan & Kesmavet	
			3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Dinas)	Paket	3,00	3,00	84.568.735	4,00	106.710.478	4,00	95.731.184	11,00	287.010.397		smd
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (UPTD. PTHPT)	Paket	3,00	3,00	290.126.317	3,00	366.087.041	3,00	328.420.850	3,00	984.634.208		ppu
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (UPTD. LKK)	Paket	3,00	5,00	129.630.908	3,00	163.570.805	5,00	146.741.231	5,00	439.942.944		smd
			3.27.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	84.568.735	1,00	106.710.478	1,00	95.731.184	1,00	287.010.397		smd
			3.27.01.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4,00	4,00	126.853.103	4,00	160.065.717	4,00	143.596.776	4,00	430.515.595		smd
			3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dinas)	Orang	15,00	16,00	253.706.205	17,00	320.131.434	18,00	287.193.552	51,00	861.031.191		smd
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (UPTD. PTHPT)	Orang	2,00	2,00	145.063.159	4,00	183.043.520	5,00	164.210.425	11,00	492.317.104		ppu
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (UPTD. LKK)	Orang	1,00	10,00	259.261.816	13,00	327.141.611	16,00	293.482.462	39,00	879.885.888		smd

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum (Dinas)	%	77,00	80,00	1.437.668.496	83,00	1.814.078.124	86,00	1.627.430.127	86,00	4.879.176.747	Sekretaris Dinas	
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum (UPTD. PTHPT)	%	77,00	80,00	580.252.635	83,00	732.174.082	86,00	656.841.700	86,00	1.969.268.416	Kepala UPTD. PTHPT	
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum (UPTD. LKK)	%	77,00	80,00	466.671.268	83,00	588.854.900	86,00	528.268.431	86,00	1.583.794.599	UPTD Lab Keswan & Kesmavet	
			3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas)	Paket	4,00	4,00	42.284.368	4,00	53.355.239	4,00	47.865.592	4,00	143.505.198		smd
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPTD. PTHPT)	Paket	12,00	4,00	58.025.263	4,00	73.217.408	4,00	65.684.170	4,00	196.926.842		ppu
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPTD. LKK)	Paket	1,00	4,00	51.852.363	4,00	65.428.322	4,00	58.696.492	4,00	175.977.178		smd
			3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dinas)	Paket	87,00	87,00	338.274.940	34,00	426.841.911	33,00	382.924.736	33,00	1.148.041.587		smd
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPTD. PTHPT)	Paket	12,00	12,00	87.037.895	12,00	109.826.112	12,00	98.526.255	12,00	295.390.262		ppu
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPTD. LKK)	Paket	9,00	19,00	77.778.545	40,00	98.142.483	75,00	88.044.739	75,00	263.965.766		smd

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dinas)	Paket	8,00	4,00	84.568.735	4,00	106.710.478	4,00	95.731.184	4,00	287.010.397		smd
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPTD. PTHPT)	Paket	4,00	4,00	58.025.263	4,00	73.217.408	4,00	65.684.170	4,00	196.926.842		ppu
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPTD. LKK)	Paket	4,00	4,00	51.852.363	4,00	65.428.322	4,00	58.696.492	4,00	175.977.178		smd
			3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dinas)	Dokumen	12,00	12,00	42.284.368	12,00	53.355.239	12,00	47.865.592	12,00	143.505.198		smd
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (UPTD. PTHPT)	Dokumen	12,00	12,00	58.025.263	12,00	73.217.408	12,00	65.684.170	12,00	196.926.842		ppu
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (UPTD. LKK)	Dokumen	12,00	12,00	51.852.363	12,00	65.428.322	12,00	58.696.492	12,00	175.977.178		smd
			3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas)	Laporan	12,00	12,00	930.256.086	12,00	1.173.815.256	12,00	1.053.043.023	12,00	3.157.114.365		smd
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD. PTHPT)	Laporan	12,00	12,00	319.138.949	12,00	402.695.745	12,00	361.262.935	12,00	1.083.097.629		ppu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD. LKK)	Laporan	12,00	12,00	233.335.634	12,00	294.427.450	12,00	264.134.216	12,00	791.897.299		smd
			3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Dinas)	%	77,00	80,00	422.843.675	83,00	533.552.389	86,00	478.655.920	86,00	1.435.051.984	Sekretaris Dinas	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI		
								2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
					Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (UPTD. PTHPT)	%	77,00	80,00	348.151.581	83,00	439.304.449	86,00	394.105.020	86,00	1.181.561.050	Kepala UPTD. PTHPT	
					Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (UPTD. LKK)	%	77,00	80,00	311.114.179	83,00	8.392.569.933	86,00	352.178.954	86,00	9.055.863.066	UPTD Lab Keswan & Kesmavet	
			3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dinas)	Unit	4,00	2,00	338.274.940	5,00	426.841.911	5,00	382.924.736	12,00	1.148.041.587		smd
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (UPTD. PTHPT)	Unit	0,00	2,00	174.075.790	3,00	219.652.224	4,00	197.052.510	9,00	590.780.525		ppu
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (UPTD. LKK)	Unit	1,00	2,00	155.557.089	2,00	196.284.967	2,00	176.089.477	6,00	527.931.533		smd
			3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (UPTD. LKK)	Paket	-	-	-	15,00	8.000.000.000	-	-	15,00	8.000.000.000		smd
			3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dinas)	Unit	0,00	3,00	84.568.735	3,00	106.710.478	3,00	95.731.184	9,00	287.010.397		smd
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (UPTD. PTHPT)	Unit	2,00	4,00	174.075.790	5,00	219.652.224	6,00	197.052.510	15,00	590.780.525		ppu
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (UPTD. LKK)	Unit	0,00	10,00	155.557.089	20,00	196.284.967	30,00	176.089.477	60,00	527.931.533		smd
			3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas)	%	77,00	80,00	1.522.237.231	83,00	1.920.788.601	86,00	1.723.161.311	86,00	5.166.187.143	Sekretaris Dinas	
					Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD. PTHPT)	%	77,00	80,00	580.252.635	83,00	732.174.082	86,00	656.841.700	86,00	1.969.268.416	Kepala UPTD. PTHPT	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
					Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD. LKK)	%	77,00	80,00	518.523.631	83,00	654.283.222	86,00	586.964.923	86,00	1.759.771.776	UPTD Lab Keswan & Kesmavet	
			3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas)	Laporan	4,00	4,00	84.568.735	4,00	106.710.478	4,00	95.731.184	4,00	287.010.397		smd
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD. PTHPT)	Laporan	4,00	4,00	58.025.263	4,00	73.217.408	4,00	65.684.170	4,00	196.926.842		ppu
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD. LKK)	Laporan	4,00	4,00	51.852.363	4,00	65.428.322	4,00	58.696.492	4,00	175.977.178		smd
			3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dinas)	Laporan	12,00	12,00	422.843.675	12,00	533.552.389	12,00	478.655.920	12,00	1.435.051.984		smd
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPTD. PTHPT)	Laporan	12,00	12,00	232.101.054	12,00	292.869.633	12,00	262.736.680	12,00	787.707.367		ppu
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPTD.LKK)	Laporan	12,00	12,00	207.409.452	12,00	261.713.289	12,00	234.785.969	12,00	703.908.711		smd
			3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dinas)	Laporan	12,00	12,00	1.014.824.821	12,00	1.280.525.734	12,00	1.148.774.207	12,00	3.444.124.762		smd
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPTD. PTHPT)	Laporan	12,00	12,00	290.126.317	12,00	366.087.041	12,00	328.420.850	12,00	984.634.208		ppu
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPTD. LKK)	Laporan	12,00	12,00	259.261.816	12,00	327.141.611	12,00	293.482.462	12,00	879.885.888		smd

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI		
								2024		2025		2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
			3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	%	77,00	80,00	1.057.109.188	83,00	1.333.880.973	86,00	1.196.639.799	86,00	3.587.629.961	Sekretaris Dinas	
			Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD. PTHPT)		%	77,00	80,00	435.189.476	83,00	549.130.561	86,00	492.631.275	86,00	1.476.951.312	Kepala UPTD. PTHPT		
			Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD. LKK)		%	77,00	80,00	440.745.086	83,00	556.140.739	86,00	498.920.185	86,00	1.495.806.010	UPTD Lab Keswan & Kesmavet		
			3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dinas)	Unit	49,00	49,00	177.594.344	49,00	224.092.003	49,00	201.035.486	49,00	602.721.833		smd
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPTD. PTHPT)		Unit	16,00	20,00	58.025.263	20,00	73.217.408	23,00	65.684.170	23,00	196.926.842		ppu	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPTD. LKK)		Unit	5,00	6,00	51.852.363	11,00	65.428.322	11,00	58.696.492	11,00	175.977.178		smd	
			3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dinas)	Unit	180,00	180,00	380.559.308	180,00	480.197.150	180,00	430.790.328	180,00	1.291.546.786		smd
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPTD. PTHPT)		Unit	56,00	70,00	188.582.106	72,00	237.956.577	75,00	213.473.552	75,00	640.012.235		ppu	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPTD. LKK)		Unit	46,00	57,00	168.520.180	67,00	212.642.047	77,00	190.763.600	77,00	571.925.827		smd	
			3.27.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Dinas)	Unit	4,00	4,00	160.680.597	4,00	202.749.908	4,00	181.889.249	4,00	545.319.754		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								PENANGGUNG JAWAB UNIT KERJA	LOKASI
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (UPTD LKQ)	Unit	2,00	2,00	51.852.363	2,00	65.428.322	2,00	58.696.492	2,00	175.977.178		
			3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Dinas)	Unit	0,00	5,00	338.274.940	4,00	426.841.911	2,00	382.924.736	2,00	1.148.041.587		smd
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (UPTD. PTHPT)	Unit	2,00	2,00	188.582.106	3,00	237.956.577	4,00	213.473.552	4,00	640.012.235		ppu
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (UPTD. LKQ)	Unit	0,00	1,00	168.520.180	2,00	212.642.047	3,00	190.763.600	3,00	571.925.827		smd

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512 198903 2 009

